

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
TAHUN 2021-2026
KABUPATEN PASANGKAYU**





Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2021

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2021-2026 KABUPATEN PASANGKAYU



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas karuniaNya sehingga penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Melalui kesempatan ini, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak baik pemerintah, swasta, akademisi, LSM, dan masyarakat yang telah berpartisipasi secara aktif memberikan sumbangan pemikiran dan saran. Proses penyusunan yang telah dilakukan diharapkan dapat merepresentasi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan di Kabupaten Pasangkayu.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kebijakan, rencana dan/atau program Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu khususnya dalam mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pasangkayu.

Pasangkayu, Desember 2021

Ketua POKJA KLHS,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran	4
1.4. Keluaran.....	5
1.5. Pendekatan dan Metodologi	5
1.6. Sistematika Penulisan	9
BAB 2. DASAR TEORI	11
2.1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	11
2.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	14
2.2.1. Tinjauan Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	14
2.2.2. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	16
2.2.3. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia	19
BAB 3. KONDISI UMUM DAERAH.....	23
3.1. Kondisi Wilayah.....	23
3.1.1. Batas administrasi	23
3.1.2. Topografi	26
3.1.3. Bentang Lahan (Ekoregion)	29
3.1.4. Geologi	31
3.1.5. Hidrologi	33
3.1.6. Klimatologi.....	35
3.1.7. Penggunaan Lahan	37
3.1.8. Kawasan Hutan	39
3.1.9. Kebencanaan	41
3.2. Kondisi Demografi dan Sosial.....	49
3.2.1. Jumlah Penduduk.....	49
3.2.2. Pendidikan	50
3.2.3. Kesehatan	54
3.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	56
3.4. Jasa Ekosistem	61



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

3.4.1. Jasa Lingkungan Penyediaan (Provisioning)	61
3.4.2. Jasa Lingkungan Pengaturan (Regulating)	67
3.4.3. Jasa Lingkungan Pendukung (Supporting)	81
BAB 4. CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	84
4.1. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target	91
4.2. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	103
4.3. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mancapai Target dan Tidak Ada Data.....	111
4.4. Analisis Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu	136
4.5. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB	146
BAB 5. ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	149
5.1. Keterkaitan Indikator TPB dengan Daya Dukung dan Daya Tampung	160
BAB 6. ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI.....	167
6.1. Mekanisme Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan.....	167
6.2. Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB	168
BAB 5. KESIMPULAN	210



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengaruh KLHS pada Berbagai Tipe Rencana Pembangunan.....	12
Tabel 3.1 Luas, Presentase, dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasangkayu.....	24
Tabel 3.2 Kondisi Bentang Lahan di Kabupaten Pasangkayu	29
Tabel 3.3 Informasi Geologi di Kabupaten Pasangkayu	31
Tabel 3.4 Kondisi Iklim (Curah Hujan, dan Hari Hujan) Kabupaten Pasangkayu	35
Tabel 3.5 Penggunaan lahan Kabupaten Pasangkayu	37
Tabel 3.6 Fungsi Kawasan Kabupaten Pasangkayu.....	39
Tabel 3.7 Daerah Rawan bencana PerKecamatan di Kabupaten Pasangkayu.....	40
Tabel 3.8 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, Kepadatan, dan Persentase Penduduk Kabupaten Pasangkayu	49
Tabel 3.9 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-kanak dibawah Kemendikbud Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu	51
Tabel 3.10 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal dibawah Kementerian Agama di Kabupaten Pasangkayu	51
Tabel 3.11 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) dibawah Kemendikbud Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu	51
Tabel 3.12 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah dibawah Kementerian Agama di Kabupaten Pasangkayu	52
Tabel 3.13 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibawah Kemendikbud Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu ..	52
Tabel 3.14 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah dibawah Kementerian Agama di Kabupaten Pasangkayu	52
Tabel 3.15Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) dibawah Kemendikbud Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu	53
Tabel 3.16 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibawah Kemendikbud Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu ..	53
Tabel 3.17 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah dibawah Kementerian Agama di Kabupaten Pasangkayu	53
Tabel 3.18 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu	55
Tabel 3.19 Jumlah TenagaKesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu	55



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

Tabel 3.20 Status Daya Dukung Daya Tampung Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu	57
Tabel 3.21 Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu.....	59
Tabel 3.22 Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Pasangkayu....	62
Tabel 3.23 Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Kabupaten Pasangkayu.....	65
Tabel 3.24 Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara di Kabupaten Pasangkayu	67
Tabel 3.25 Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Pasangkayu	69
Tabel 3.26 Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Pasangkayu	71
Tabel 3.27 Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan, dan Perlindungan Terhadap Bencana Banjir di Kabupaten Pasangkayu	73
Tabel 3.28 Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan, dan Perlindungan Terhadap Bencana Kebakaran di Kabupaten Pasangkayu	75
Tabel 3.29 Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air di Kabupaten Pasangkayu	77
Tabel 3.30 Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air, dan Pengolahan Limbah di Kabupaten Pasangkayu	79
Tabel 3.31 Kelas Jasa Ekosistem Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Pasangkayu	82
Tabel 4.1 Capaian Indikator TPB Kabupaten Pasangkayu	87
Tabel 4.2 Jumlah Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Indikator yang Tidak Memiliki Data pada Setiap Tujuan TPB	88
Tabel 4.3 Jumlah Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Indikator yang Tidak Memiliki Data pada Setiap Tujuan TPB	89
Tabel 4.4 Indikator TPB pada Kelompok Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target di Kabupaten Pasangkayu	91
Tabel 4.5 Indikator TPB pada Kelompok Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target di Kabupaten Pasangkayu	103
Tabel 4.6 Indikator TPB pada Kelompok Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target di Kabupaten Pasangkayu	112
Tabel 4.7 Indikator TPB pada Kelompok Indikator Tidak Ada Data di Kabupaten Pasangkayu	113
Tabel 4.8 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019 ..	137
Tabel 4.9 Pertumbuhan PAD Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019	138
Tabel 4.10 Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019 ..	138



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

Tabel 4.11 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019	139
Tabel 4.12 Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019	140
Tabel 4.13 Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019	141
Tabel 4.14 Struktur Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019	142
Tabel 4.15 Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Pasangkayu, 2016-2019	143
Tabel 4.16 Struktur Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Ekonomi Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019	144
Tabel 4.17 Surplus/Defisit APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019.....	145
Tabel 4.18 Perkembangan SILPA Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019.....	145
Tabel 4.19 Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB	148
Tabel 5.1 Capaian Indikator TPB Kelompok Indikator SB KLHS RPJMD Kabupaten Pasangkayu	149
Tabel 5.2 Keterkaitan Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan Capaian Indikator TPB Kelompok SB pada KLHS RPJMD Kabupaten Pasangkayu	160
Tabel 5.3 Distribusi Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem Indikator TPB Kelompok SB dan BB terkait D3TLH KLHS RPJMD Kabupaten Pasangkayu.....	166



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan KLHS RPJMD	8
Gambar 2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)	17
Gambar 2.2 Tahapan Penentuan Indikator TPB Daerah	18
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Pasangkayu	25
Gambar 3.2 Peta Topografi Kabupaten Pasangkayu.....	27
Gambar 3.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pasangkayu.....	28
Gambar 3.4 Peta Bentang Lahan Kabupaten Pasangkayu.....	30
Gambar 3.5 Peta Geologi Kabupaten Pasangkayu	32
Gambar 3.6 Peta Hidrologi Kabupaten Pasangkayu.....	34
Gambar 3.7 Peta Distribusi Curah Hujan Tahunan Kabupaten Pasangkayu	36
Gambar 3.8 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pasangkayu.....	38
Gambar 3.9 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Pasangkayu.....	40
Gambar 3.10 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Pasangkayu.....	42
Gambar 3.11 Peta Rawan Bencana Banjir Bandang Kabupaten Pasangkayu.....	43
Gambar 3.12 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Pasangkayu	44
Gambar 3.13 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Pasangkayu.....	45
Gambar 3.14 Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Pasangkayu	46
Gambar 3.15 Peta Rawan Bencana Gelombang Tinggi Kabupaten Pasangkayu.....	47
Gambar 3.16 Peta Rawan Bencana Karhutla Kabupaten Pasangkayu.....	48
Gambar 3.17 Peta D3TLH Pangan Kabupaten Pasangkayu	58
Gambar 3.18 Peta D3TLH Air Kabupaten Pasangkayu	60
Gambar 3.19 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Pasangkayu	64
Gambar 3.20 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Kabupaten Pasangkayu.....	66
Gambar 3.21 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Pasangkayu.....	68
Gambar 3.22 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Pasangkayu	70
Gambar 3.23 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pecegahan & Perlindungan Terhadap Bencana Longsor Kabupaten Pasangkayu	72
Gambar 3.24 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pecegahan & Perlindungan Terhadap Bencana Banjir Kabupaten Pasangkayu.....	74
Gambar 3.25 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pecegahan & Perlindungan Terhadap Bencana Kebakaran Kabupaten Pasangkayu.....	76



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

Gambar 3.26 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air Kabupaten Pasangkayu	78
Gambar 3.27 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air, dan Pengolahan Limbah Kabupaten Pasangkayu	80
Gambar 3.28 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Habitat, dan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Pasangkayu	83
Gambar 4.1 Internalisasi TPB Global ke TPB Indonesia	86
Gambar 4.2 Pengelompokan Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Pasangkayu	87



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Tahapan perencanaan ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Upaya dalam peningkatan kesejahteraan tersebut dilakukan dengan melaksanakan pembangunan daerah melalui berbagai aspek, yakni aspek ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur dan lainnya. Pada pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan adanya penegasan kembali terhadap arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu pembangunan daerah harus selaras dengan pembangunan nasional dan antar wilayah. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Oleh karena itu, hal penting harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keberlangsungan lingkungan, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta keterkaitan antar wilayah.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu dua puluh tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Selain itu tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup



Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, seperti arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

KLHS menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD dengan mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Penyusunan KLHS RPJMD sedikit berbeda dengan penyusunan KLHS untuk dokumen kebijakan, rencana, dan/atau program lainnya. Dalam proses penyusunan KLHS RPJMD tidak menunggu rumusan kebijakan dan program (KRP), namun tahap penyusunannya diawali dengan analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Permendagri Nomor 7 tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS RPMD.

KLHS RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodasi isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola. Melalui kegiatan KLHS RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021–2026 ini diharapkan akan terwujud pembangunan di Kabupaten Pasangkayu sesuai yang diharapkan, dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta keberlangsungan lingkungan hidup. Kajian ini juga diharapkan dapat memperkuat substansi perencanaan daerah, sehingga lebih terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan pembangunan nasional.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Adapun maksud dari penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pasangkayu adalah menyelenggarakan analisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026. Tujuan penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pasangkayu adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026.
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- c. Sebagai acuan dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasangkayu.

Sedangkan sasaran penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pasangkayu adalah sebagai berikut:

- a. Pengkajian pembangunan berkelanjutan yang meliputi analisis kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), analisis kondisi lingkungan hidup dan analisis keuangan daerah untuk memberikan gambaran kondisi umum Kabupaten Magelang serta permasalahan dan isu



strategis yang digunakan sebagai dasar merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan.

- b. Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa gambaran skenario sebagai alternatif proyeksi kondisi pencapaian terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan sampai dengan periode 2026 sesuai periode RPJMD Kabupaten Pasangkayu, dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu Tahun 2030.

1.4. Keluaran

Keluaran dari kegiatan adalah sebuah dokumen KLHS yang akan memuat seperangkat kegiatan kunci perencanaan, yang dititikberatkan pada RPJMD Kabupaten Pasangkayu, seperti:

1. Pemantapan visi untuk masa depan yang diinginkan.
2. Identifikasi isu-isu strategis dan prioritas pembangunan berkelanjutan yang mempengaruhi dampak/risiko lingkungan hidup.
3. Kaji opsi-opsi untuk menciptakan masa depan yang diinginkan, dengan memasukkan segala peluang dan resiko kedalam penemukenalan seluruh opsi alternatif pembangunan.
4. Fokus analisis pada evaluasi yaitu pada implikasi lingkungan dari program pembangunan berkelanjutan.
5. Identifikasi dan kajian aksi-aksi untuk merealisasi strategi pembangunan terbaik.

1.5. Pendekatan dan Metodologi

Secara umum metodologi penyusunan KLHS RPJMD didasarkan pada Permendagri Nomor 7 tahun 2018. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa proses penyusunan KLHS RPJMD dilakukan melalui beberapa tahapan dan pendekatan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan untuk memperoleh hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan yang dilakukan, metodologi yang digunakan, dan hasil yang diharapkan masing-masing dijelaskan sebagai berikut.

1. Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD

Pembentukan tim pembuat KLHS tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Daerah yang dikoordinasikan dengan Sekretariat Daerah



bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, serta koordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup. Anggota dari Tim Penyusun KLHS RPJMD adalah para perangkat daerah terkait yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam penyusunan KLHS RPJMD. Dalam melaksanakan tugasnya, tim penyusun melibatkan partisipasi dari pihak luar seperti Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk melakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan, antara lain:

- a. Gambaran umum kondisi daerah, memuat paling sedikit tentang kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kondisi geografis dan demografis, serta kondisi keuangan daerah. Jika kondisi data tersedia maka dapat ditambahkan mengenai kondisi jasa ekosistem dan kondisi lingkungan hidup lainnya yang penting.
- b. Capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan, memuat tentang analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- c. Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha serta Akademisi, yang memuat tentang analisis kontribusi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha serta Akademisi dan pihak terkait lainnya. Perlu diidentifikasi kontribusi lembaga non pemerintah tersebut dalam capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

3. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui beberapa tahapan untuk memperoleh hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan dalam perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, antara lain:

- a. Kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk dapat mengetahui kondisi pencapaian TPB tersebut dibutuhkan data-data yang



dapat diperoleh dari data *time series* maupun tren perkembangan, dengan tetap memperhatikan ke-validan sumber data.

- b. Proyeksi kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), data kondisi eksisting pencapaian TPB yang telah diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan proyeksi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat melihat bagaimana kondisi dimasa yang akan datang. Proyeksi pencapaian TPB dilakukan sampai dengan akhir periode RPJMD. Hasil dari perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan dan dengan upaya tambahan.
 - c. Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan, merupakan upaya yang dirumuskan berdasarkan data tren yang sudah tersedia sebelumnya sehingga dapat dilihat bidang tertentu yang perlu diperhatikan. Selain itu perumusan alternatif dapat dilihat dari TPB yang telah dicapai.
 - d. Alternatif dengan upaya tambahan, merupakan upaya yang dirumuskan berdasarkan data TPB yang belum dicapai serta berdasarkan target kebutuhan yang harus dipenuhi. Sehingga perlu dirumuskan langkah yang tepat untuk dapat memenuhi TPB yang belum tercapai dan target kebutuhan.
4. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian dan Validasi KLHS RPJMD

Hasil dari perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa laporan KLHS RPJMD, selanjutnya perlu diuji kualitas dan validasinya. Tahapan ini dilakukan sepenuhnya oleh Kepala Daerah secara mandiri. Penjaminan kualitas dilihat dari dua aspek, yaitu:

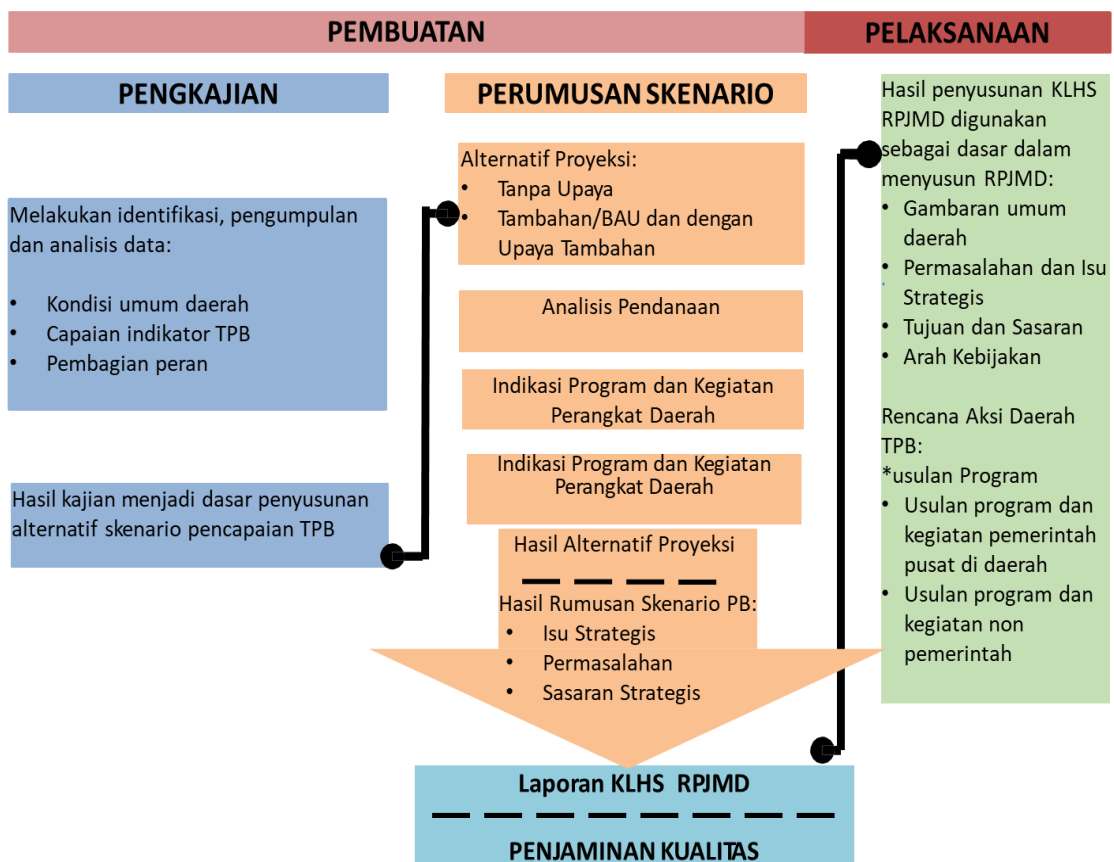
- a. Pembuktian, terdiri dari:
 - SK Pembentukan Tim Pembuat KLHS;
 - Jadwal Kegiatan Pembuatan KLHS RPJMD;
 - Berita Acara Kegiatan yang sudah dilaksanakan;
 - Laporan KLHS RPJMD.
- b. Penjaminan Kualitas, aspek ini dapat digunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, terdiri dari:
 - Isu Strategis;



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

- Permasalahan;
- Sasaran Strategis.

Hasil penjaminan kualitas ditandatangani oleh Kepala Daerah. Laporan KLHS RPJMD merupakan informasi publik sehingga dibuka seluas-luasnya agar masyarakat dapat mengetahuinya. Terkait dengan hal tersebut maka mulai dari proses dan hasil dari setiap tahapan KLHS serta pada saat dokumen KLHS sudah selesai dan mendapatkan validasi diharapkan dapat diakses masyarakat dengan mudah. Selain itu, terbuka jika ada masyarakat yang akan menyampaikan masukan/saran terkait KLHS RPJMD melalui media yang tersedia. Gambar berikut merupakan ringkasan tahapan dalam penyusunan KLHS RPJMD. Berdasarkan gambar berikut menunjukkan bahwa KLHS Penyusunan RPJMD dapat tercapai dengan baik apabila proses persiapan, partisipasi, pelaksanaan konsultasi dan peran pihak luar diselenggarakan dengan memperhatikan semua kaidah-kaidah partisipasi yang berlaku.



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan KLHS RPJMD



1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Pasangkayu mencakup 7 (tujuh) bab, yaitu:

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang; Dasar Hukum; Maksud, Tujuan dan Sasaran; Ruang Lingkup; Pendekatan dan Metodologi; Tahap Penyelenggaraan KLHS; dan Sistematika Pembahasan.

Bab 2 : Dasar Teori

Bab ini memuat teori-teori yang berhubungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bab 3 : Gambaran Umum Wilayah Bab ini memuat Kondisi Fisik Wilayah, Kondisi Sosial Kependudukan, Kondisi Sosial Masyarakat dan Kondisi Ekonomi Wilayah.

Bab 4 : Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Bab ini memuat penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB di masa depan dan capaian indikator TPB setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan dengan mengelompokkan indikator TPB berdasarkan katagori analisis data yang terbagi atas 4 (empat) kategori yaitu Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS); Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB); Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB); dan Indikator TPB yang belum memiliki data (NA). Pengelompokkan indikator ini didasarkan pada tingkat capaian Indikator terhadap target yang telah ditentukan. Pengelompokkan indikator ini dilakukan untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang dipilih menjadi isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bab 5 : Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Bab ini memuat analisis Indikator TPB yang menjadi indikator strategis berdasarkan hasil capaian indikator TPB. Capaian indikator TPB merupakan salah satu tolak ukur yang dilakukan untuk melihat sejauh mana kinerja suatu daerah.



Bab 6 : Alternatif Skenario dan Rekomendasi

Bab ini memuat hasil pengkajian indikator TPB di Kabupaten Pasangkayu terdapat indikator yang sudah mencapai indikator nasional (Kelompok SS), dimana indikator tersebut tidak menjadi fokus perhatian didalam kajian lingkungan hidup strategis ini. Untuk indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (Kelompok BB) diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu melakukan evaluasi pelaksanaan TPB setiap tahunnya.

Bab 7 : Kesimpulan

Bab ini memuat menguraikan kesimpulan penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten/Kota dengan mengidentifikasi hasil analisis sebagaimana pada bab-bab sebelumnya.



BAB 2. DASAR TEORI

2.1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), maka setiap Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota “WAJIB” menyusun dokumen-dokumen lingkungan hidup. Pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut dijelaskan bahwa tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum. Pada tahap PERENCANAAN, setiap daerah harus melakukan kegiatan Inventarisasi Lingkungan (Profil Lingkungan Hidup), penyusunan Ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Selanjutnya pada tahap PENGENDALIAN lingkungan hidup, dinyatakan bahwa untuk dapat mengendalikan lingkungan hidup dengan baik, maka setiap daerah harus menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS (*strategic environmental analysis/SEA*) merupakan suatu rangkaian analisis secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (UUPPLH Nomor 32 tahun 2009, BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Point 10). KLHS menjadi suatu hal yang sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Beberapa pertimbangan yang mendasari pentingnya KLHS dibutuhkan dalam pembangunan berkelanjutan antara lain krisis dan bencana lingkungan hidup yang tiada henti, dan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) pada setiap rencana pembangunan.

KLHS pada suatu wilayah memiliki pengaruh yang berbeda, sesuai dengan tipe rencana pembangunan yang menjadi objek KLHS. Terdapat perbedaan substansi pengaruh KLHS pada beberapa tipe Kebijakan, Rencana dan/atau



Program (KRP), khususnya terkait dengan tujuan KLHS dalam rencana pembangunan. Pada tipe rencana berskala luas akan memberikan pengaruh KLHS yang bersifat strategis. Adapun pandangan pengaruh KLHS pada berbagai tipe rencana dapat dilihat pada tahapan-tahapan pengkajiannya yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 2.1 Pengaruh KLHS pada Berbagai Tipe Rencana Pembangunan

Tahapan	Kajian Dampak	Kajian Strategis
Identifikasi dan Perumusan Isu	Ditujukan untuk menemukan akar masalah dan tipologi isu-isu yang diangkat	Ditujukan untuk menemukan akar masalah dan tipologi isu-isu yang diangkat
Identifikasi muatan KRP yang berpotensi mempengaruhi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan	Difokuskan pada rincian/penjabaran muatan KRP (biasanya muatan KRP sudah detail)	Difokuskan pada konteks KRP (biasanya muatan KRP masih ditatanan ide atau konsep)
Analisis Pengaruh	Menganalisis bagaimana KRP menimbulkan dampak/risiko LH dan pengaruhnya terhadap daya dukung daya tampung LH	Menganalisis skenario KRP mana yang paling berkelanjutan dan tidak menyebabkan daya dukung dan daya tampung LH terlampaui
Perumusan Alternatif	Menguji masing-masing alternatif dalam kapasitasnya sebagai solusi mitigasi dampak yang paling tepat	Menguji masing-masing alternatif dalam memenuhi pertimbangan-pertimbangan kritis/penting yang mempengaruhi pengambil keputusan
Rekomendasi Perbaikan	Mengusulkan rincian perbaikan muatan KRP yang dapat memitigasi dampak	Mengusulkan muatan KRP yang terbaik bagi pengambil keputusan

Sebagaimana ditetapkan dalam UUPPLH Nomor 32 tahun 2009 (Pasal 15, ayat 3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;



3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penjelasan ketiga mekanisme utama di atas dalam praktiknya perlu didukung dengan beberapa kegiatan atau langkah. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merancang proses KLHS, agar proses dan hasil KLHS dapat benar-benar efektif dan efisien sesuai dengan tujuan KLHS. Dalam merancang proses KLHS ini, beberapa hal yang perlu disiapkan adalah pentingnya memahami konteks penyusunan dan evaluasi KRP, sehingga proses KLHS nya nanti dapat diintegrasikan dalam proses KRP dengan baik.

Salah satu hal penting dalam penyusunan dan evaluasi KRP adalah mengetahui jenis KRP-nya sendiri. Penyelenggaraan KLHS pun dituntut partisipatif, maka proses KLHS harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat. Konteks ini, perlu diidentifikasi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk setiap proses penyusunan dan evaluasi KRP, dan berdasar identifikasi ini, kemudian dapat ditentukan siapa saja pemangku kepentingan dan masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses KLHS.

Setelah pemangku kepentingan dan masyarakat ditentukan, kemudian mereka dapat dilibatkan dalam proses tahapan selanjutnya yakni identifikasi dan penentuan isu-isu pembangunan berkelanjutan di wilayah dimana KRP tersebut akan disusun. Proses ini perlu didukung dengan database yang baik, agar proses penentuan isu-isu pembangunan berkelanjutan ini dapat secara rasional dilakukan. Detail tahapan dari kajian lingkungan hidup strategis di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Rencana pembangunan Daerah Pemerintah daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Hal ini tentu berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB mengarahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan salah satunya Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi, sehingga dihasilkan rencana aksi TPB yang terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu. Penerapan KLHS dalam pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan manfaat pembangunan, rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya, mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan dan dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan. Dalam konteks penyusunan rencana tata ruang hampir semua kegiatan kehidupan dan pembangunan perlu atau berkaitan dengan tempat/lokasi/ruang. Oleh karena itu, penetapan arah kebijakan dan tujuan serta penyusunan strategi pencapaian penyusunannya sangat ditentukan oleh keberadaan KLHS.

2.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

2.2.1. Tinjauan Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai



tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals atau SDGs.

SDGs merupakan kelanjutan Millennium Development Goals (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. MDGs yang disepakati lebih dari 15 tahun lalu hanya berisi 8 Tujuan, 21 Sasaran, dan 60 Indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran.

MDGs memberikan tanggung jawab yang besar pada target capaian pembangunan bagi negara berkembang dan kurang berkembang, tanpa memberikan peran yang seimbang terhadap negara maju. Secara proses MDGs juga memiliki kelemahan karena penyusunan hingga implementasinya eksklusif dan sangat birokratis tanpa melibatkan peran stakeholder nonpemerintah, seperti Civil Society Organization, Universitas/Akademisi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya. Berbeda dengan pendahulunya, SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs) maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarnya.

SDGs juga bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara baik negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs. Proses perumusan SDGs juga mengedepankan proses yang partisipatif. Terbukti sejak tahun 2013 Sekretaris Jenderal PBB memberikan ruang yang lebih luas kepada stakeholder nonpemerintah untuk terlibat dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015. Yakni melalui diadakannya forum konsultasi antar-stakeholder dan my world survey, yang merupakan survey yang dilaksanakan oleh PBB sebagai bahan masukan untuk penyusunan SDGs. My world survey adalah global survey bertujuan untuk menangkap pandangan dan aspirasi warga untuk menentukan agenda baru yang baik untuk dunia yang lebih baik. Hasil survey ini yang



kemudian dijadikan salah satu pertimbangan untuk menentukan ke-17 tujuan yang ada di SDGs. SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu:

1. People (manusia),
2. Planet (bumi),
3. Prosperity (kemakmuran),
4. Peace (perdamaian),
5. Partnership (kerjasama).

Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan dan 169 sasaran. Kepala negara dan pemerintahan yang menyepakati SDGs telah meneguhkan komitmen bersama untuk menghapuskan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan mengurangi ketimpangan. Agenda pembangunan ini juga menjanjikan semangat bahwa tidak ada seorangpun yang akan ditinggalkan. Dijelaskan bahwa setiap orang dari semua golongan akan ikut melaksanakan dan merasakan manfaat SDGs, dengan memprioritaskan kelompok – kelompok yang paling termarginalkan.

2.2.2. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) atau Agenda 2030, bertepatan dengan berlangsungnya United Nation General Assembly (UNGA) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa - New York (Amerika Serikat. TPB/ SDGs yang cakupan dan substansinya selaras dengan Nawacita, terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

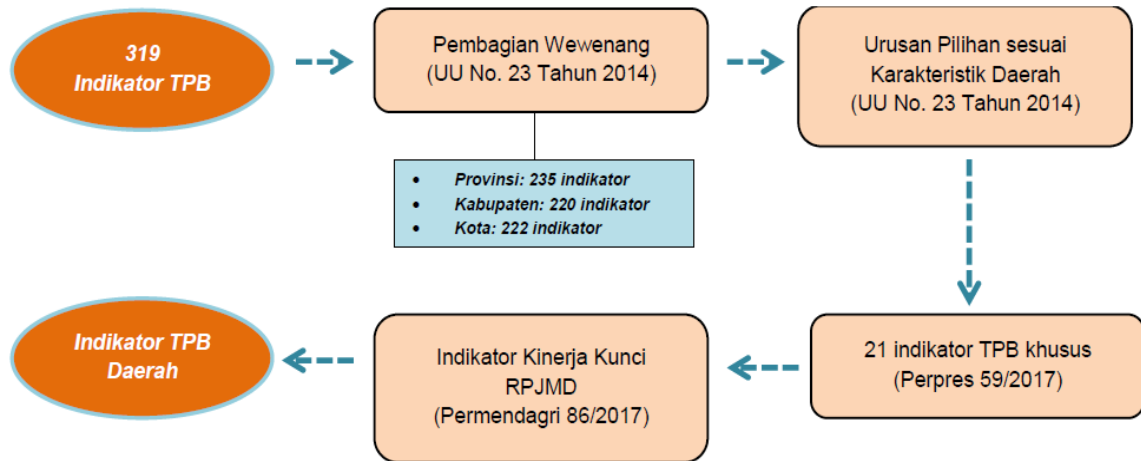
Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Divisi Statistik UN-DESA telah mengeluarkan metadata 241 indikator (versi Maret 2016) untuk mengukur pencapaian target TPB/ SDGs. Berdasarkan Metadata Indikator SDGs Global tersebut, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia yang meliputi 17 Tujuan, 169 Target dan 319 Indikator. Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 3 (tiga) kategori, meliputi “kategori pertama” dengan tanda (*) adalah indikator yang sesuai dengan indikator global; “kategori kedua” adalah indikator dengan keterangan huruf (a, b, ...) di belakang nomor merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global; dan “kategori ketiga” adalah indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan. Dokumen Metadata Indikator TPB / SDGs Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu dokumen Metadata Indikator SDGs Indonesia untuk:

- Pilar Pembangunan Sosial yang mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5;
- Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17;
- Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15; dan
- Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan 16.

Dari total 319 indikator TPB nasional, jumlah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing dapat berbeda satu dengan lainnya. Dalam KLHS RPJMD, tidak seluruh daerah memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pelaksanaan indikator TPB. Adanya batasan kewenangan, keunikan geografis serta demografis daerah menimbulkan kekhususan beberapa indikator untuk dilaksanakan di beberapa daerah. Perlunya pemetaan oleh daerah terhadap



relevansi indikator TPB bagi daerahnya, agar program dan kegiatan yang dirumuskan di dalam RPJMD tidak bertentangan dengan kondisi wilayahnya masing-masing.



Gambar 2.2 Tahapan Penentuan Indikator TPB Daerah

Secara lebih rinci berikut adalah tahapan yang harus dilaksanakan untuk memetakan jumlah indikator yang relevan dengan masing-masing daerah:

1. Tahap 1: Memilih berdasarkan kewenangan pemerintah daerah yang diatur di dalam UU 23 Tahun 2014: Pelaksanaan indikator TPB akan sangat erat kaitannya dengan kewenangan masing-masing daerah. Adanya pembagian kewenangan yang telah diatur di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 menjadikan adanya pembatasan bagi tiap hirarki pemerintahan baik pusat hingga pemerintah kabupaten/kota. Jika hanya mengacu pada UU. 23 Tahun 2014, pembagian masing-masing indikator adalah 235 indikator menjadi kewenangan provinsi; 220 indikator menjadi kewenangan kabupaten; 222 indikator menjadi kewenangan pemerintah kota.
2. Tahap 2: Menentukan indikator yang kontekstual dengan kondisi daerah: Setelah menyaring jumlah keseluruhan indikator TPB berdasarkan kewenangan masing-masing, tahapan selanjutnya adalah menyaring kembali hasil indikator tersebut berdasarkan kondisi daerahnya. Beberapa indikator dapat memiliki batasan pelaksanaan berdasarkan karakteristik daerahnya. Salah satu contohnya adalah tujuan yang berkaitan dengan ekosistem laut. Daerah yang tidak memiliki laut tidak harus melaksanakan indikator tersebut. Selain itu juga ada beberapa kondisi wilayah yang dapat disesuaikan dengan



urusan pilihan yang terdapat di dalam UU. No. 23 tahun 2014. Berdasarkan undangundang tersebut, urusan yang termasuk ke dalam urusan pilihan diantaranya adalah industri, kehutanan, transmigrasi, dan urusan lainnya yang tidak relevan dengan kondisi daerahnya.

3. Tahap 3: Menyesuaikan dengan 21 indikator khusus: Pada tahapan ke tiga, jumlah indikator yang akan diadaptasi ke dalam KLHS RPJMD kembali dipilih berdasarkan kriteria khusus. Indikator dengan kriteria khusus merupakan indikator-indikator yang hanya berlaku untuk beberapa daerah tertentu. Dasar adanya penentuan tersebut adalah Perpres. 59 Tahun 2017. Total terdapat 21 indikator khusus, dengan beberapa daerah tertentu yang memiliki kekhususan untuk melaksanakannya.
4. Tahap 4: Menyesuaikan dengan indikator kinerja kunci RPJMD: Setelah seluruh indikator yang tidak memiliki relevansi dengan daerah dieliminasi hingga tahapan indikator khusus, selanjutnya kembali dipilih berdasarkan indikator kinerja kunci RPJMD. Hasil penyesuaian indikator TPB dengan indikator kinerja kunci RPJMD adalah hasil akhir untuk indikator TPB yang menjadi kewenangan daerah.

2.2.3. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia

SDGs merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi serta dapat bersinergi dengan lingkungan. Pada penyusunannya, disadari penuh bahwa inisiatif global ini tidak dapat menampikkan adanya implementasi di tingkat regional dan nasional. SDGs di tingkat regional dan nasional pun perlu meneguhkan kembali semangat dan nilai SDGs yang inklusif dan partisipatif sebagaimana yang telah dibangun dalam SDGs tingkat global. Peran negara sangat krusial dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs mendasarkan pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap mengedepankan pada karakteristik dan prioritas tiap-tiap negara.

Belajar dari pengalaman MDGs sebelumnya, Indonesia kini berusaha menghindari keterlambatan pengimplementasian SDGs. Sebelumnya pelaksanaan MDGs di Inonesia mengalami keterlambatan sepuluh tahun dari



pengesahannya di tahun 2000. Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan karena Indonesia masih dalam pemulihan situasi ekonomi pasca krisis 1998. Kali ini pemerintah telah menunjukkan keseriusan pelaksanaan SDGs yang tepat waktu, diawali dengan hadirnya Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Sidang Umum PBB untuk penandatanganan SDGs pada September 2015 lalu. Pun demikian, untuk mencapai 17 Tujuan dan 169 Sasaran SDGs pada tahun 2030 masih banyak hal lagi yang perlu dilakukan. Seperti misalnya mengarusutamakan SDGs dalam agenda pembangunan nasional; membuat pelaksanaan SDGs yang inklusif dan partisipatif baik di tingkat pusat maupun daerah; memastikan SDGs dilakukan dengan semangat transformatif.

Stakeholder lain juga terlihat sangat aktif berpartisipasi dan mendorong pemerintah untuk membuka ruang-ruang yang telah disediakan dalam proses SDGs global. Kelompok masyarakat sipil misalnya, yang telah bertemu dengan beberapa stakeholder kunci pemerintah untuk mendorong isu SDGs menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Hal yang sama mulai dilakukan oleh stakeholder lainnya seperti sektor swasta dan bisnis serta kalangan akademisi. Di Indonesia SDGs dipopulerkan dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disingkat dengan TPB. Pada bulan Desember 2015, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs telah bertemu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, dalam kaitannya dengan implementasi SDGs di Indonesia, CSO menuntut tiga hal kepada Presiden yaitu:

1. Menuntut pemerintah menyusun payung hukum untuk pelaksanaan SDGs,
2. Menuntut pemerintah untuk menyusun Rencana Aksi Nasional bagi pelaksanaan SDGs,
3. Menuntut pemerintah untuk membentuk panitia bersama bagi pelaksanaan SDGs.

Lima belas tahun lalu, pada masa MDGs, kerangka hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan di Indonesia adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010. Inspres ini memberikan haluan besar tentang pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan untuk kesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional yang ditujukan kepada beberapa kepala kepala instansi dan lembaga pemerintah serta kepala daerah. Instruksi presiden yang



bersifat himbauan individual dinilai kurang cukup kuat mengikat terhadap perencanaan di tingkat kementerian dan lembaga pemerintahan terkait untuk kewajiban melaksanakan MDGs serta kepala daerah tingkat II untuk mensukseskan pencapaian MDGs. Sidang kabinet yang digelar pada akhir tahun 2015 lalu menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya Presiden mengintruksikan menteri untuk segera menyiapkan draft dokumen kerangka hukum bagi pelaksanaan SDGs dalam bentuk Peraturan Presiden. Amanat ini diembankan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Staf Presiden. Proses penyusunan kerangka hukum untuk SDGs ini telah dimulai sejak awal tahun 2016 dengan membuka partisipasi masyarakat melalui diskusi dan konsultasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bersamaan dalam proses ini Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs pun telah memberikan usulan Perpres dibawah koordinasi Kantor Staf Presiden.

Perpres SDGs yang tengah disusun nantinya akan memuat dan menghasilkan beberapa keputusan diantaranya

1. Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional tahun 2016 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, yang akan berlaku maksimal 12 bulan sejak penetapan Perpres,
2. Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Nasional, yang merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, yang akan berlaku paling lama 6 bulan sejak penetapan Perpres,
3. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran



pembangunan daerah, yang akan berlaku paling lama 12 bulan sejak penetapan Perpres.

Di luar muatan tentang strategi dan kerja yang akan dilaksanakan pemerintah dalam pencapaian SDGs, Peraturan Presiden ini selain mengatur peran setiap Kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaan SDGs juga mengatur peran tiap-tiap stakeholder non- pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan SDGs, seperti kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha. Berkaitan dengan hal ini, presiden sekaligus mengatur pembentukan untuk pelaksanaan SDGs yang disebut Tim Koordinasi Nasional, yang akan terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok-kelompok Kerja dan Dewan Pakar. Harapannya, stakeholder kunci yang terlibat dapat terwakili dalam tiap komponen Tim Koordinasi Nasional. Penyusunan indikator nasional untuk SDGs dilakukan dalam koordinasi terpusat oleh Bappenas bersama Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data nasional. Hingga saat ini, proses penyusunan indikator nasional SDGs masih terus berjalan sehingga dapat diupayakan menjadi dokumen pendukung dalam Peraturan Presiden untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Nasional. Penyusunan indikator nasional dilakukan dalam proses diskusi dan konsultasi publik dengan berbagai pihak, diantaranya Kementerian/Lembaga terkait, kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi, serta pelaku bisnis dan usaha.



BAB 3. KONDISI UMUM DAERAH

3.1. Kondisi Wilayah

3.1.1. Batas administrasi

Kabupaten Pasangkayu salah satu daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang dahulu dikenal dengan Kabupaten Mamuju Utara. Kabupaten Pasangkayu termasuk salah satu kabupaten termuda di Indonesia. Kabupaten Mamuju Utara adalah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2003 dengan ibukota Pasangkayu. Tahun 2017, Kabupaten Mamuju Utara berubah nama menjadi Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017. Kabupaten Pasangkayu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang terdiri dari kecamatan pasangkayu, Sarudu, Baras dan Bambalamotu. Saat ini, Kabupaten Pasangkayu memiliki jumlah kecamatan sebanyak 12 Kecamatan. Terjadi pemekaran Kecamatan dengan memekarkan kecamatan induk masing-masing menjadi dua kecamatan. Kabupaten Pasangkayu terletak disebelah utara Provinsi Sulawesi Barat. Adapun batas administrasi Kabupaten Pasangkayu sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur: Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan: Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat
- Sebelah Barat: Selat Makassar

Luas Wilayah Kabupaten Pasangkayu 3.043,75 km². Kota Pasangkayu berjarak sekitar 276 km ke arah selatan menuju ibukota provinsi Sulawesi Barat yaitu Mamuju. Kabupaten Pasangkayu secara administrasi pemerintahan terdiri atas 12 kecamatan, 59 desa, 4 kelurahan, 347 dusun, dan 25 lingkungan. Adapun letak Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Gambar 3.1, dan rincian administrasi Kecamatan, dan Desa disajikan pada Tabel 3.1.



Tabel 3.1 Luas, Presentase, dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasangkayu

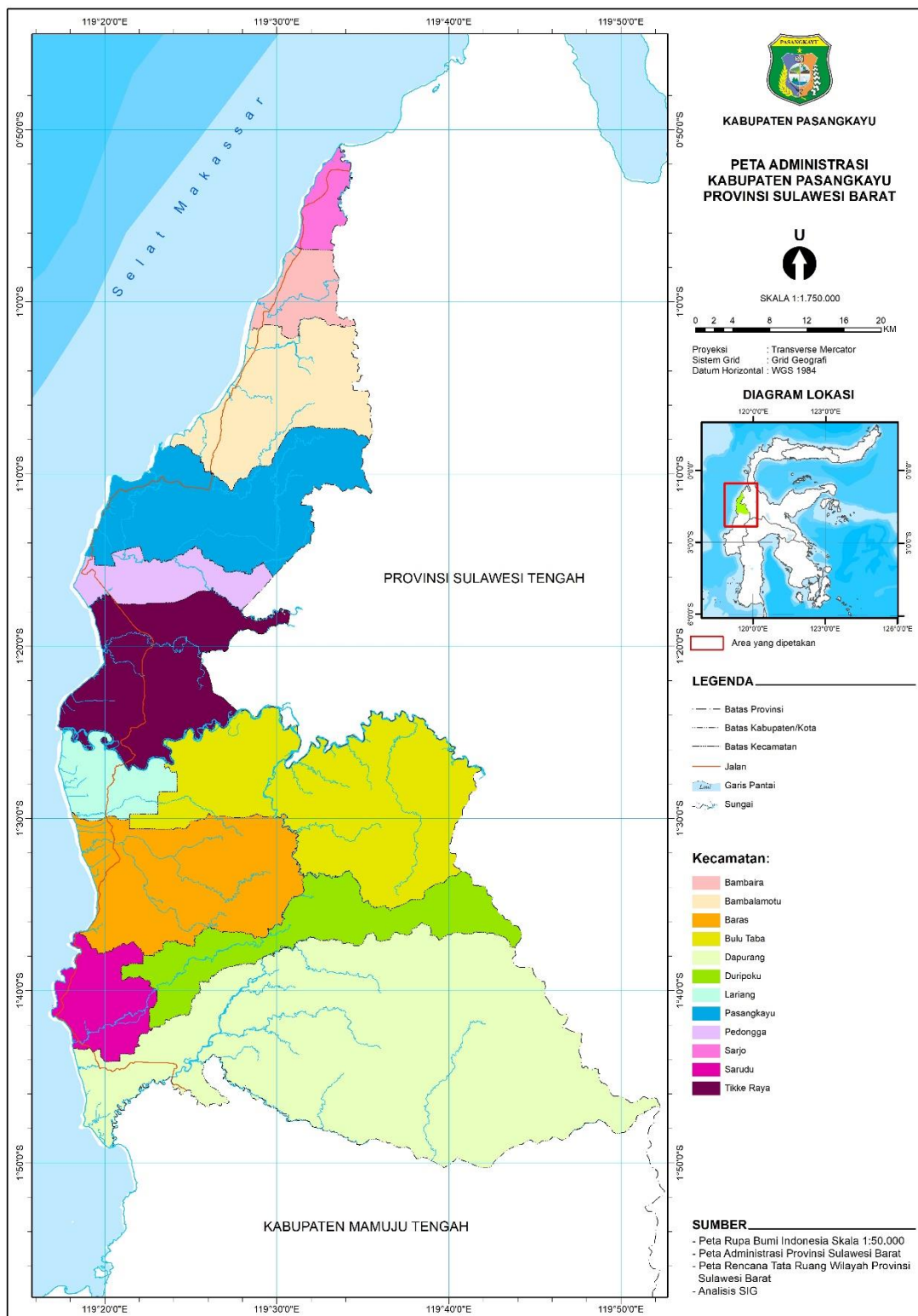
No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1	Sarudu	99,06	3,25	80,00
2	Dapurang	921,95	30,29	85,00
3	Duripoku	215,45	7,08	102,00
4	Baras	277,87	9,13	57,00
5	Bulu Taba	427,62	14,08	65,00
6	Lariang	83,34	2,74	53,00
7	Pasangkayu	312,04	10,25	1,00
8	Pedongga	266,59	8,76	31,00
9	Tikke Raya	94,00	3,09	17,00
10	Bambalamotu	242,96	7,98	28,00
11	Bambaira	64,84	2,13	35,00
12	Sarjo	37,03	1,22	37,00
Pasangkayu		3.043,75	100,00	-

Sumber: BPS, Pasangkayu Dalam Angka 2020.

Berdasarkan Tabel 3.1, menunjukkan luas masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Dapurang seluas 921,95 km² dengan presentase 30,29 persen dari total luasan Kabupaten Pasangkayu. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Sarjo. Kecamatan Sarjo memiliki luas 37,0 km² atau hanya sekitar 1,22 persen dari total luas Kabupaten Pasangkayu. Adapun Kecamatan Pasangkayu selaku ibukota kabupaten Memiliki luas 312,04 km² atau sekitar 10 persen dari total luas kabupaten. Hampir semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasangkayu memiliki wilayah pesisir dan pantai atau berbatasan langsung dengan Selat Makassar kecuali dua kecamatan yaitu Kecamatan Bulu Laba, dan Duri Poku. Kecamatan Sarjo merupakan Kecamatan yang memiliki letak paling sebelah Utara, sedangkan Kecamatan Dapurang berada paling selatan di Kabupaten Pasangkayu.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Pasangkayu



3.1.2. Topografi

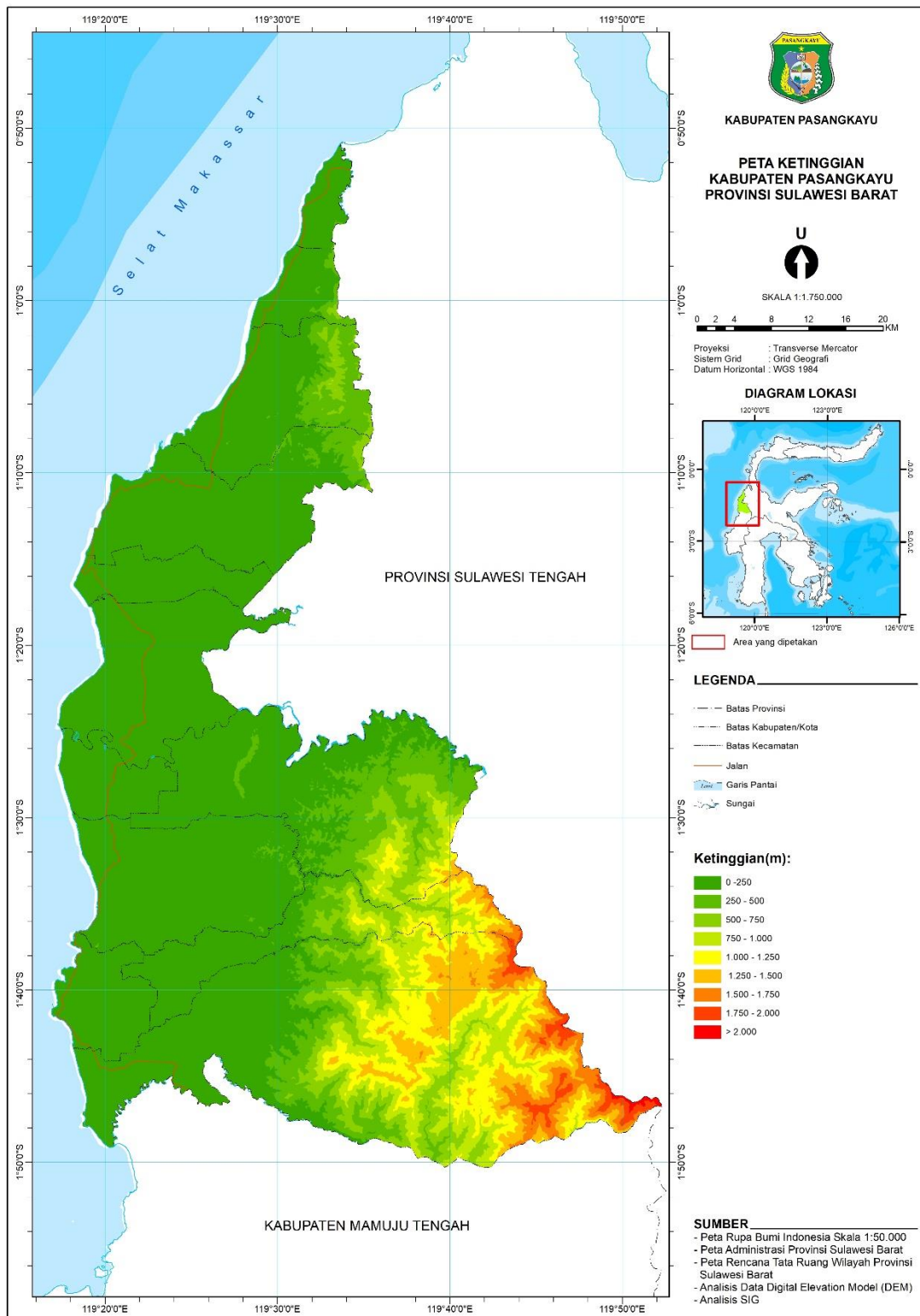
Topografi adalah suatu pendeskripsian tentang kondisi permukaan bumi pada suatu objek wilayah tertentu. Topografi terdiri dari beberapa unsur sebagai informasi untuk mendeskripsikan secara jelas suatu wilayah. Topografi pun merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam penentuan pola penggunaan lahan paling ideal. Bahwa topografi salah satu faktor pembatas dengan semakin tinggi topografi suatu daerah, maka semakin berkurang atau terbatas fungsi dan pemanfaatan dari daerah ataupun masyarakat yang ada daerah tersebut. Adapun unsur topografi berupa ketinggian, dan kemiringan lereng disajikan pada Gambar 3.2. dan gambar 3.3.

Kabupaten Pasangkayu memiliki garis pantai yang cukup panjang. Hal tersebut memberikan informasi sebagian besar wilayah Kabupaten Pasangkayu berada pada wilayah pesisir. Secara unsur ketinggian, semua kecamatan yang ada Kabupaten Pasangkayu berada pada ketinggian 0-250 meter diatas permukaan laut (mdpl). Adapun ketinggian diatas 1.000 mdpl berada di sebelah tenggara dari Kabupaten Pasangkayu. Kondisi tersebut meliputi beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Bulu Laba, Duri Poku, dan Dapurang. Ketinggian 1.000 telah termasuk dalam dataran tinggi yang akan mempengaruhi beberapa kondisi biofisik suatu wilayah termasuk keterbatasan dalam pemanfaatan suatu lahan.

Kondisi unsur kemiringan lereng sebagian besar akan searah dengan kondisi ketinggian. Kemiringan lereng suatu wilayah juga akan mempengaruhi kondisi biofisik wilayah tersebut. Tiga Kecamatan disebelah tenggara Kabupaten Pasangkayu tersebut memiliki kelas kemiringan lereng yang beragam mulai dari datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam. Terdapat juga beberapa kecamatan yang sebagian besar wilayah tergolong datar yaitu Kecamatan Sarjo, Pedongga, Tikke Raya, Sarudu, Baras, dan Iariang. Kelas kemiringan lereng curam dan sangat curam sangat memiliki keterbatasan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, dan wilayah yang akan dibangun oleh pemerintah setempat.



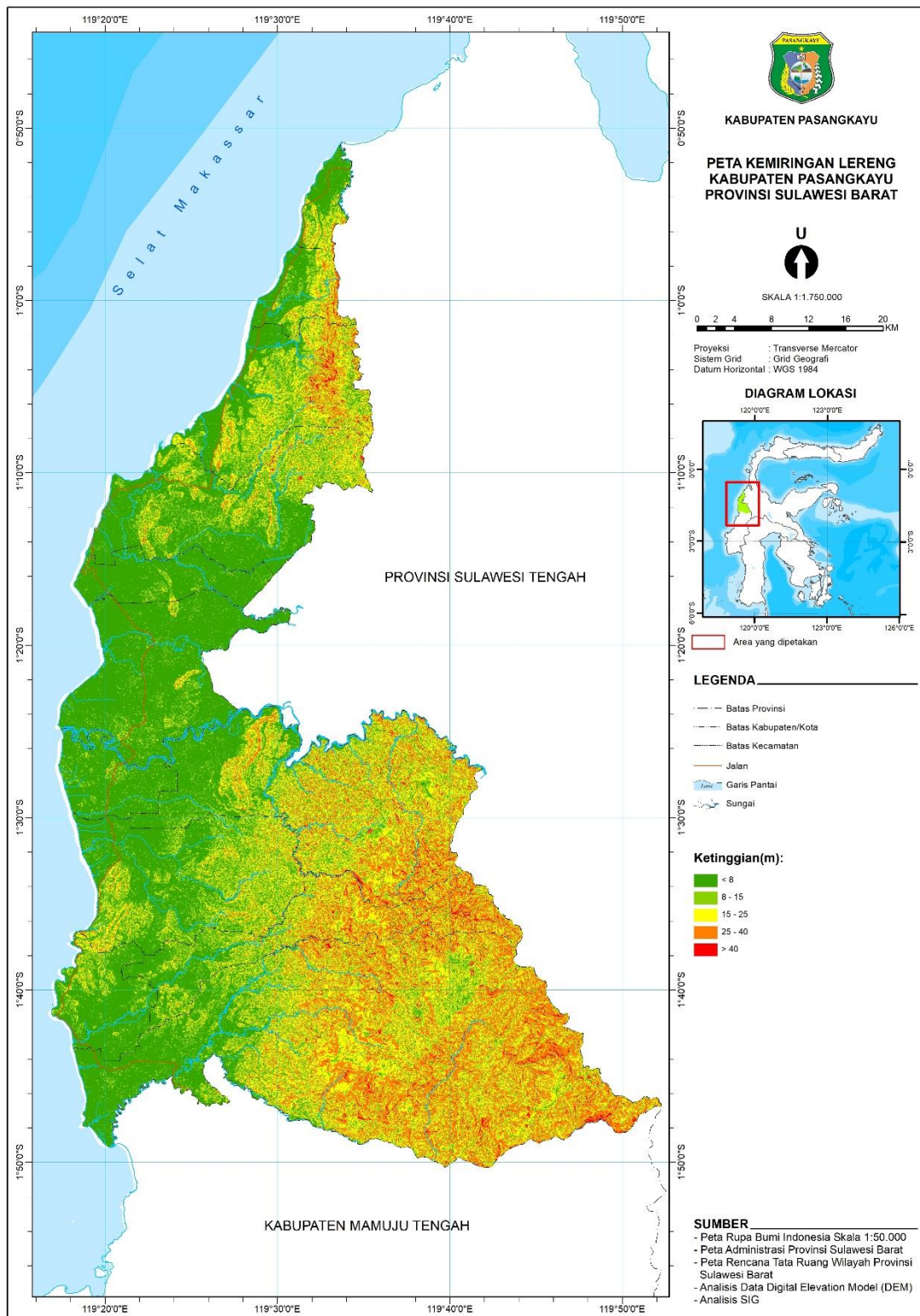
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.2 Peta Topografi Kabupaten Pasangkayu



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pasangkayu



3.1.3. Bentang Lahan (Ekoregion)

Bentang lahan lebih sering disebut dengan sebutan lanskap yang memrikan suatu informasi mengenai unit-unit bentuk lahan dengan berbagai keseragaman maupun perbedaan unsur-unsurnya. Klasifikasi bentang lahan mempunyai karakteristik dalam hal bentuk lahan, tanah, vegetasi, dan pengaruh manusia ditunjukkan melalui suatu kondisi. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Adapun gambaran bentang lahan Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.2, dan Gambar 3.4.

Tabel 3.2 Kondisi Bentang Lahan di Kabupaten Pasangkayu

No.	Bentang Lahan	Luas (ha)	Presentase (%)
1	Dataran Aluvial	69.913,46	23,92
2	Dataran Batuan Gunungapi Talaya	90,02	0,03
3	Dataran Batuan Terobosan	389,20	0,13
4	Dataran Formasi Lariang	16.560,10	5,67
5	Dataran Formasi Latimojong	6.042,04	2,07
6	Dataran Formasi Pasangkayu	34.426,29	11,78
7	Perbukitan Aluvial	6.799,00	2,33
8	Perbukitan Batuan Gunungapi Talaya	1.366,67	0,47
9	Perbukitan Batuan Terobosan	3.724,82	1,27
10	Perbukitan Formasi Lariang	52.982,86	18,13
11	Perbukitan Formasi Latimojong	71.445,37	24,44
12	Perbukitan Formasi Pasangkayu	28.532,83	9,76
Total		292.272,66	100,00

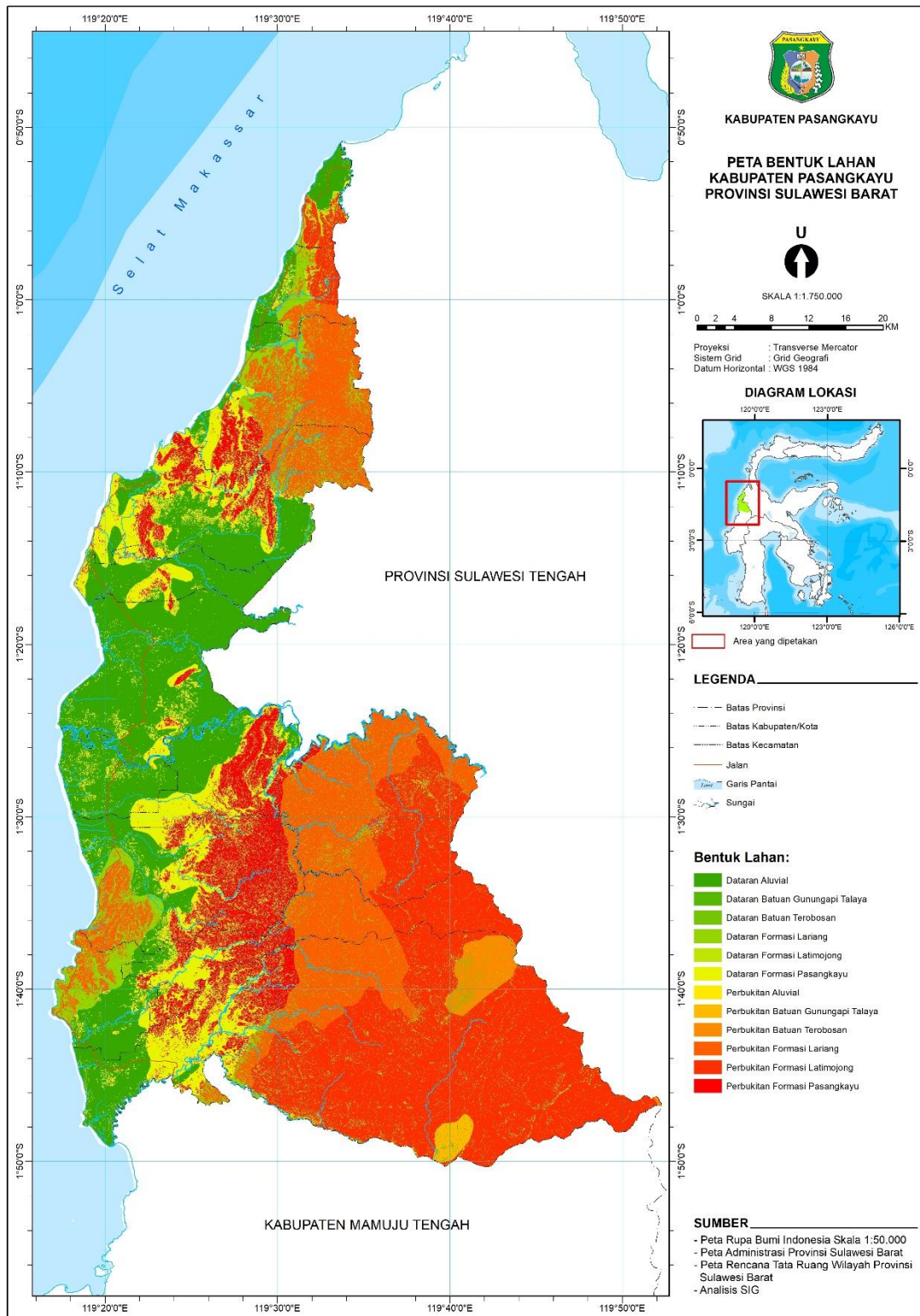
Sumber: RTRW Kabupaten Pasangkayu, 2020

Berdasarkan Tabel 3.2, menunjukkan bentang lahan berupa kondisi atas suatu hamparan lahan daratan yang terdiri atas berbagai keadaan alam baik alami di Kabupaten Pasangkayu. Bentang lahan berupa perbukitan mendominasi di Kabupaten Pasangkayu yaitu sebesar 56,4 persen dari luas total Kabupaten. Bentang lahan perbukitan yang paling mendominasi adalah formasi latimojong, dan formasi lariang. Selain itu terdapat juga bentang lahan dataran yang mendominasi yaitu yang paling luas adalah dataran Aluvial. Terdapat juga



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

daratan Pasangkayu di Sekitar Kecamatan Pasangkayu kearah utara bagian Kecamatan Sarjo.



Gambar 3.4 Peta Bentang Lahan Kabupaten Pasangkayu



3.1.4. Geologi

Geologi dari sudut pandang sains membahas tentang komposisi, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukan batuan sebagai bahan yang menyusun bumi. Geologi pada kajian yang lebih eksplisit menentukan transformasi bentuk, susunan, atau struktur internal batuan kedalam bentuk, susunan, atau susunan batuan intenal yang lain. Informasi geologi sangat penting karena membantu menemukan dan menentukan manajemen sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Sampai dimana geologi pun memberikan informasi terhadap ancaman bencana alam. Adapun kondisi geologi di Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.3, dan Gambar 3.5.

Tabel 3.3 Informasi Geologi di Kabupaten Pasangkayu

No	Geologi	Luas (ha)	Presentase (%)
1	Aluvial	76.712,46	26,25
2	Batuan Gunungapi Talaya	1.456,69	0,50
3	Batuan Terobosan	4.114,02	1,41
4	Formasi Lariang	69.542,95	23,79
5	Formasi Latimojong	77.487,42	26,51
6	Formasi Pasangkayu	62.959,11	21,54
Total		292.272,66	100,00

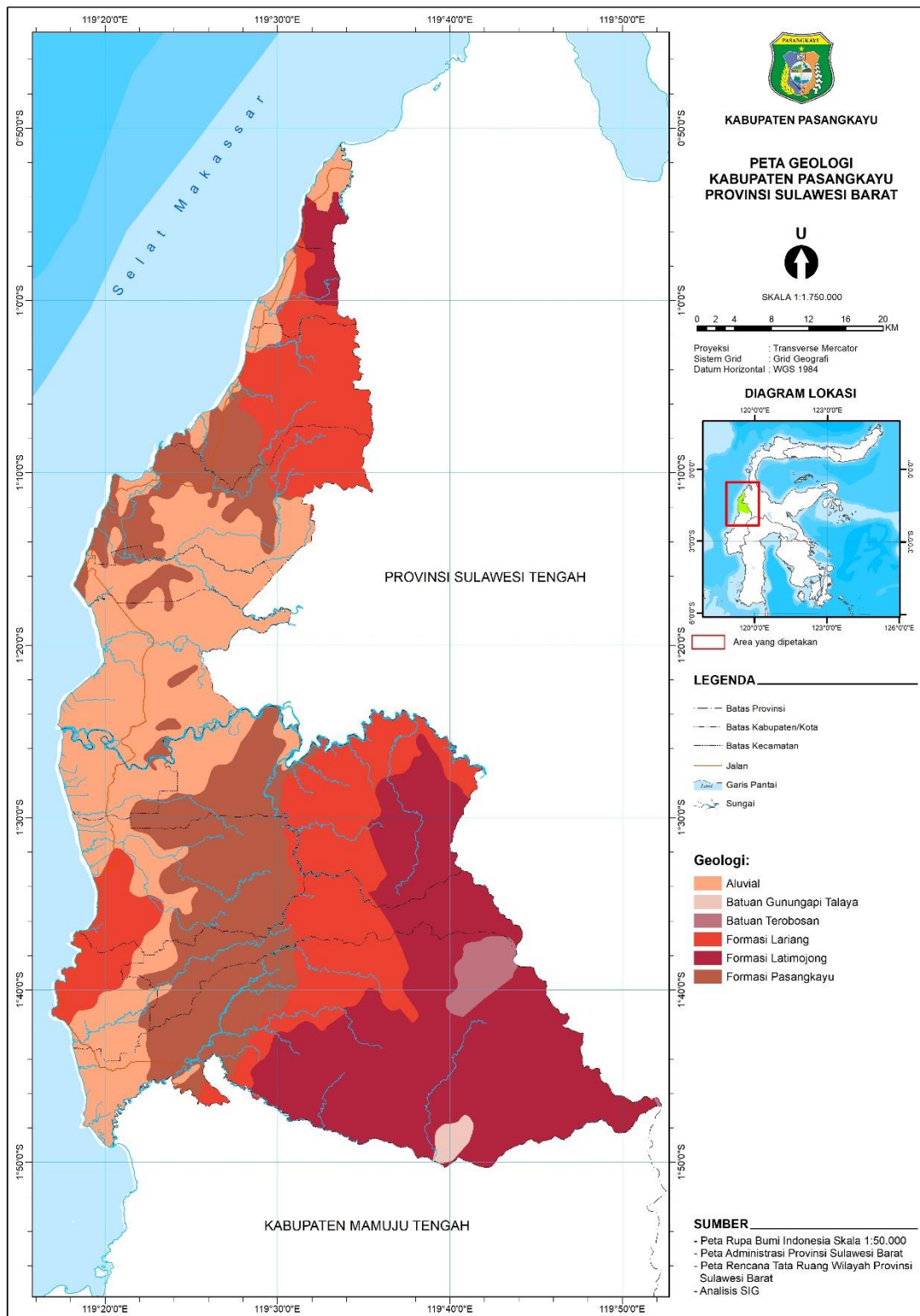
Sumber: RTRW Kabupaten Pasangkayu, 2020

Berdasarkan Tabel 3.3, menunjukkan kondisi jenis geologi yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Terdapat enam jenis kondisi geologi yang ada di Kabupaten Pasangkayu yaitu Aluvial, Batuan Gunungapi Talaya, Batuan Terobosan, Formasi Laringa, Formasi Latimojong, dan Formasi Pasangkayu. Jenis geologi berupa Batuan Gunungapi Talaya, dan Batuan Terobosan sangat kecil yaitu dibawah dua persen dari total luas Kabupaten Pasangkayu.

Jenis geologi di Kabupaten Pasangkayu tidak didominasi oleh kondisi geologi tertentu, adapun jenis geologi paling luas adalah Formasi Latimojong. Formasi Latimojong tersebut sebagian besar berada di sebelah tenggara, dan sebagian kecilnya lagi ada di sebelah utara Kabupaten Pasangkayu. Jenis geologi aluvial yang cukup luas setelah Formasi Latimojong, tersebar merata hampir disetiap pesisir Kabupaten Pasangkayu. Sedangkan Formasi Laringa, dan Pasangkayu tersebar di bagian Utara, dan selatan.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.5 Peta Geologi Kabupaten Pasangkayu



3.1.5. Hidrologi

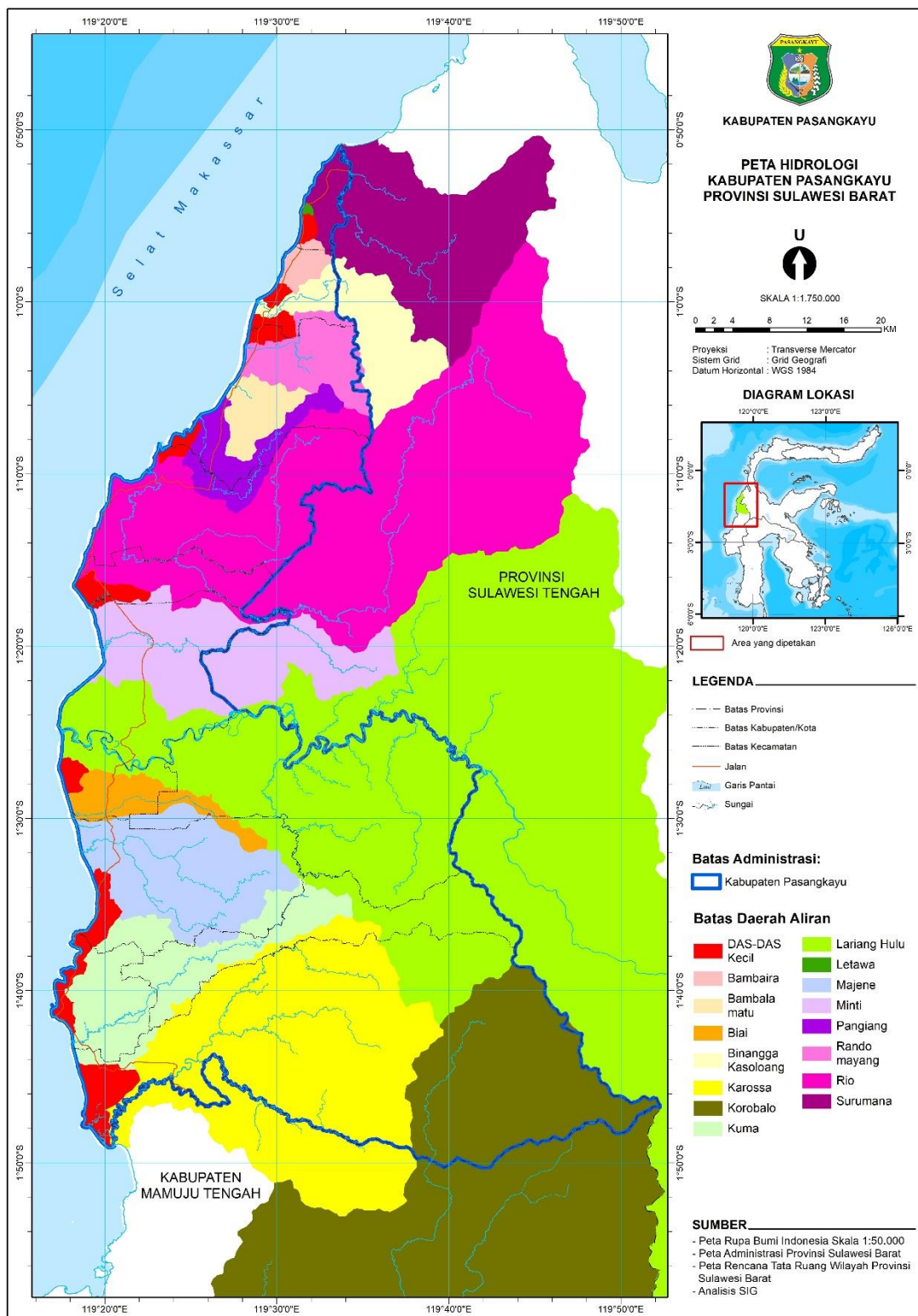
Hidrologi adalah suatu gambaran kondisi air mulai dari pergerakan, distribusi, kuantitas, dan kualitas air yang ada di bumi yang terus mengalami perputaran atau siklus. Siklus air sendiri dipahami sebagai sirkulasi air dari laut ke atmosfer lalu ke bumi dan kembali lagi ke laut dan seterusnya. Air mempunyai wilayah daratan untuk menentukan pergerakan, dan distribusinya yang disebut dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi oleh punggung-punggungan bukit atau gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Wilayah daratan tersebut dinamakan juga daerah tangkapan air (Catchment Area) yang merupakan ekosistem dengan unsur utamanya terdiri atas sumberdaya alam (tanah, air, dan vegetasi) dan sumberdaya manusia sebagai pemanfaat sumberdaya alam tersebut. Adapun gambaran kondisi hidrologi Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Gambar 3.6.

Berdasarkan Gambar 3.6, memperlihatkan kondisi hidrologi Kabupaten Pasangkayu yang bersumber dari Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Kondisi hidrologi berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) menggambarkan terdapat 15 aliran sungai, dan beberapa sungai kecil yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Kabupaten Pasangkayu sebagian besar wilayahnya berada di pesisir atau berbatasan langsung dengan Selat Makassar, sehingga sebagian besar sungai-sungai tersebut bermuara di Kabupaten Pasangkayu. Hanya ada satu sungai yang hulunya berada di Kabupaten Pasangkayu, tapi akan bermuara di Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Sungai Korobalo.

Sungai terbesar yang terdapat di Kabupaten Pasangkayu adalah Sungai Lariang Hulu. Sungai Lariang Hulu bermuara di Perbatasan Kecamatan Tikke Raya, dan Kecamatan Lariang, dan sebagian besar daerah hulunya berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan Pasangkayu Selaku ibukota dilalui oleh Sungai Rio yang juga hulunya berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Sungai Rio tersebut merupakan sungai terbesar yang bermuara di Kabupaten Pasangkayu setelah Sungai Lariang Hulu.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.6 Peta Hidrologi Kabupaten Pasangkayu



3.1.6. Klimatologi

Iklim merupakan suatu deskripsi atmosfer terhadap unsur cuaca seperti pola hujan dan temperatur yang akan sangat mempengaruhi segala kondisi biofisik yang ada di bumi. Iklim akan sangat berpengaruh terhadap keadaan sumberdaya tanah, vegetasi, dan kondisi hidrologi yang mempengaruhi peredaran air di darat. Indonesia berada pada daerah iklim tropis dengan curah hujan tinggi dan temperatur yang tinggi, hingga kondisi yang sangat ekstrim akan mengakibatkan beberapa gangguan berupa bencana alam. Adapun kondisi iklim Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.4, dan Gambar 3.7.

Tabel 3.4 Kondisi Iklim (Curah Hujan, dan Hari Hujan) Kabupaten Pasangkayu

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah hari hujan	Rata-Rata Curah Hujan
Januari	220	13	16,9
Februari	139	15	9,3
Maret	80	9	8,9
April	296	15	19,7
Mei	169	16	10,6
Juni	527	19	27,7
Juli	146	14	10,4
Agustus	20	7	2,9
September	179	10	17,9
Oktober	356	19	18,7
November	124	11	11,3
Desember	304	17	17,9
Jumlah	2.560	165	172,2

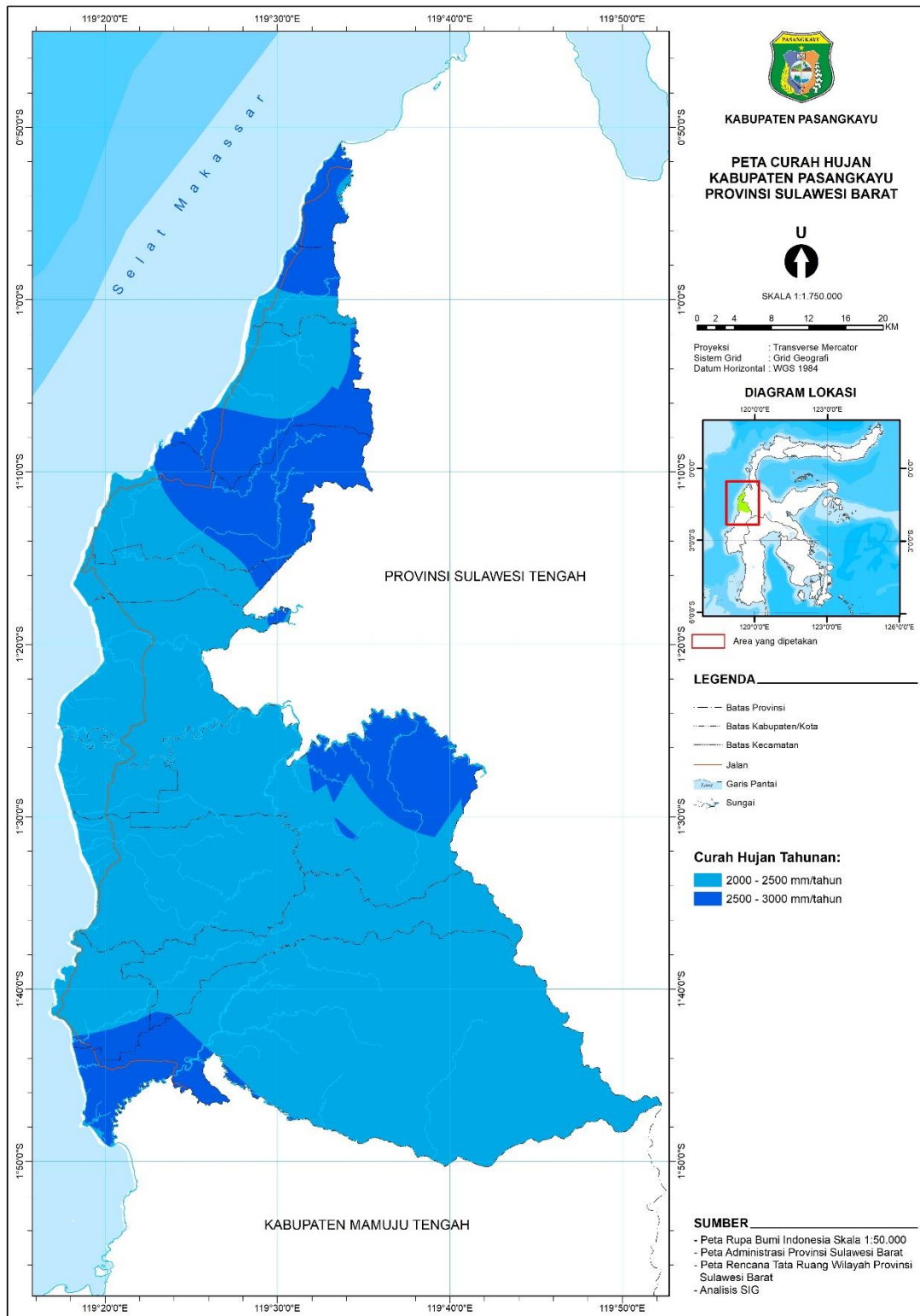
Sumber: BPS, Pasangkayu Dalam Angka 2020.

Berdasarkan Tabel 3.4. dan Gambar 3.7, menunjukkan kondisi iklim berupa curah hujan dan jumlah hari hujan di Kabupaten Pasangkayu. Pada umumnya, curah hujan Kabupaten Pasangkayu berada pada kisaran 2.500 mm pertahun. Musim hujan dimulai pada bulan September yaitu sekitar 180 mm perbulan dengan 18 hari hujan. Kondisi musim hujan tersebut terus mengalami fluktuasi atau naik turun mulai bulan September tersebut sampai bulan Juli. Puncak musim hujan di Kabupaten Pasangkayu berada pada Bulan Juni yang dapat mencapai 500 mm perbulan dengan hampir hujan setiap harinya.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

Sedangkan puncak musim kemarau berada pada bulan Agustus dengan curah hujan hanya 20 mm.



Gambar 3.7 Peta Distribusi Curah Hujan Tahunan Kabupaten Pasangkayu



3.1.7. Penggunaan Lahan

Penjelasan penggunaan lahan tidak lepas dari penutupan lahan yang merupakan penutup lahan mencakup segala jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi yang ada pada lahan tertentu. Secara luas penutupan lahan akan mencakup penggunaan terhadap suatu lahan merupakan informasi dari pengaruh aktivitas manusia terhadap sebageaian fisik permukaan bumi. Sehingga membahas klasifikasi penggunaan lahan tidak terlepas dari makna tentang lahan sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam sebagai kesatuan unsur-unsur lingkungan, baik fisik maupun biotik, yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Adapun penggunaan lahan kabupaten pasangkayu disajikan pada Tabel 3.5, dan Gambar 3.8.

Tabel 3.5 Penggunaan lahan Kabupaten Pasangkayu

No.	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Presentase (%)
1	Hutan	144.843,18	49,56
2	Hutan Mangrove	1.439,70	0,49
3	Laut	28,61	0,01
4	Padang Rumput	309,18	0,11
5	Pasir/Bukit Pasir Laut	79,43	0,03
6	Pelabuhan/Terminal	5,41	0,00
7	Perkebunan/Kebun	111.457,51	38,13
8	Permukiman	2.972,03	1,02
9	Rawa	77,72	0,03
10	Sawah	971,13	0,33
11	Semak Belukar	19.367,83	6,63
12	Sungai/Danau/Situ/Embung	3.216,04	1,10
13	Tambak	6.049,23	2,07
14	Tanah Kosong/Gundul	197,17	0,07
15	Tegalan/Ladang	1.258,49	0,43
Total		292.272,66	100,00

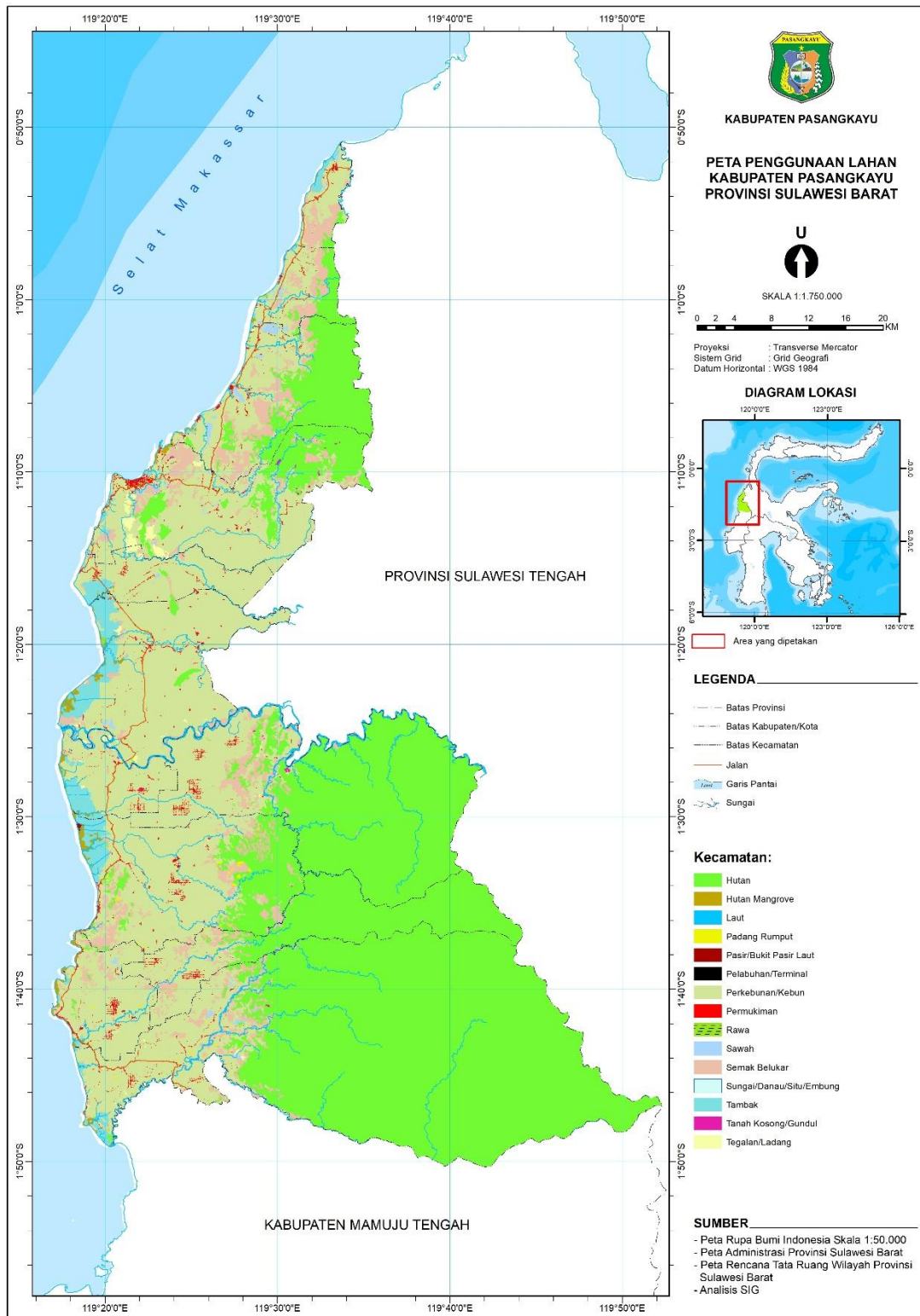
Sumber: RTRW Kabupaten Pasangkayu, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.5. dan Gambar 3.8, menunjukkan kondisi dan sebaran penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Terdapat dua jenis penggunaan lahan yang mendominasi di Kabupaten Pasangkayu yaitu hutan, dan Perkebunan. Penggunaan lahan berupa perkebunan hampir tersebar merata keseluruh 12 kecamatan yan ada di Kabupaten pasangkayu. Sedangkan



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

jenis hutan yang paling luas ditemukan pada ketinggian 700 mdpl atau dataran tinggi Kabupaten Pasangkayu meliputi Kecamatan Bambaira, Bambalamotu, Pasangkayu, Bulu Taba, Duripoku, Baras, dan Dapurang.



Gambar 3.8 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pasangkayu



3.1.8. Kawasan Hutan

Sebagian besar masyarakat akan memahami bahwa Kawasan hutan merupakan suatu tempat yang sangat hijau, dipenuhi oleh pepohonan lebat, dan tempat tinggal para hewan-hewan yang besar, dan pemangsa serta ruang yang berbeda dengan masyarakat. Definisi kawasan hutan telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 1 Angka 3, bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan merupakan Kawasan atau wilayah secara teritorial sehingga ketika kawasan ini sudah tidak lagi ditumbuhi oleh berbagai vegetasi kehutanan maka wilayah tersebut masih disebut kawasan hutan. Adapun kawasan hutan yang ada di Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.6. dan Gambar 3.9.

Tabel 3.6 Fungsi Kawasan Kabupaten Pasangkayu

No.	Fungsi Kawasan	Luas (ha)	Presentase (%)
1	Areal Penggunaan Lain	126.949,00	43,44
2	Hutan Lindung	98.551,77	33,72
3	Hutan Produksi	2.295,93	0,79
4	Hutan Produksi Konversi	8.795,23	3,01
5	Hutan Produksi Terbatas	55.413,29	18,96
6	Taman Nasional	267,44	0,09
Total		292.272,66	100,00

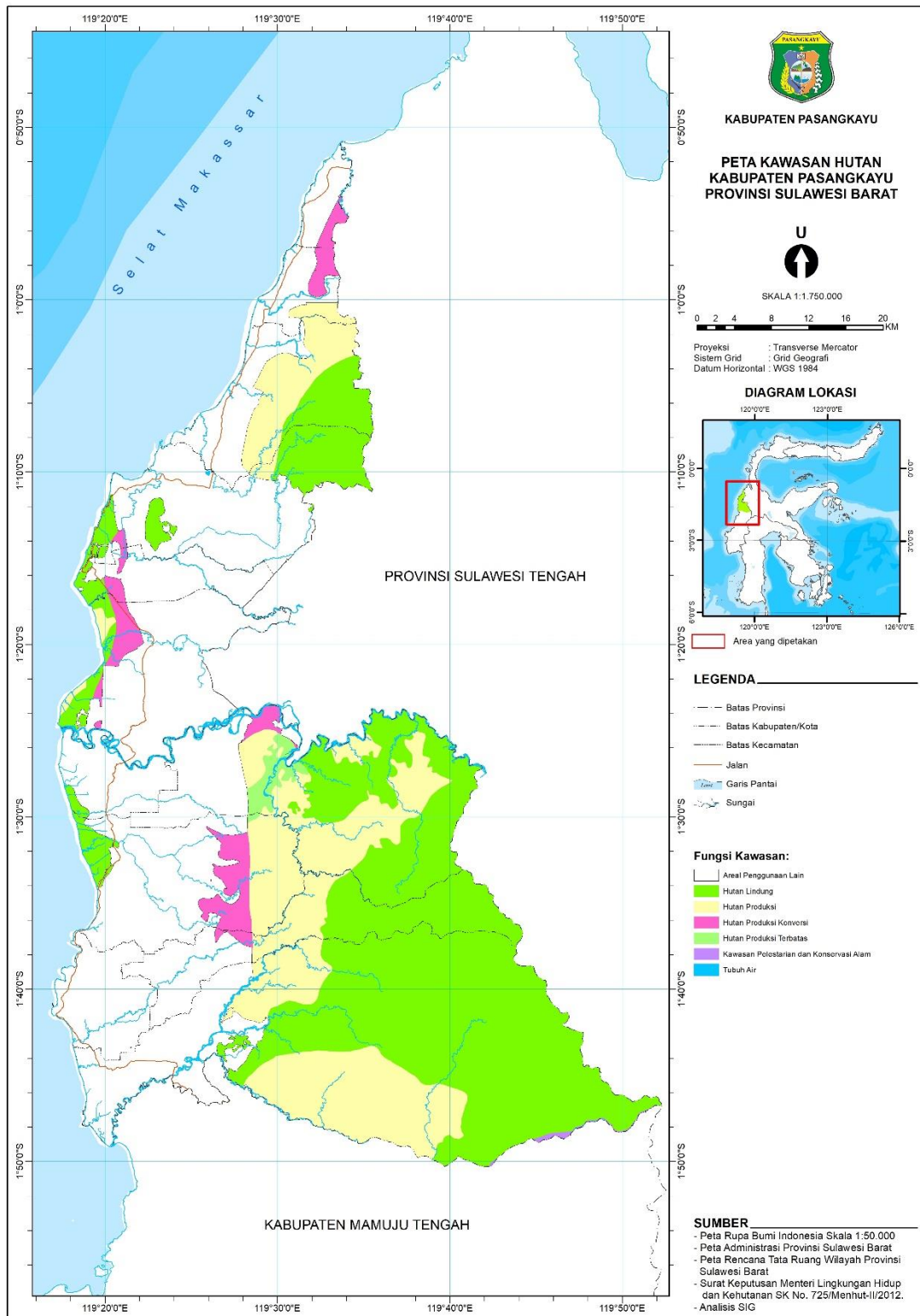
Sumber: RTRW Kabupaten Pasangkayu, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.6. dan Gambar 3.9, menunjukkan luas dan sebaran kawasan hutan yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Semua jenis kawasan hutan ada di Kabupaten Pasangkayu mulai dari Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Konservasi yaitu Taman Nasional. Taman Nasional tersebut sangat kecil karena bagian dari Taman Nasional Gandang Dewata yang sebagian besar ada di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Mamasa. Hutan Lindung merupakan kawasan hutan yang paling luas di Kabupaten Pasangkayu yang yang tersebar merata disetiap kecamatan. Hutan Lindung tidak terdapat pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sarjo, Bambaira, dan Kecamatan Surudu. Kecamatan Sarjo hanya ada kenis Hutan Produksi Konversi, sedangkan Kecamatan Bambaira terdapat



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

jenis Hutan Produksi konversi, dan terbatas. Adapun wilayah Kecamatan Sarudu tidak memiliki Kawasan hutan.



Gambar 3.9 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Pasangkayu



3.1.9. Kebencanaan

Bencana secara umum dipahami sebagai suatu kejadian yang menimbulkan kerusakan yang akan menyebabkan kerugian pada kehidupan, baik itu secara individu ataupun publik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 mendefinisikan bencana merupakan sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana pun banyak disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari faktor alam, non alam, dan manusia atau secara sosial.

Bencana alam merupakan suatu bencana yang disebabkan oleh fenomena alam yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Daerah yang beriklim tropis ditandai dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang terkadang cukup ekstrim. Hal tersebut akan menimbulkan beberapa bentuk bencana alam yang terjadi di Indonesia. Salah satu bentuk bencana alam yang sering muncul di Indonesia adalah bencana yang bersifat hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan kekeringan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah meluncurkan hasil kajian risiko bencana yang dikeluarkan di halaman web <http://inarisk.bnpb.go.id>. Kajian risiko bencana tersebut dianalisis melalui beberapa pendekatan dan sejarah atau catatan kebencanaan yang pernah terjadi. Melalui data tersebut dapat diidentifikasi potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Pasangkayu. Berdasarkan laman <http://inarisk.bnpb.go.id> terdapat beberapa jenis bencana yang berpotensi terjadi dengan probabilitas tinggi, yaitu banjir, banjir bandang, gempa bumi, gelombang tinggi, tsunami, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Adapun sebaran, dan rincian luasan potensi bencana di Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.7, dan Gambar 3.10 sampai Gambar 3.16.



Tabel 3.7 Daerah Rawan bencana PerKecamatan di Kabupaten Pasangkayu

No.	Kecamatan	Banjir	Banjir Bandang	Gempa Bumi	Tanah Longsor	Tsunami	Gelombang Tinggi	Karhutla
1	Bambaira	-	-	219,87	-	241,38	217,40	600,61
2	Bambalamotu	-	-	107,34	144,96	243,59	198,42	369,84
3	Baras	471,27	88,12	-	212,94	369,83	64,53	8.842,42
4	Bulu Taba	1.291,36	654,22	281,04	17.914,37	-	-	4.580,73
5	Dapurang	1.010,49	1.937,28	54,76	68.033,24	366,67	18,69	1.207,63
6	Duripoku	199,27	953,57	-	11.388,97	-	-	2.436,36
7	Lariang	406,32	-	-	-	157,43	-	1.884,11
8	Pasangkayu	2.448,15	27,47	2.889,59	794,95	299,72	147,77	8.003,66
9	Pedongga	2.367,49	610,52	2.626,18	0,00	180,82	137,06	423,67
10	Sarjo	72,37	190,48	1.587,41	-	411,04	135,66	455,63
11	Sarudu	1.011,53	487,23	-	-	147,63	-	5.849,16
12	Tikke Raya	5.345,62	316,36	3.913,85	-	560,95	42,32	9.573,46
Total		14.623,86	5.265,25	11.680,03	98.489,44	2.979,06	961,85	44.227,28

Sumber: InaRISK, 2020



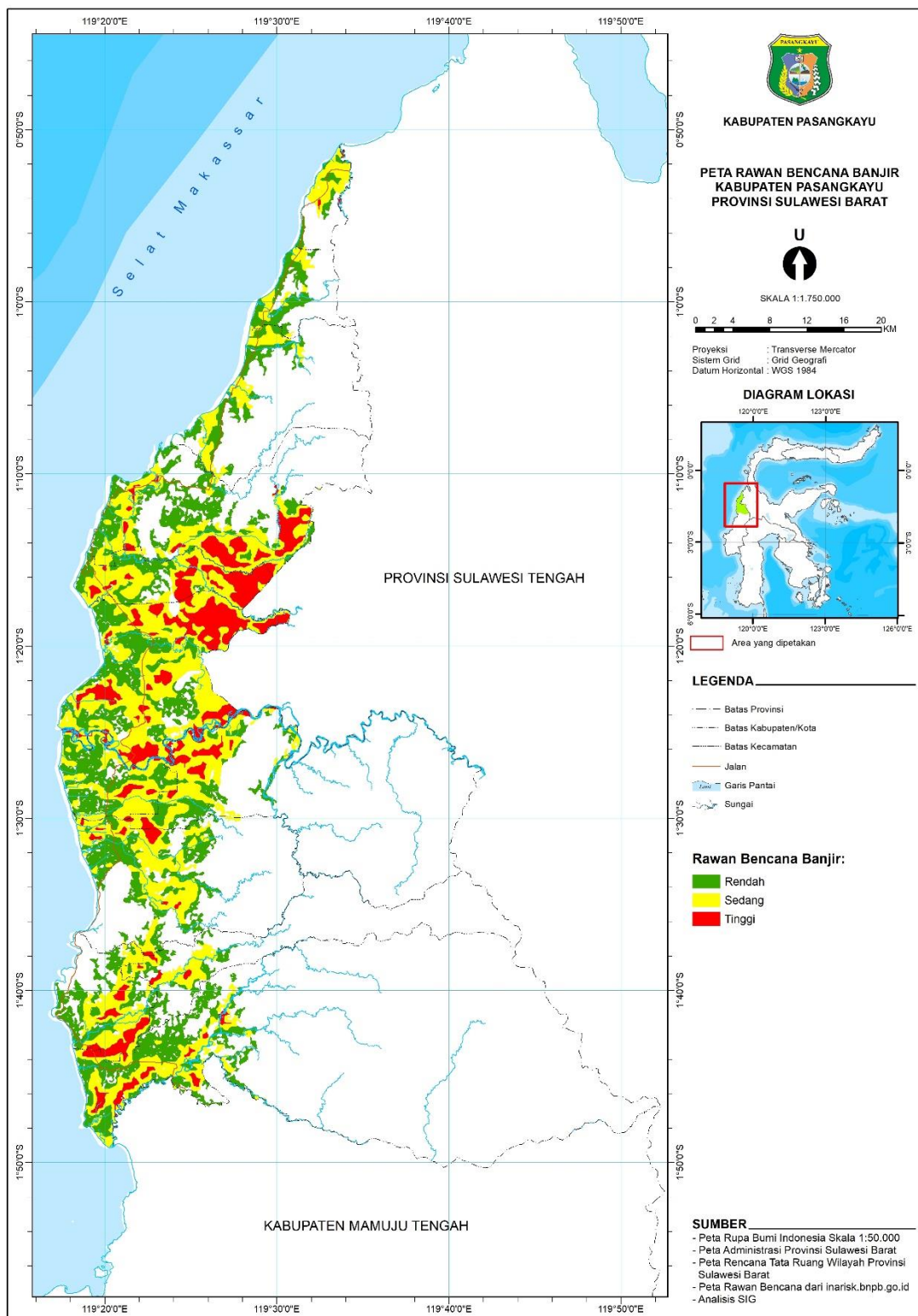
Berdasarkan Tabel 3.7, menunjukkan daerah berpotensi terjadi bencana di setiap kecamatan di Kabupaten Pasangkayu dari situs resmi BNPB <http://inarisk.bnpb.go.id>. Jenis bencana yang paling luas berpotensi di Kabupaten Pasangkayu adalah bencana tanah longsor. Potensi terjadinya bencana tanah longsor sekitar 98.489,44 hektar yang sebagian besar di tiga Kecamatan yaitu Dapurang, Bulu Taba, dan Duripoku. Tiga kecamatan tersebut sangat berpotensi terjadi bencana tanah longsor karena berada pada daerah dataran tinggi dengan kondisi kemiringan lereng curam, dan sangat curam.

Selain bencana tanah longsor, bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memiliki potensi besar terjadi di Kabupaten Pasangkayu. Potensi terjadinya bencana karhutla sekitar 44.227,28 hektar yang tersebar keseluruhan atau dua belas kecamatan yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Kecamatan Baras, dan Pasangkayu merupakan kecamatan yang memiliki potensi bencana karhutla paling luas. Potensi bencana karhutla tersebar dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat dalam membuka lahan perkebunan oleh masyarakat.

Potensi terjadinya bencana banjir, dan banjir bandang hampir diseluruh kecamatan kecuali Kecamatan Bambaira, dan Bambalamotu. Bencana gempa bumi berpotensi terjadi di delapan kecamatan yaitu Bambaira, Bambalamotu, Bulu Taba, Dapurang, Pasangkayu, Pedonggo, Sarjo, dan Tikke Rata. Bencana tsunami yang memiliki dampak paling besar ketika terjadi berpotensi terjadi pada seluruh kecamatan yang berada di pesisir Kabupaten Pasangkayu atau yang berbatasan langsung dengan selat makassar. Terdapat tiga kecamatan yang memiliki potensi semua jenis atau tujuh jenis bencana yang ada di Kabupaten Pasangkayu yaitu Kecamatan Dapurang, Pasangkayu, dan Pedonggo.



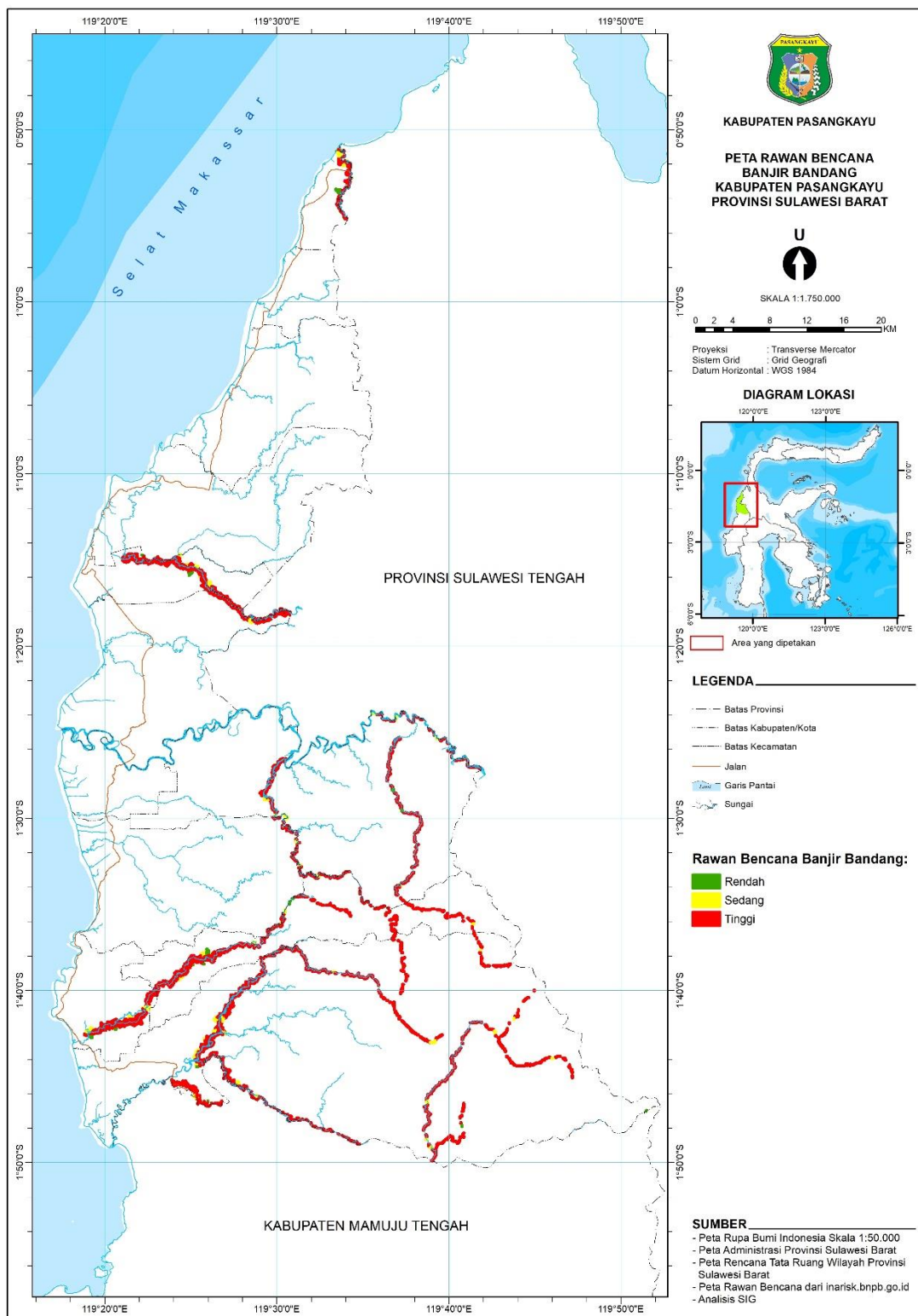
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.10 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Pasangkayu



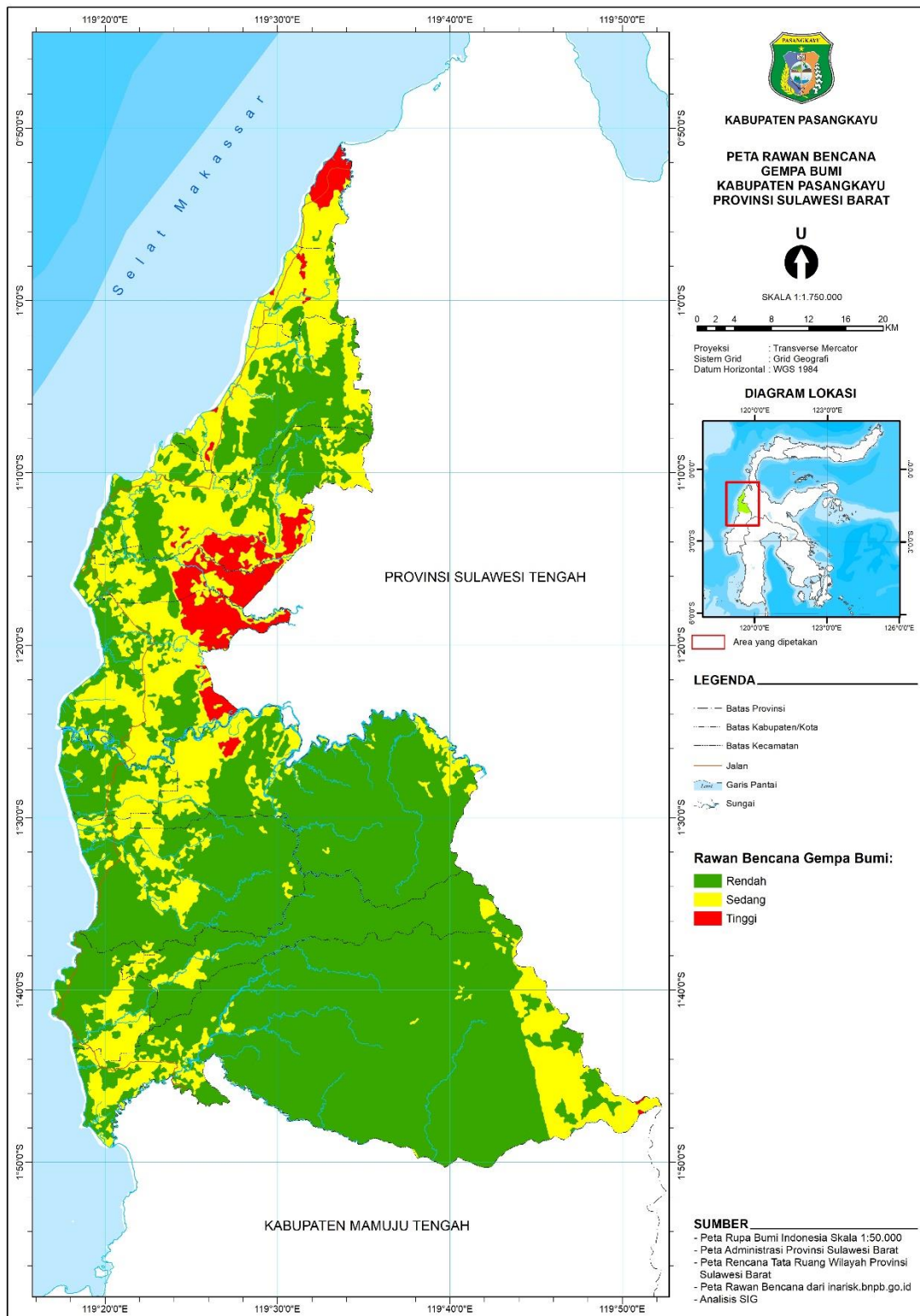
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.11 Peta Rawan Bencana Banjir Bandang Kabupaten Pasangkayu



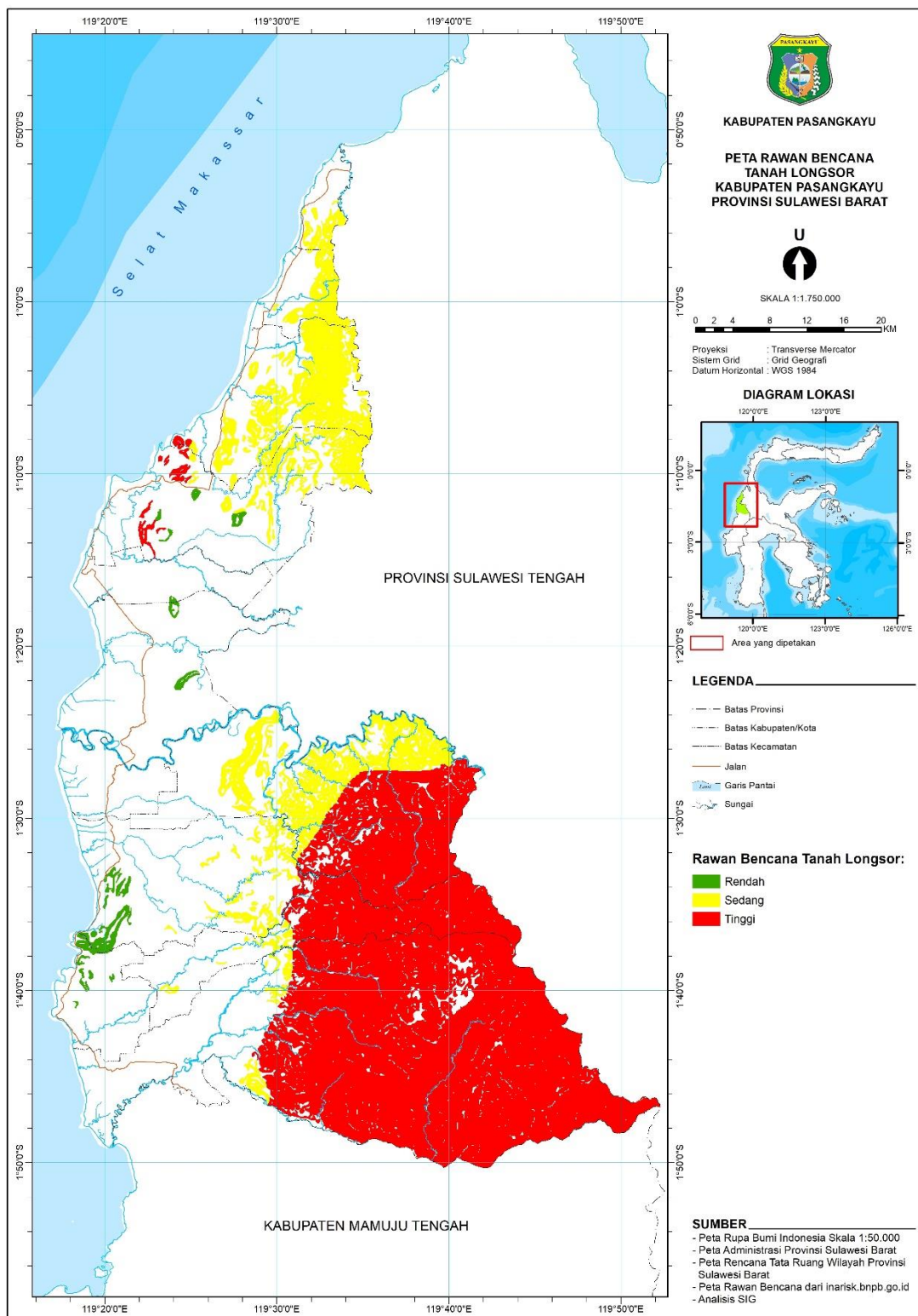
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.12 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Pasangkayu



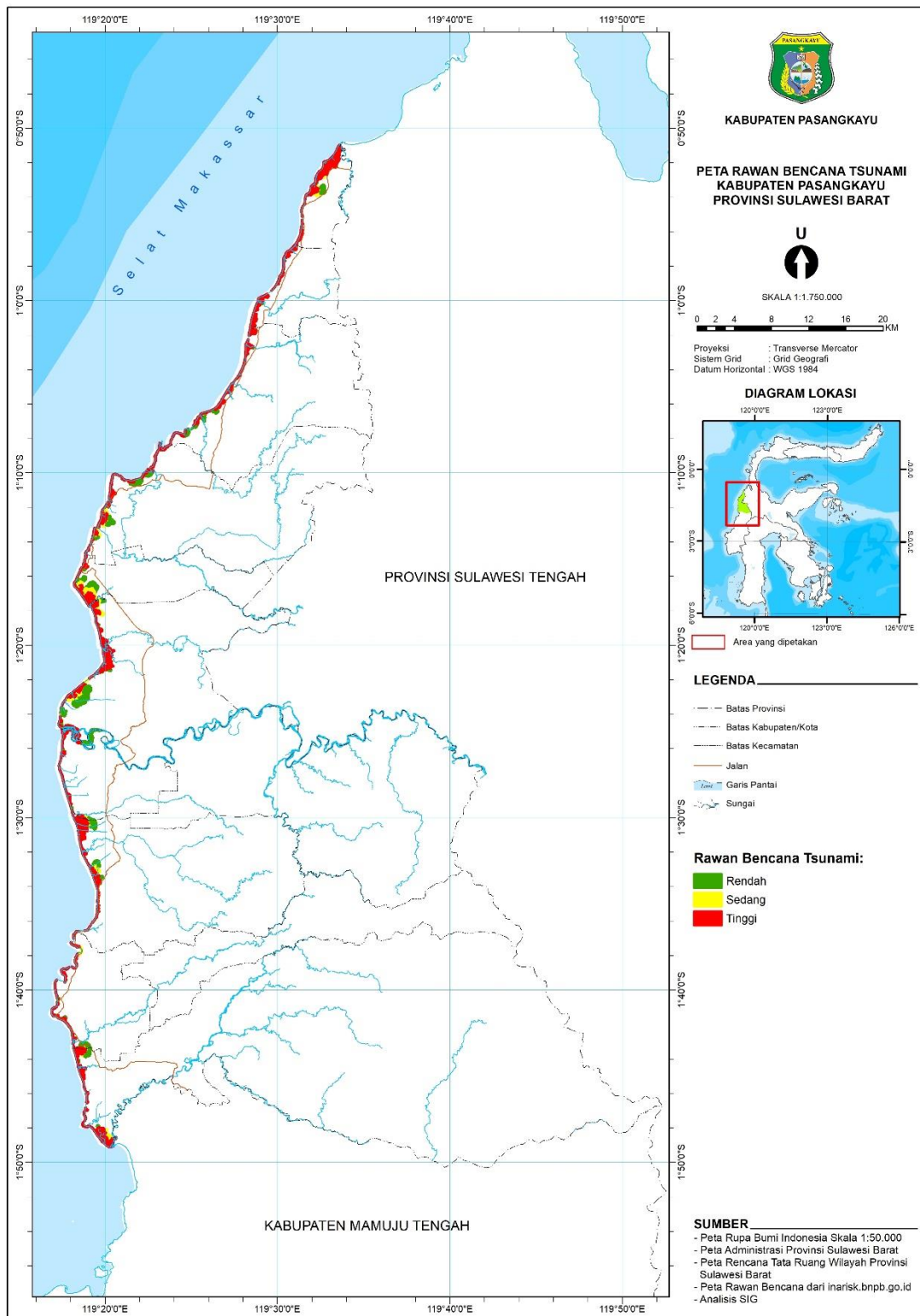
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.13 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Pasangkayu



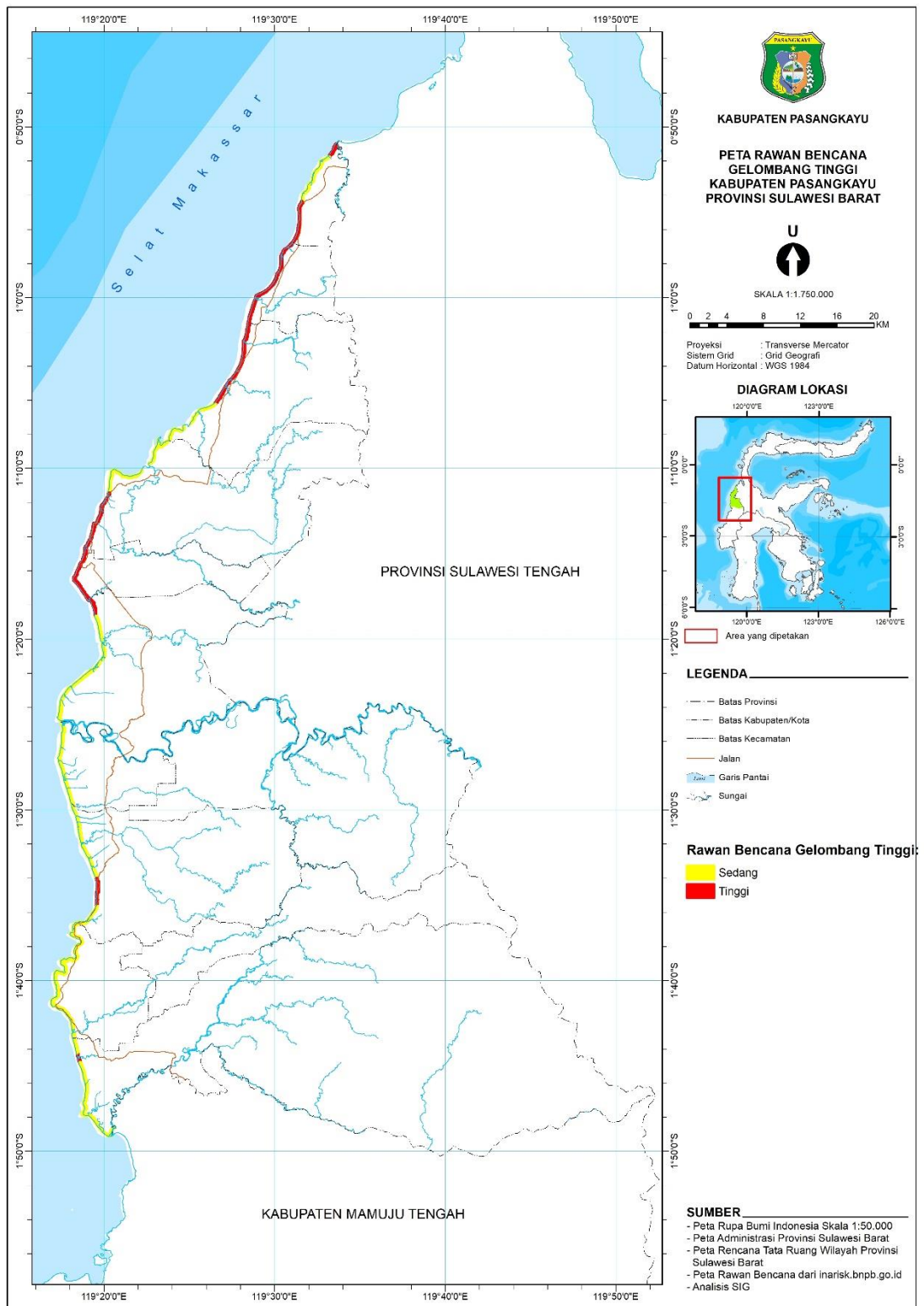
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.14 Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Pasangkayu



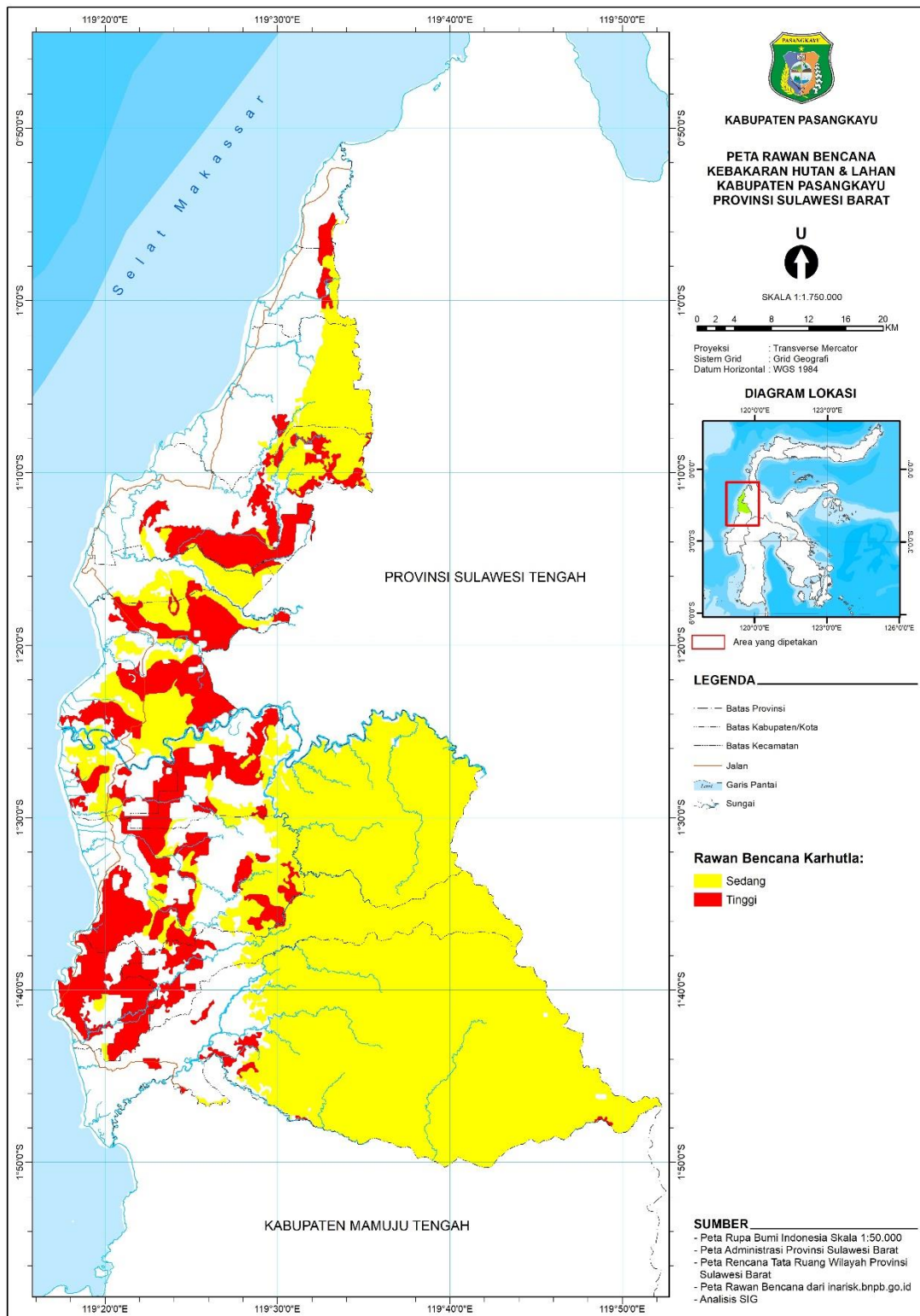
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.15 Peta Rawan Bencana Gelombang Tinggi Kabupaten Pasangkayu



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.16 Peta Rawan Bencana Karhutla Kabupaten Pasangkayu



3.2. Kondisi Demografi dan Sosial

3.2.1. Jumlah Pemduduk

Secara sederhana, penduduk dipahami sebagai sekelompok orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah tertentu. Jika pandang secara umum di dunia, bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 2, bahwa Penduduk Indonesia adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia". Adapun karakteristik jumlah Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.8

Tabel 3.8 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, Kepadatan, dan Persentase Penduduk Kabupaten Pasangkayu

No.	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2018-2019(%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Presentase Penduduk (%)
1	Sarudu	19.509	5,13	197	8,05
2	Dapurang	24.836	2,48	27	10,25
3	Duripoku	8.539	2,81	40	3,52
4	Baras	30.782	4,9	111	12,70
5	Bulu Taba	16.065	4,43	37	6,63
6	Lariang	9.849	5,94	118	4,06
7	Pasangkayu	44.716	6,39	143	18,45
8	Pedongga	18.451	2,65	196	7,61
9	Tikke Raya	24.451	6,48	92	10,09
10	Bambalamotu	23.127	8,65	95	9,54
11	Bambaira	12.880	5,25	199	5,31
12	Sarjo	9.212	1,97	249	3,80
Pasangkayu		242.417	5,1	80	100,00

Sumber: BPS, Pasangkayu Dalam Angka 2020.



Berdasarkan Tabel 3.8, menunjukkan jumlah penduduk, kepadatan, dan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu. Jumlah penduduk Kabupaten Pasangkayu sebanyak 242.417 jiwa. Kepadatan jumlah penduduk Kabupaten Pasangkayu hanya 80 jiwa/km². Hal tersebut memberikan informasi bahwa Kabupaten Pasangkayu masih memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah. Laju pertumbuhan penduduk 2018-2019 Kabupaten Pasangkayu hanya sebesar 5,1 persen.

Jumlah penduduk Kabupaten Pasangkayu cukup tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten. Kecamatan Pasangkayu sebagai ibukota dan pusat kegiatan memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 44.716 jiwa. Namun bukan Kecamatan Pasangkayu yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi, tapi Kecamatan Sarjo. Kecamatan Sarjo tidak memiliki jumlah penduduk yang besar bahkan memiliki laju pertumbuhan yang paling kecil tapi memiliki wilayah yang cukup sempit sehingga kepadatan penduduknya sangat besar. Adapun Kecamatan Bambalamotu memiliki laju pertumbuhan penduduk yang paling besar diantara kecamatan yang ada yaitu sebesar 8,67 persen.

3.2.2. Pendidikan

Pembangunan bagi setiap daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam proses pembangunan setiap daerah pun peranan pendidikan sangatlah penting. Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan juga mempengaruhi pula secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pendidikan secara umum dengan tercapainya struktur jumlah sekolah SD, SMP, dan SMA yang ideal, meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan. Adapun jumlah sekolah, guru, dan murid pada tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.9 hingga Tabel 3.17.



Tabel 3.9 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-kanak dibawah Kemendikbud Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

No.	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid
1	Sarudu	11	30	358
2	Dapurang	18	39	339
3	Duripoku	6	16	162
4	Baras	9	35	412
5	Bulu Taba	9	18	146
6	Lariang	6	9	80
7	Pasangkayu	23	46	442
9	Tikke Raya	15	41	454
8	Pedongga	4	8	114
10	Bambalamotu	18	53	39
11	Bambaira	13	18	296
12	Sarjo	9	31	28
Pasangkayu		141	344	2870

Sumber: BPS, Pasangkayu Dalam Angka 2020.

Tabel 3.10 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal dibawah Kementerian Agama di Kabupaten Pasangkayu

No.	Kabupaten	Sekolah	Guru	Murid
1	Pasangkayu	13	44	421

Sumber: BPS, Pasangkayu Dalam Angka 2020.

Tabel 3.11 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) dibawah Kemendikbud Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

No.	Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Sarudu	10	-	104	-	1.689	-
2	Dapurang	13	-	125	-	1.729	-
3	Duripoku	4	1	43	2	590	32
4	Baras	11	1	119	11	1.955	219
5	Bulu Taba	12	-	107	-	1.281	-
6	Lariang	9	-	70	-	921	-
7	Pasangkayu	14	4	179	37	2.838	739
9	Tikke Raya	12	-	121	-	1.862	-
8	Pedongga	5	-	56	-	1.057	-
10	Bambalamotu	17	3	153	17	2.358	198
11	Bambaira	11	-	97	-	1.447	-
12	Sarjo	8	-	78	-	987	-
Pasangkayu		126	9	1.252	67	18.714	1.188

Sumber: BPS, Pasangkayu Dalam Angka 2020.



Tabel 3.12 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah dibawah Kementerian Agama di Kabupaten Pasangkayu

No.	Kabupaten	Sekolah	Guru	Murid
1	Pasangkayu	14	135	1319

Sumber: BPS, Pasangkayu Dalam Angka 2020.

Tabel 3.13 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibawah Kemendikbud Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

No.	Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Sarudu	5	1	57	7	585	58
2	Dapurang	5	1	51	3	543	123
3	Duripoku	2	-	20	-	284	-
4	Baras	3	2	51	4	707	104
5	Bulu Taba	3	-	41	-	464	-
6	Lariang	3	-	30	-	401	-
7	Pasangkayu	5	2	98	19	1051	386
9	Tikke Raya	2	1	25	17	407	470
8	Pedongga	1	-	25	-	238	-
10	Bambalamotu	8	-	91	-	1121	-
11	Bambaira	2	-	32	-	513	-
12	Sarjo	2	-	29	-	354	-
Pasangkayu		41	7	550	50	6668	1141

Sumber: BPS, Pasangkayu Dalam Angka 2020.

Tabel 3.14 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah dibawah Kementerian Agama di Kabupaten Pasangkayu

No.	Kabupaten	Sekolah	Guru	Murid
1	Pasangkayu	15	152	1262

Sumber: BPS, Pasangkayu Dalam Angka 2020.



Tabel 3.15 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) dibawah Kemendikbud Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

No.	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid
1	Sarudu	1	23	535
2	Dapurang	1	21	291
3	Duripoku	1	25	190
4	Baras	1	29	262
5	Bulu Taba	1	31	397
6	Lariang	1	12	233
7	Pasangkayu	2	72	1.144
9	Tikke Raya	1	22	360
8	Pedongga	-	-	-
10	Bambalamotu	1	32	617
11	Bambaira	1	26	295
12	Sarjo	1	25	327
Pasangkayu		12	318	4.651

Sumber: BPS, Pasangkayu Dalam Angka 2020.

Tabel 3.16 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibawah Kemendikbud Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

No.	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid
1	Sarudu	1	13	133
2	Dapurang	2	17	181
3	Duripoku	-	-	-
4	Baras	3	44	570
5	Bulu Taba	-	-	-
6	Lariang	1	6	56
7	Pasangkayu	4	59	425
9	Tikke Raya	1	14	263
8	Pedongga	-	-	-
10	Bambalamotu	1	28	354
11	Bambaira	-	-	-
12	Sarjo	1	21	309
Pasangkayu		14	202	2291

Sumber: BPS, Pasangkayu Dalam Angka 2020.

Tabel 3.17 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah dibawah Kementerian Agama di Kabupaten Pasangkayu

No.	Kabupaten	Sekolah		Guru		Murid	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Pasangkayu	9	9	24	56	114	371

Sumber: BPS, Pasangkayu Dalam Angka 2020.



Berdasarkan Tabel 3.9. sampai Tabel 3.17, menunjukkan jumlah sekolah, guru, dan murid disemua jenjang pendidikan negeri maupun swasta di Kabupaten Pasangkayu. Jumlah sekolah suatu daerah akan mengikuti jumlah pada daerah tersebut termasuk Kabupaten Pasangkayu. Kecamatan Pasangkayu selaku ibukota Kabupaten masih menjadi pusat pendidikan dengan melihat jumlah sekolah, dan guru. Rasio guru dengan murid cukup ideal di Kabupaten Pasangkayu yaitu di bawah 20 murid perguru pada semua jenjang pendidikan. Namun yang perlu menjadi catatan fasilitas sekolah di Kecamatan Pedongga yang hanya memiliki satu Unit Sekolah di Tingkat Sekolah Menengah Pertama, dan tidak sekolah di Tingkat Sekolah Menengah Atas maupun Kejuruan.

3.2.3. Kesehatan

Kesehatan merupakan suatu modal utama dalam pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia. Pembangunan daerah pun mencakup kondisi kesehatan yang mencakup upaya pelaksanaan kesehatan bagi masyarakat khususnya yang ada di daerah dalam memujudkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga tercapai kesehatan masyarakat yang optimal. Salah satu tolak ukur dalam pembangunan kesehatan dengan melakukan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan berupa fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Pelayanan kesehatan tersebut menjadi hal yang sangat penting di Kabupaten Pasangkayu dengan melihat fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan yang ada. Fasilitas Kesehatan berupa rumah sakit di Kabupaten Pasangkayu hanya ada satu, dan tidak adanya rumah sakit khusus bersalin. Hal tersebut diperparah dengan tenaga kesehatan yang sedikit dan tidak merata. Seperti halnya di Kecamatan Tekke Raya, dan Dapurang hanya ada satu tenaga dokter. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Belum lagi berbicara mengenai kualitas dari fasilitas, dan tenaga kesehatan. Kabupaten Pasangkayu pun memerlukan suatu fasilitas kesehatan dengan kuantitas dan kualitas yang baik seperti rumah sakit sampai fasilitas kesehatan yang merata disetiap wilayah kabupaten dan tenaga kesehatan yang ada difasilitas kesehatan tersebut. Adapun data fasilitas



kesehatan dan tenaga kesehatan Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.18 dan Tabel 3.19.

Tabel 3.18 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

No.	Kecamatan	Rmah Sakit	Rumah Bersalin	Poli-klinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	apotek
1	Sarudu	-	-	1	2	3	-
2	Dapurang	-	-	-	1	5	1
3	Duripoku	-	-	-	1	4	-
4	Baras	-	-	1	2	4	-
5	Bulu Taba	-	-	-	1	5	1
6	Lariang	-	-	-	1	4	1
7	Pasangkayu	1	-	2	3	2	3
9	Tikke Raya	-	-	1	1	2	2
8	Pedongga	-	-	1	1	2	-
10	Bambalamotu	-	-	-	1	4	1
11	Bambaira	-	-	-	1	3	-
12	Sarjo	-	-	-	1	2	-
Pasangkayu		1	-	6	16	40	9

Sumber: BPS, Pasangkayu Dalam Angka 2020.

Tabel 3.19 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

No.	Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi
1	Sarudu	3	19	13	2
2	Dapurang	1	6	17	1
3	Duripoku	2	3	7	1
4	Baras	3	9	12	1
5	Bulu Taba	2	6	11	2
6	Lariang	2	8	9	0
7	Pasangkayu	22	59	33	14
9	Tikke Raya	1	8	8	2
8	Pedongga	2	4	6	1
10	Bambalamotu	2	12	19	1
11	Bambaira	2	8	11	0
12	Sarjo	2	8	9	2
Pasangkayu		44	150	155	27

Sumber: BPS, Pasangkayu Dalam Angka 2019.



3.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pengkajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TL) dilakukan dengan mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu atau serangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan intensitas pembangunan apakah masih dapat dikembangkan dan ditambahkan. Selain itu dapat menjadi informasi dasar dalam mengkaji perencanaan suatu wilayah agar tidak berdampak lingkungan.

D3TL merupakan deskripsi tentang perbandingan antara ketersediaan pelayanan ekosistem dengan kebutuhan masyarakat. Daya dukung lingkungan (D3TL) dimulai dari klasifikasi karakteristik ekoregion yang terdiri dari bentang lahan, tipe vegetasi alami dan karakteristik penutupan lahan. Data tersebut menjadi bahan pembuatan dan perhitungan peta layanan atau kinerja jasa ekosistem. Selanjutnya layanan jasa ekosistem penyediaan pangan dan air menjadi dasar penentuan status D3TL indikatif.

Penentuan status D3TLH dilakukan dengan menghitung selisih antara ketersediaan (supply) dengan kebutuhan (demand). Informasi ketersediaan berasal dari analisis Indeks Jasa Ekosistem (IJE) penyediaan pangan dan air berdasarkan hasil analisis data bentang lahan vegetasi, dan penutupan lahan. Kebutuhan energi bahan pangan diperoleh melalui perhitungan Angka Kecukupan Energi (AKE) penduduk dan kebutuhan air domestik dihitung dengan mengacu pada Permen LHK No.17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam pembangunan suatu daerah. Selain kebutuhan air domestik, kebutuhan air tutupan lahan juga perlu diikutsertakan dalam perhitungan kebutuhan air suatu daerah. Bila angka kebutuhan melampaui persediaan berarti D3TL terlampaui; sebaliknya bila kebutuhan lebih kecil dari persediaan maka diperoleh informasi status D3TLH belum terlampaui. Adapun daya dukung daya tampung Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.20, dan Tabel 3.21.



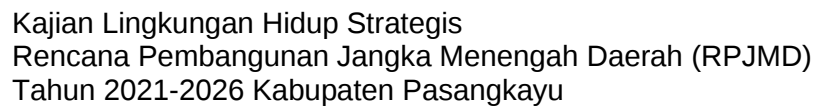
Tabel 3.20 Status Daya Dukung Daya Tampung Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

No.	Kecamatan	Status Daya Dukung Pangan (ha)	
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui
1	Bambaira	3.924,86	2.126,11
2	Bambalamotu	16.166,02	4.125,62
3	Baras	22.553,72	5.693,12
4	Bulu Taba	42.183,29	2.255,30
5	Dapurang	84.692,45	6.502,83
6	Duripoku	18.521,66	1.568,80
7	Lariang	4.814,35	3.087,32
8	Pasangkayu	20.140,79	7.249,19
9	Pedongga	6.513,81	2.195,86
10	Sarjo	2.194,44	1.586,40
11	Sarudu	6.297,76	3.550,61
12	Tikke Raya	19.088,71	5.239,64
Total		247.091,86	45.180,80

Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.20, menunjukkan status Daya Dukung Daya Tampung di Kabupaten Pasangkayu. Secara keseluruhan status daya dukung pangan baik di Kabupaten Pasangkayu dengan presentase sekitar 15 persen yang terlampaui. Hal yang menjadi perhatian, bahwa pertambahan jumlah penduduk yang pesat dimasa yang akan datang mengakibatkan permintaan pangan yang besar pula, dan berdampak terhadap status daya dukung pangan di masa yang akan datang.

Beberapa Kecamatan pun perlu menjadi perhatian status daya dukung pangannya. Kecamatan Sarjo, dan Laringa memiliki status daya dukung pangan yang terlampaui cukup luas yaitu sekitar 40 persen dari luas wilayah. Kecamatan Bambaira, dan Sarudu memiliki status daya dukung pangan yang terlampaui diatas 35 persen dari luasan kecamatan tersebut. Adapun Kecamatan Pasangkayu selaku ibukota memiliki status daya dukung pangan yang terlampaui sebesar 26 persen dari luasan wilayahnya.





Tabel 3.21 Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

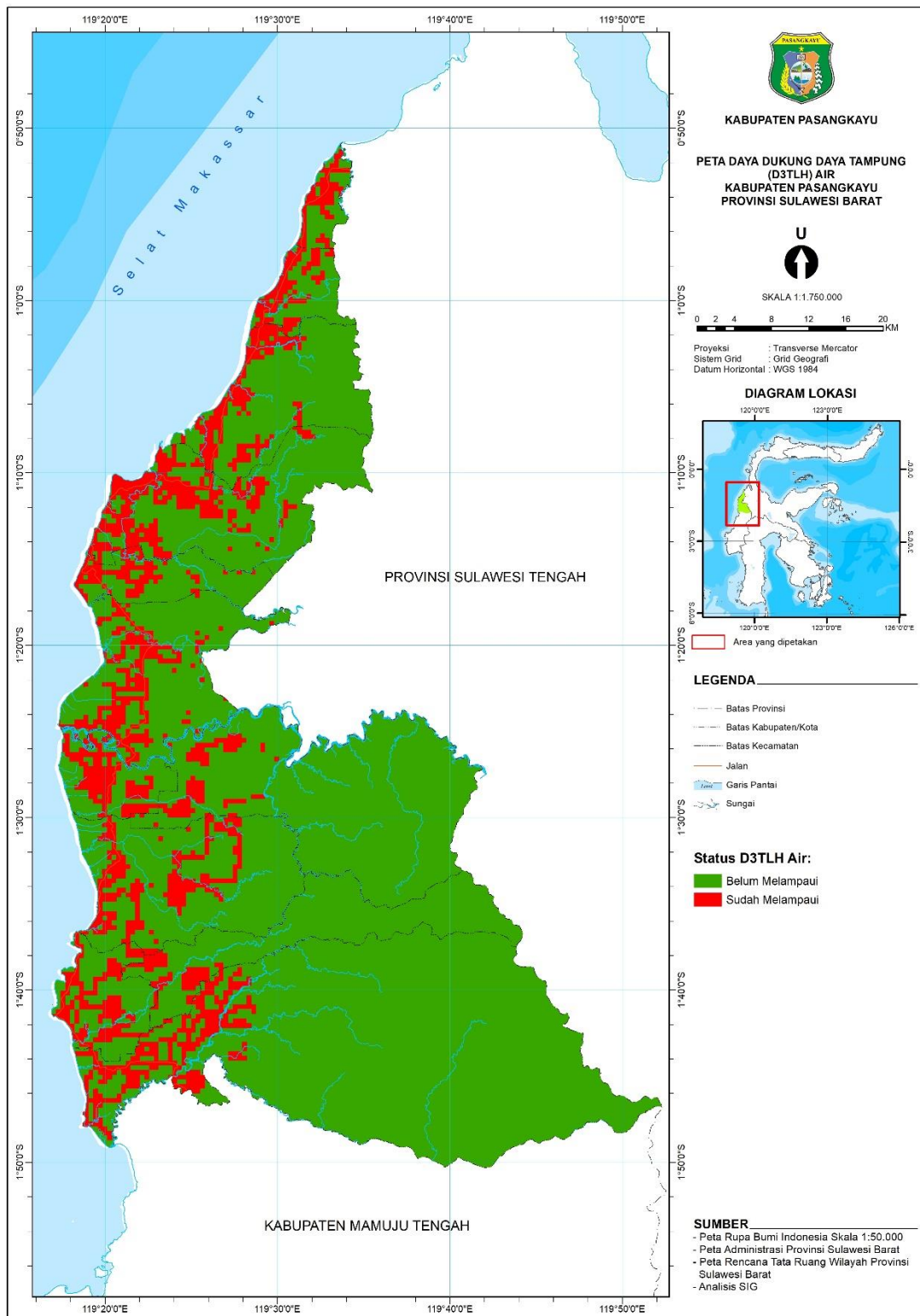
No.	Kecamatan	Status Daya Dukung Air (ha)	
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui
1	Bambaira	3.756,75	2.294,23
2	Bambalamotu	16.029,58	4.262,06
3	Baras	22.528,72	5.718,12
4	Bulu Taba	42.065,88	2.372,72
5	Dapurang	84.417,45	6.777,83
6	Duripoku	18.507,86	1.582,61
7	Lariang	4.662,44	3.239,23
8	Pasangkayu	19.740,79	7.649,19
9	Pedongga	6.370,12	2.339,55
10	Sarjo	2.127,56	1.653,28
11	Sarudu	6.222,76	3.625,61
12	Tikke Raya	18.751,83	5.576,52
Total		245.181,72	47.090,94

Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.21, menunjukkan status Daya Dukung Daya Tampung air di Kabupaten Pasangkayu. Status daya dukung air yang terlampaui Kabupaten Pasangkayu lebih tinggi sekitar satu persen dari status daya dukung pangannya. Status daya dukung air yang telah terlampaui sekitar 16 persen dari luas total Kabupaten Pasangkayu. Kondisi status daya dukung air seluruh Kecamatan pun tidak berbeda jauh dengan status daya dukung pangannya. Kecamatan Sarjo perlu mendapat perhatian karena memiliki wilayah dengan status daya dukung air yang telah terlampaui mencapai 43 persen dari luas wilayahnya. Begitupun juga dengan Kecamatan bambaira, Laringa, dan Sarudu yang memiliki status daya dukung air yang telah terlampaui pada kisaran 36-40 persen dari total luas masing-masing kecamatan tersebut. Hal tersebut juga menjadi perhatian, bahwa permintaan air yang semakin meningkat diwaktu mendatang akan berdampak terhadap status daya dukung air.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.18 Peta D3TLH Air Kabupaten Pasangkayu



3.4. Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem merupakan suatu manfaat yang diperoleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh ekosistem. Mengacu pada *Millenium Ecosystem Assessment* (2005), jasa ekosistem dikelompokkan menjadi empat manfaat secara garis besar yaitu manfaat penyediaan (*provisioning*) produksi pangan dan, manfaat pengaturan (*regulating*), manfaat pendukung (*supporting*), dan manfaat kultural (*cultural*). Diasumsikan semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kajian jasa ekosistem untuk mendeskripsikan kinerja layanan atau fungsi ekosistem dan manfaat bagi manusia yaitu:

- Layanan/fungsi penyedia (*provisioning services*): Ekosistem memberikan jasa/produk darinya, seperti misalnya sumber daya alam, sumber daya genetika, air.
- Layanan/fungsi pengatur (*regulating services*): Ekosistem memberikan manfaat melalui pengaturan proses alam, seperti misalnya pengendalian banjir, pengendalian erosi, dan pengaturan iklim.
- Layanan/fungsi budaya (*cultural services*): Ekosistem memberikan manfaat non material yang memperkaya kehidupan manusia, seperti misalnya pengkayaan perasaan dan nilai spiritual, pengembangan tradisi dan adat istiadat, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
- Layanan/fungsi pendukung kehidupan (*supporting services*): Ekosistem menyediakan dan/atau mendukung pembentukan faktor produksi primer yang diperlukan makhluk hidup, seperti misalnya produksi biomassa, produksi oksigen, nutrisi, dan air.

3.4.1. Jasa Lingkungan Penyediaan (Provisioning)

Jasa lingkungan penyediaan adalah barang yang dihasilkan oleh ekosistem dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Jasa lingkungan penyediaan terdiri atas:



1. Fungsi Kinerja Lingkungan Penyediaan Pangan

Ekosistem yang memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati. Penyediaan pangan tersebut baik yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia sangat bervariasi mulai dari jenis tanaman pokok seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah-buahan. Selain itu terdapat juga pemenuhan kebutuhan protein masyarakat seperti ikan, daging, telur, susu dan sebagainya. Penyediaan pangan pun yang bersumber dari ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, hasil laut dan termasuk sumber pangan yang ada dari hutan. Adapun jasa ekosistem penyediaan pangan Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22 Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Pasangkayu

No.	Kecamatan	Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Bambaira	21,25	120,03	5.617,82	151,90	139,98	6.050,97
2	Bambalamotu	-	300,64	18.192,44	1.341,33	457,22	20.291,63
3	Baras	152,28	5.354,68	18.656,99	2.544,56	1.538,33	28.246,84
4	Bulu Taba	218,40	5.341,62	36.014,11	2.572,48	291,98	44.438,59
5	Dapurang	268,71	10.164,75	78.385,33	1.946,47	430,01	91.195,27
6	Duripoku	117,47	2.627,98	17.251,24	93,78	-	20.090,46
7	Lariang	83,93	2.772,01	507,32	3.328,91	1.209,49	7.901,67
9	Pasangkayu	244,81	6.640,33	15.015,16	5.062,44	427,25	27.389,99
8	Pedongga	68,06	534,94	3.855,46	3.893,74	357,47	8.709,67
10	Sarjo	-	114,07	3.317,84	41,06	307,86	3.780,84
11	Sarudu	165,57	4.539,31	3.957,57	1.026,58	159,34	9.848,37
12	Tikke Raya	130,24	10.103,94	4.611,46	7.784,05	1.698,66	24.328,35
Pasangkayu		1.470,71	48.614,30	205.382,77	29.787,30	7.017,58	292.272,66

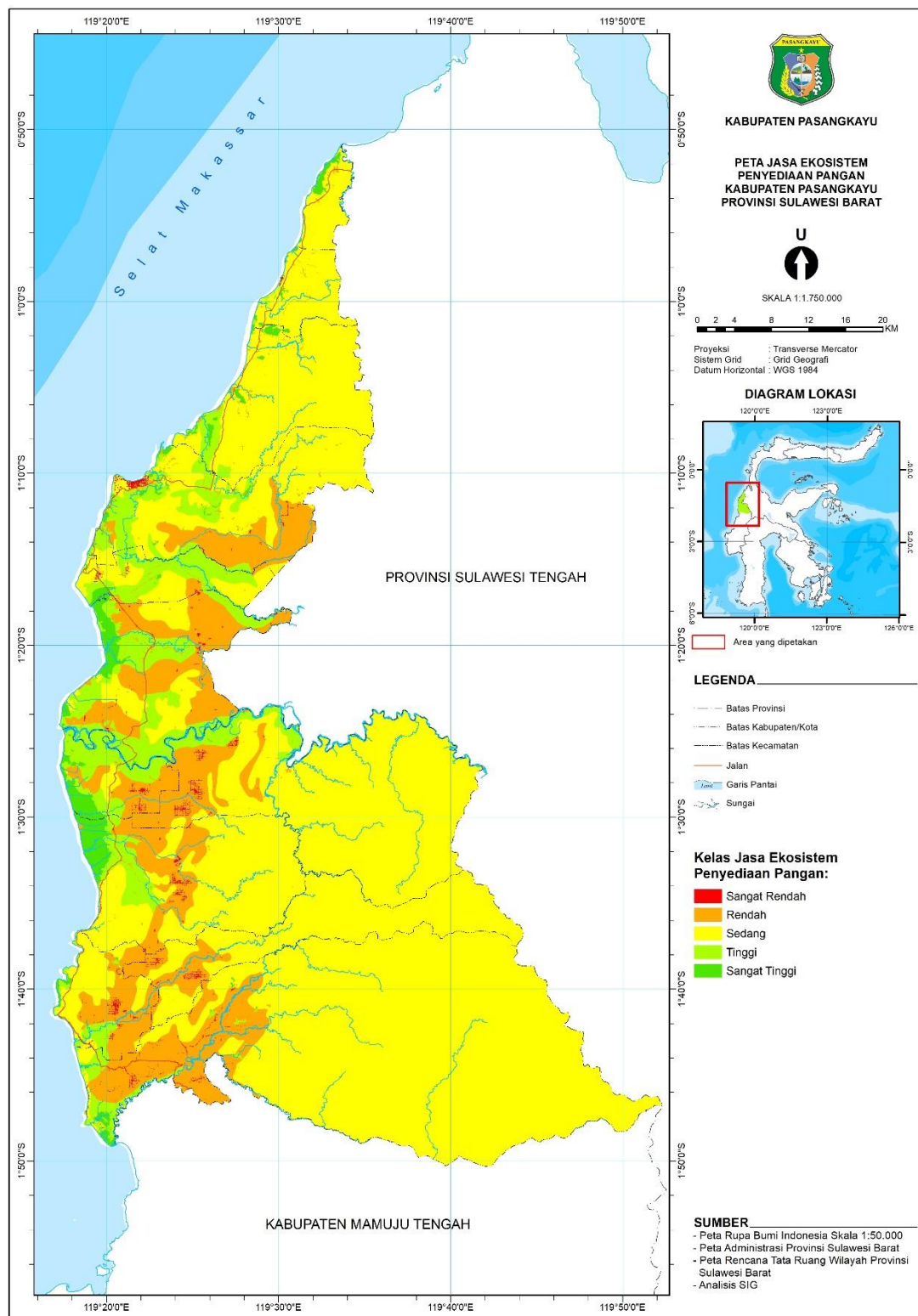
Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2020.



Berdasarkan Tabel 3.22, menunjukkan jasa ekosistem penyediaan pangan Kabupaten Pasangkayu. Jasa ekosistem penyediaan pangan Kabupaten Pasangkayu sangat rendah yaitu sebesar 12 persen yang tergolong tinggi, dan sangat tinggi. Bahkan di Kecamatan Duripoku hanya memiliki jasa pekosistem penyediaan pangan yang tergolong tinggi seluas 94,78 hektar dari total luas wilayahnya seluas 20 ribu hektar.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.19 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Pasangkayu



2. Fungsi Kinerja Lingkungan Penyediaan Air

Jasa ekosistem memberikan juga manfaat penyediaa air. Penyediaan air tersebut berasal dari air permukaan, air tanah sampai air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Jasa penyediaan air dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (*akuifer*) dan kondisi yang mempengaruhi air masuk dalam kerak bumi. Fokus jeasa ekosistem penyediaan air lebih meniti beratkan pada perkiraan air permukaan yang akan dimanfaatkan oleh aktivitas yang ada disekitarnya. Adapun jasa ekosistem penyediaan air Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23 Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Kabupaten Pasangkayu

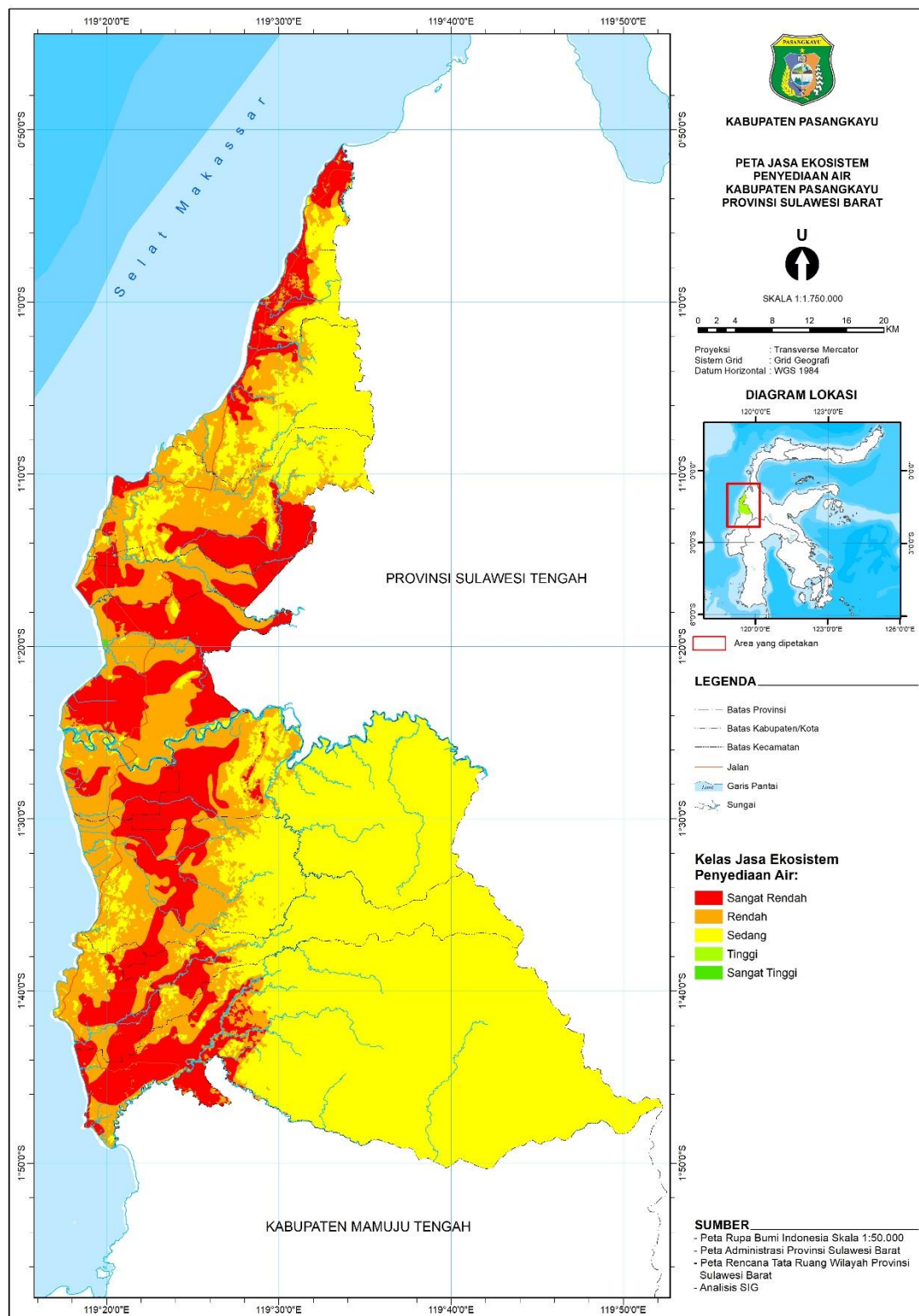
No.	Kecamatan	Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Air					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Bambaira	2.287,21	1.155,10	2.522,07	65,84	20,75	6.050,97
2	Bambalamotu	2.025,35	6.073,78	12.046,30	49,29	96,92	20.291,63
3	Baras	5.255,14	12.658,97	10.116,18	30,54	186,01	28.246,84
4	Bulu Taba	5.031,65	5.072,17	33.460,74	30,04	843,99	44.438,59
5	Dapurang	8.918,14	5.931,00	75.744,86	263,50	337,77	91.195,27
6	Duripoku	2.545,42	2.689,50	14.713,84	47,92	93,78	20.090,46
7	Lariang	2.913,82	4.511,75	242,76	13,67	219,67	7.901,67
9	Pasangkayu	6.985,08	10.592,72	9.598,04	65,84	148,31	27.389,99
8	Pedongga	3.601,13	4.738,01	252,90	8,26	109,37	8.709,67
10	Sarjo	1.695,83	776,02	1.276,45	29,02	3,51	3.780,84
11	Sarudu	4.678,09	4.368,56	748,07	35,51	18,14	9.848,37
12	Tikke Raya	13.236,35	9.643,09	866,09	82,70	500,12	24.328,35
Pasangkayu		59.173,21	68.210,65	161.588,31	722,15	2.578,34	292.272,66

Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.23, menunjukkan jasa ekosistem penyediaan air Kabupaten Pasangkayu. Jasa eksosistem penyedian air Kabupaten Pasangkayu sangat rendah yaitu sebesar satu persen yang tergolong tinggi, dan sangat tinggi. Persentase satu persen jasa eksosistem penyedian air tersebut yang tergolong tinggi, dan sangaat tinggi seluas 3.300,29 hektar dari total luas Kabupaten Pasangkayu sekitar 292 ribu hektar.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.20 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Kabupaten Pasangkayu



3.4.2. Jasa Lingkungan Pengaturan (Regulating)

Jasa ekosistem pengaturan adalah manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem melalui pengaturan yang dilakukan dari ekosistem. Manfaat kepada manusia melalui beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Kinerja Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

Kualitas udara merupakan salah satu bentuk pengaturan oleh ekosistem. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh faktor vegetasi alami berupa adanya hutan yang lebat untuk menyerap CO₂. Adapun jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24 Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara di Kabupaten Pasangkayu

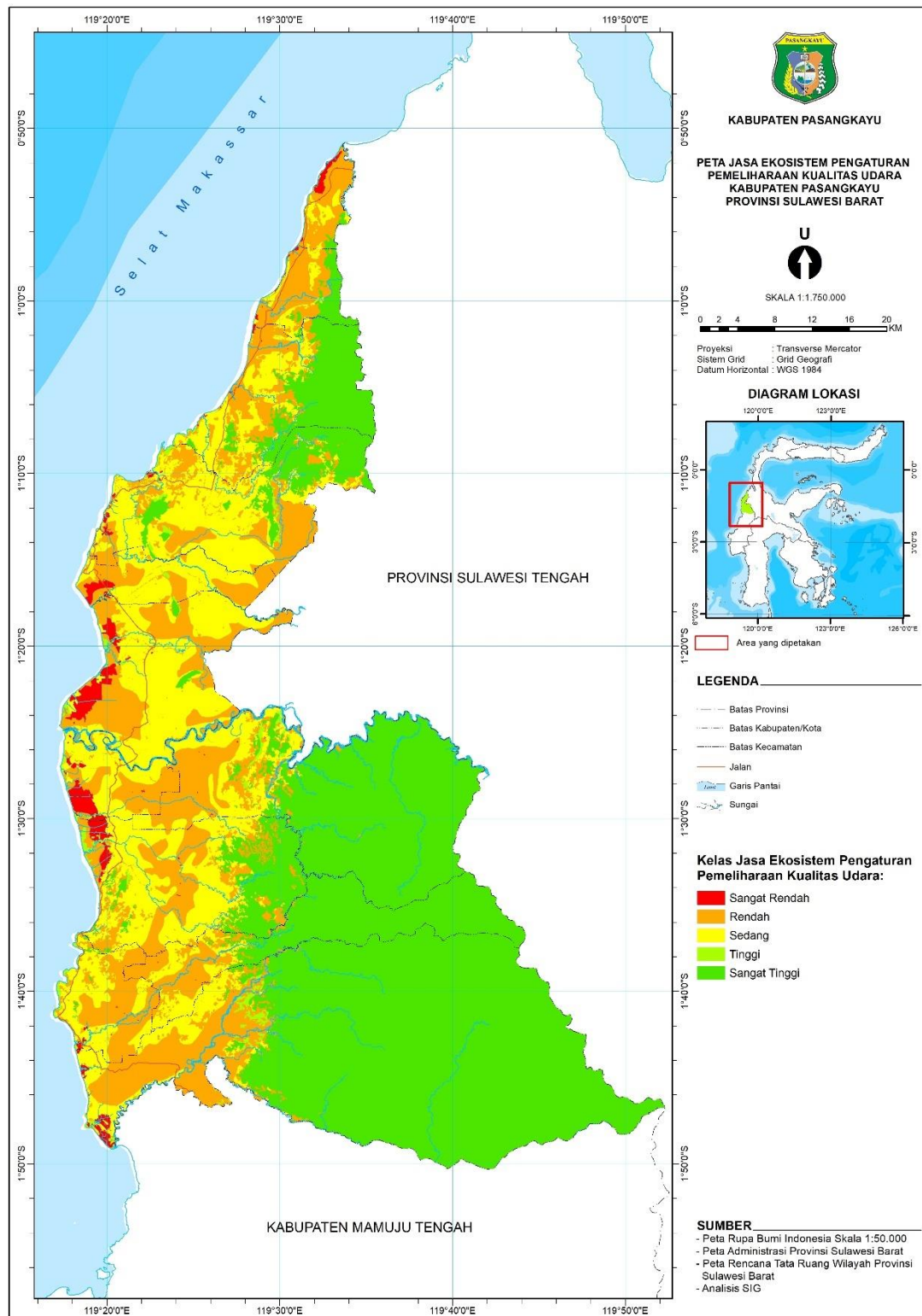
No.	Kecamatan	Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Bambaira	75,36	3.502,70	958,21	39,52	1.475,18	6.050,97
2	Bambalamotu	36,65	5.399,21	5.614,98	181,53	9.059,26	20.291,63
3	Baras	624,96	8.190,16	12.029,99	529,86	6.871,86	28.246,84
4	Bulu Taba	9,72	6.629,61	5.484,31	1.169,28	31.145,67	44.438,59
5	Dapurang	394,63	10.868,53	4.515,71	1.140,81	74.275,59	91.195,27
6	Duripoku	2,26	3.768,23	2.575,54	93,78	13.650,66	20.090,46
7	Lariang	870,61	3.032,51	3.626,74	371,81		7.901,67
9	Pasangkayu	179,16	7.761,25	12.599,94	581,35	6.268,29	27.389,99
8	Pedongga	325,36	3.433,51	4.737,23	203,98	9,60	8.709,67
10	Sarjo	276,16	2.603,09	668,20	3,51	229,88	3.780,84
11	Sarudu	67,28	5.202,66	4.213,67	262,62	102,13	9.848,37
12	Tikke Raya	1.383,20	8.528,82	13.405,18	744,50	266,64	24.328,35
Pasangkayu		4.245,35	68.920,29	70.429,70	5.322,55	143.354,76	292.272,66

Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.24, menunjukkan jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara Kabupaten Pasangkayu. Jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara yang tergolong tinggi, dan sangat tinggi sebagian dari total luas Kabupaten Pasangkayu. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi vegetasi berupa hutan yang sebagian besar ada di daerah dataran tinggi Kabupaten Pasangkayu. Pengaturan pemeliharaan kualitas udara yang tergolong sangat rendah berada disekitar padat pemukiman masyarakat.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.21 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Pasangkayu



2. Fungsi Kinerja Lingkungan Pengaturan Iklim

Jasa ekosistem secara alamiah memiliki fungsi akan pengaturan iklim, yang meliputi pola hujan, pengaturan suhu, kelembaban, angin, pengendalian gas rumah kaca. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat. Adapun jasa ekosistem pengaturan iklim Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25 Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Pasangkayu

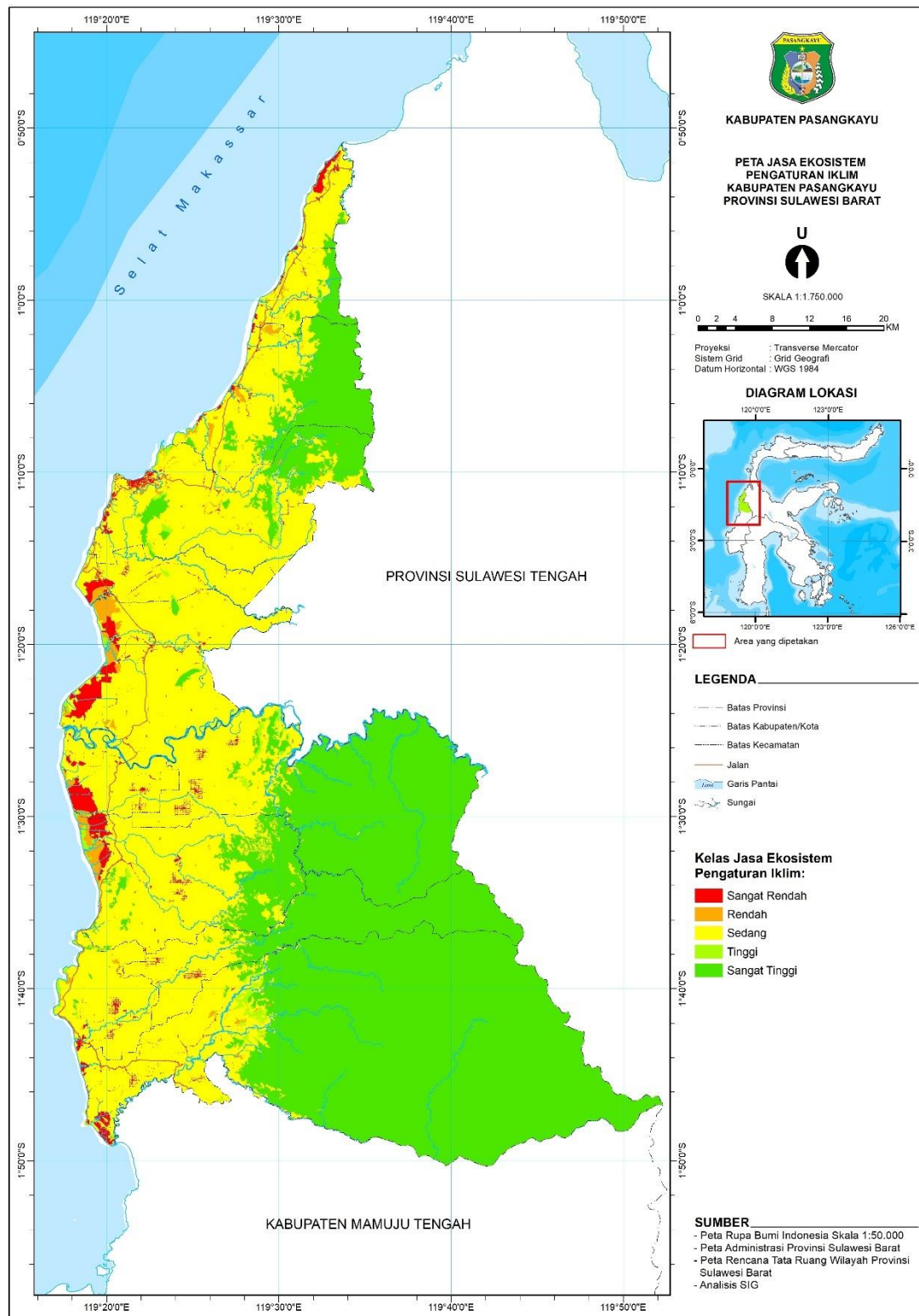
No.	Kecamatan	Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Bambaira	107,43	193,40	1.475,18	4.254,21	20,75	6.050,97
2	Bambalamotu	450,68	220,95	9.059,26	10.397,65	163,10	20.291,63
3	Baras	759,01	837,14	6.871,86	19.320,52	458,32	28.246,84
4	Bulu Taba	48,78	227,42	31.145,67	12.139,42	877,31	44.438,59
5	Dapurang	140,11	687,23	74.275,59	15.173,77	918,58	91.195,27
6	Duripoku	6,73	117,47	13.650,66	6.221,82	93,78	20.090,46
7	Lariang	155,25	994,75	-	6.671,49	80,17	7.901,67
9	Pasangkayu	364,99	595,26	6.268,29	19.661,29	500,16	27.389,99
8	Pedongga	233,59	462,39	9,60	7.911,75	92,34	8.709,67
10	Sarjo	42,76	379,17	229,88	3.125,51	3,51	3.780,84
11	Sarudu	210,30	243,69	102,13	9.088,63	203,62	9.848,37
12	Tikke Raya	1.021,10	1.598,02	266,64	21.205,89	236,70	24.328,35
Pasangkayu		3.540,73	6.556,87	143.354,76	135.171,95	3.648,34	292.272,66

Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.25, menunjukkan jasa ekosistem pengaturan iklim Kabupaten Pasangkayu. Jasa ekosistem pengaturan iklim yang tergolong tinggi, dan sangat tinggi sekitar 47 persen dari total luas Kabupaten Pasangkayu. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan pengaturan pemeliharaan udara yang dipengaruhi oleh kondisi vegetasi berupa hutan yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Keberadaan hutan akan sangat mengatur kondisi iklim pada suatu wilayah tertentu. Keradaan perkebunan, dan semak belukar yang cukup mendominasi di Kabupaten Pasangkayu, berada pada posisi sedang terhadap pengaturan iklim.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.22 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Pasangkayu



3. Fungsi Kinerja Lingkungan Pengaturan Pencegahan & Perlindungan Terhadap Bencana Longsor

Jasa ekosistem pengaturan mitigasi bencana longsor adalah ekosistem yang didalamnya mengandung unsur pengaturan pada kondisi alam untuk pencegahan dan perlindungan dari bencana tanah longsor. wilayah yang terdiri vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari longsor. Selain itu, bentuk lahan secara spesifik berdampak terhadap kejadian bencana longsor. Adapun jasa ekosistem pengaturan pencegahan, dan perlindungan terhadap bencana longsor Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26 Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Pasangkayu

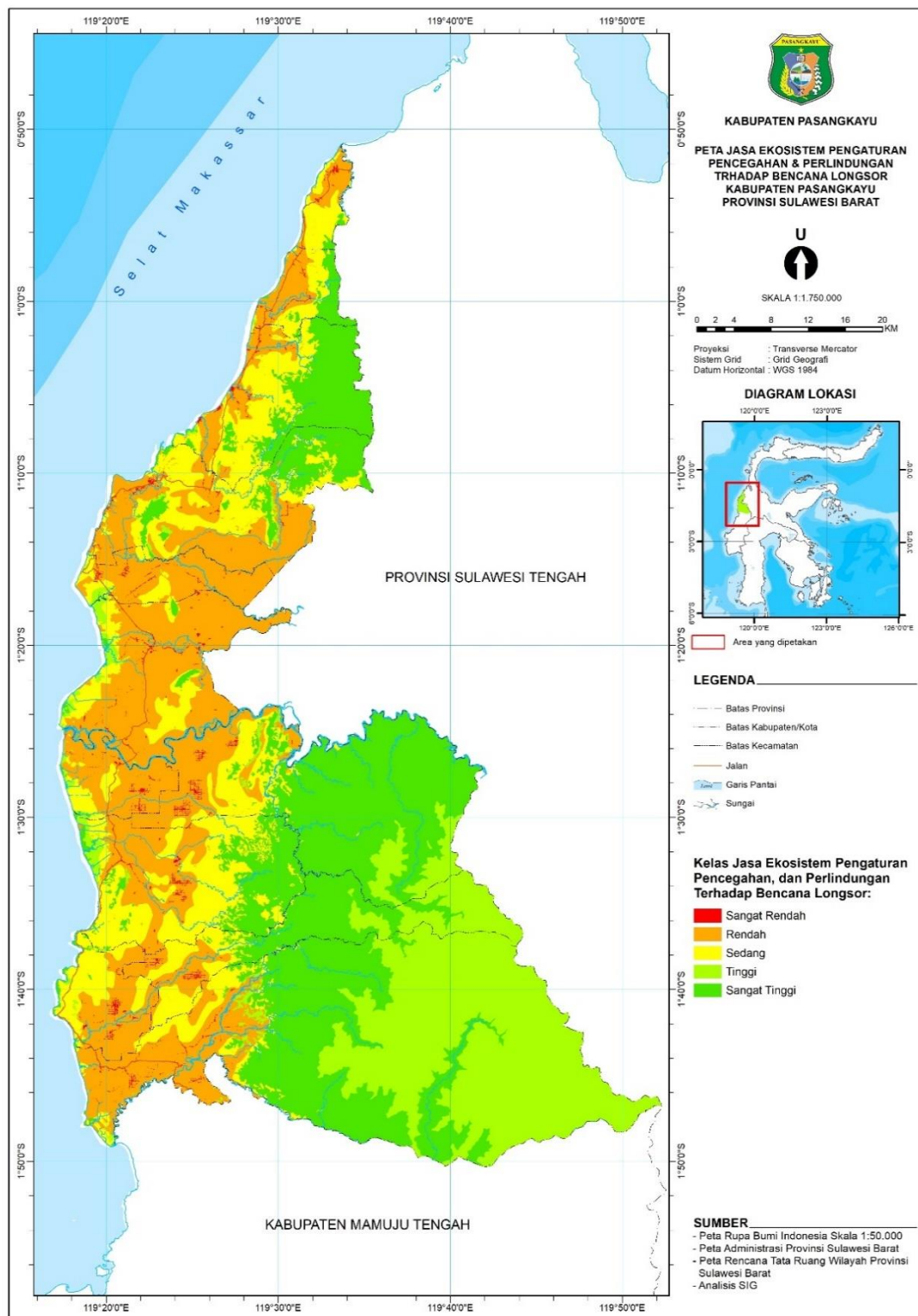
No.	Kecamatan	Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan Terhadap Bencana Longsor					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Bambaira	107,25	2.538,12	1.821,12	69,79	1.514,70	6.050,97
2	Bambalamotu	198,76	3.424,76	7.324,63	139,88	9.203,61	20.291,63
3	Baras	228,55	7.629,60	12.369,55	762,59	7.256,55	28.246,84
4	Bulu Taba	225,31	7.029,89	4.838,40	4.483,68	27.861,31	44.438,59
5	Dapurang	271,57	11.456,91	3.795,77	47.870,45	27.800,57	91.195,27
6	Duripoku	117,47	2.627,98	3.552,66	5.942,18	7.850,18	20.090,46
7	Lariang	142,72	5.864,23	1.372,03	442,51	80,17	7.901,67
9	Pasangkayu	236,20	11.680,47	8.536,25	476,78	6.460,29	27.389,99
8	Pedongga	147,76	6.884,56	1.318,32	311,44	47,58	8.709,67
10	Sarjo	110,64	1.452,68	1.945,75	38,37	233,40	3.780,84
11	Sarudu	173,65	5.409,47	3.825,37	134,80	305,08	9.848,37
12	Tikke Raya	285,46	18.499,24	3.729,49	1.355,05	459,11	24.328,35
Pasangkayu		2.245,35	84.497,90	54.429,34	62.027,54	89.072,54	292.272,66

Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.26, menunjukkan jasa ekosistem pengaturan pencegahan, dan perlindungan terhadap bencana longsor Kabupaten Pasangkayu. Jasa ekosistem pengaturan pencegahan, dan perlindungan terhadap bencana longsor yang tergolong tinggi, dan sangat tinggi sekitar 51 persen dari total luas Kabupaten Pasangkayu. Hal tersebut sebagian besar dipengaruhi dengan adanya vegetasi hutan yang lebih mengikat tanah oleh perakaran hutan. Sedangkan tergolong rendah merupakan kombinasi vegetasi yang kurang mengikat tanah, dan perbukitan aluvial.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.23 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan Terhadap Bencana Longsor Kabupaten Pasangkayu



4. Fungsi Kinerja Lingkungan Pengaturan Pencegahan & Perlindungan Terhadap Bencana Banjir

Fungsi jasa ekosistem juga mengandung unsur pengaturan untuk pencegahan dan perlindungan bencana banjir. Wilayah yang memiliki kondisi bentang lahan daratan aluvial, dan kurangnya vegetasi sebagai daerah resapan akan lebih mudah terdampak banjir. Daerah bervegetasi yang rapat dapat mencegah aliran permukaan yang kemudian menjadi banjir daerah hilir. Adapun jasa ekosistem pengaturan pencegahan, dan perlindungan terhadap bencana banjir Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27 Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan, dan Perlindungan Terhadap Bencana Banjir di Kabupaten Pasangkayu

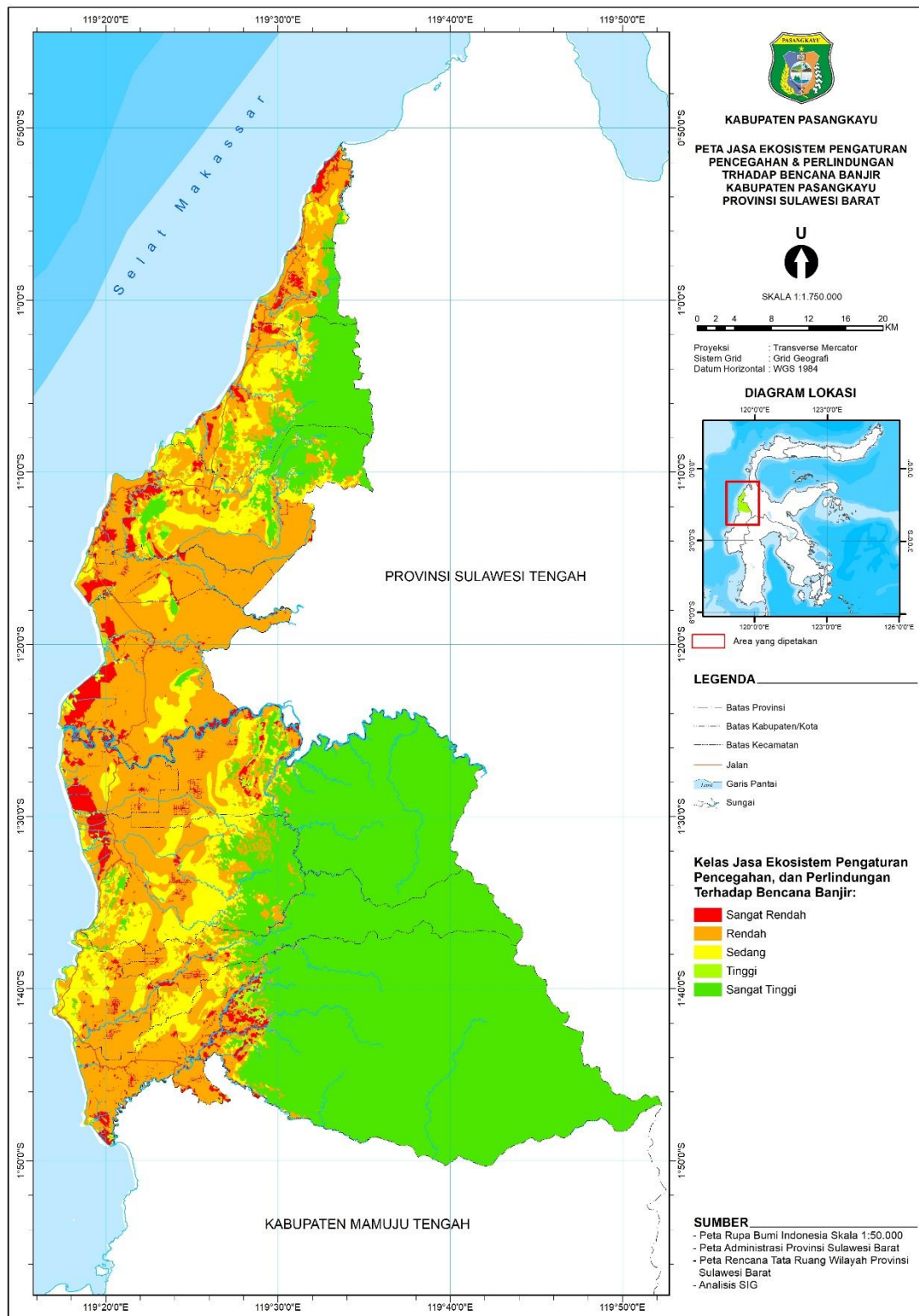
No.	Kecamatan	Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Banjir					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Bambaira	528,17	3.228,99	732,04	65,84	1.495,94	6.050,97
2	Bambalamotu	604,16	5.919,89	4.481,51	144,30	9.141,77	20.291,63
3	Baras	981,58	11.310,36	8.796,47	163,57	6.994,86	28.246,84
4	Bulu Taba	776,80	8.184,23	3.132,57	647,31	31.697,69	44.438,59
5	Dapurang	2.231,97	11.218,46	2.184,58	1.051,70	74.508,56	91.195,27
6	Duripoku	312,32	3.522,02	2.463,76	47,92	13.744,44	20.090,46
7	Lariang	1.248,87	5.781,83	637,63	233,34	-	7.901,67
9	Pasangkayu	1.504,19	13.342,64	5.714,57	492,65	6.335,94	27.389,99
8	Pedongga	689,23	6.968,45	874,21	161,51	16,27	8.709,67
10	Sarjo	520,29	2.358,96	639,18	29,02	233,40	3.780,84
11	Sarudu	335,24	6.045,57	3.219,23	145,67	102,66	9.848,37
12	Tikke Raya	2.555,15	18.602,40	2.287,04	616,82	266,93	24.328,35
Pasangkayu		12.287,98	96.483,79	35.162,79	3.799,66	144.538,44	292.272,66

Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.27, menunjukkan jasa ekosistem pengaturan pencegahan, dan perlindungan terhadap bencana banjir Kabupaten Pasangkayu. Jasa ekosistem pengaturan pencegahan, dan perlindungan terhadap bencana banjir yang tergolong sangat tinggi sekitar 50 persen dari luas Kabupaten Pasangkayu. Hal tersebut merupakan kombinasi wilayah bervegetasi hutan, dan wilayah berbukitan. Wilayah tergolong rendah merupakan wilayah daratan aluvial yang sering terjadi banjir yang diperparah dengan kondisi vegetasi berupa perkebunan di wilayah tersebut.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.24 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pecegahan & Perlindungan Terhadap Bencana Banjir Kabupaten Pasangkayu



5. Fungsi Kinerja Lingkungan Pengaturan Pencegahan & Perlindungan Terhadap Bencana Kebakaran

Kinerja jasa pengaturan juga meliputi pencegahan dan perlindungan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Indikator yang paling mencegah terjadinya bencana kebakaran berupa kondisi vegetasi berupa hutan alami, dan bentang lahan seperti perbukitan yang merepresentatifkan kurangnya aktivitas masyarakat. Adapun jasa ekosistem pengaturan pencegahan, dan perlindungan terhadap bencana kebakaran Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28 Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan, dan Perlindungan Terhadap Bencana Kebakaran di Kabupaten Pasangkayu

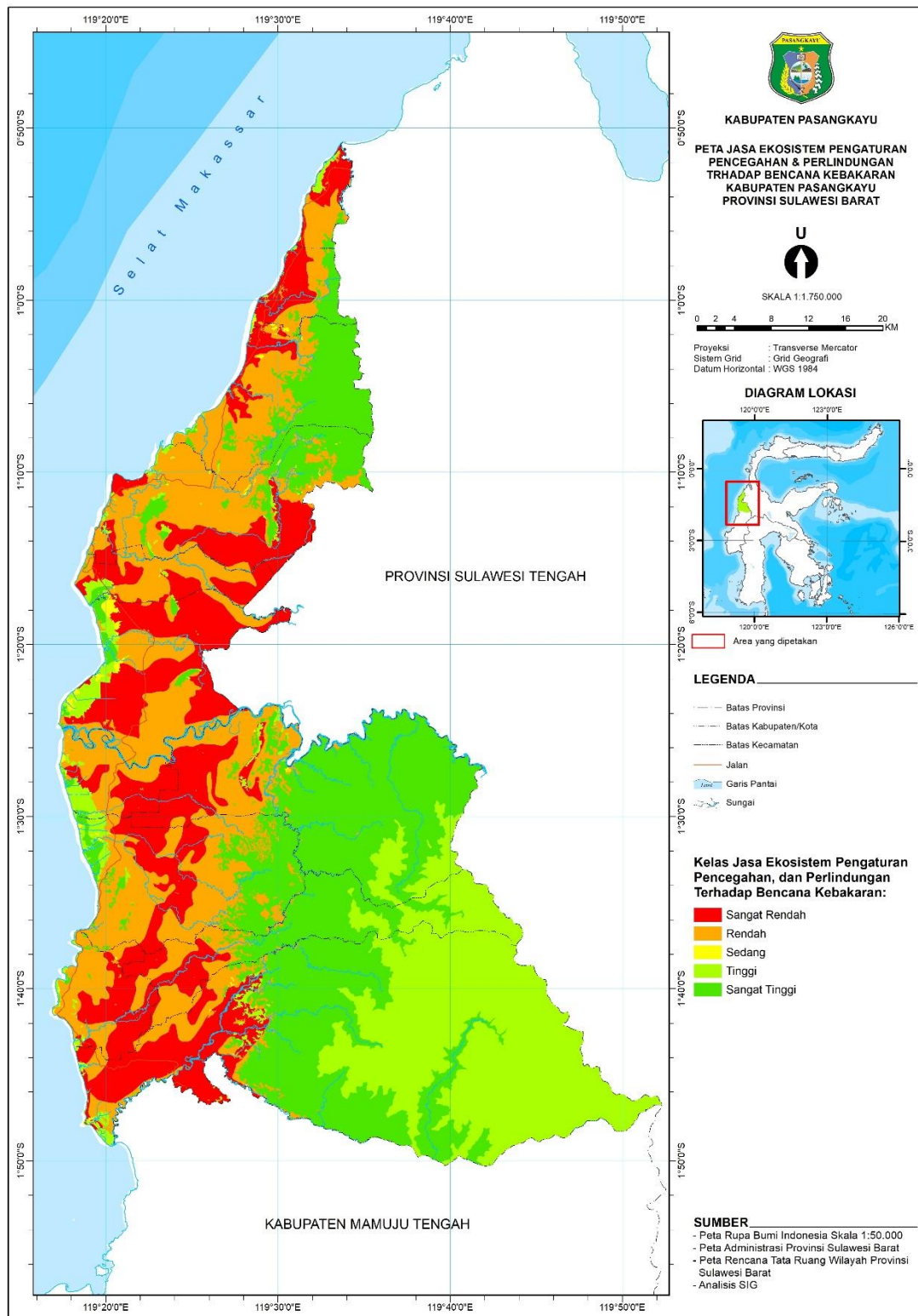
No.	Kecamatan	Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Kebakaran					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Bambaira	2.527,48	1.851,08	45,73	130,74	1.495,94	6.050,97
2	Bambalamotu	2.040,50	8.811,54	87,18	152,07	9.200,34	20.291,63
3	Baras	5.262,88	14.309,56	79,58	943,14	7.651,68	28.246,84
4	Bulu Taba	5.290,41	6.776,56	26,62	4.191,71	28.153,28	44.438,59
5	Dapurang	10.200,42	4.890,33	155,40	48.134,52	27.814,60	91.195,27
6	Duripoku	2.736,45	3.561,65	-	5.942,18	7.850,18	20.090,46
7	Lariang	2.767,99	3.752,80	90,81	942,05	348,02	7.901,67
9	Pasangkayu	7.076,00	13.087,75	133,30	642,67	6.450,26	27.389,99
8	Pedongga	3.365,80	4.604,59	34,00	401,20	304,08	8.709,67
10	Sarjo	1.513,76	1.726,67	8,64	297,56	234,22	3.780,84
11	Sarudu	4.677,31	4.661,52	83,75	298,01	127,77	9.848,37
12	Tikke Raya	12.172,28	8.618,01	618,21	1.608,34	1.311,52	24.328,35
Pasangkayu		59.631,28	76.652,07	1.363,24	63.684,20	90.941,87	292.272,66

Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.28, menunjukkan jasa ekosistem pengaturan pencegahan, dan perlindungan terhadap bencana kebakaran Kabupaten Pasangkayu. Jasa ekosistem pengaturan pencegahan, dan perlindungan terhadap bencana banjir yang tergolong tinggi, dan sangat tinggi sekitar 53 persen. Hal tersebut merupakan kombinasi wilayah bervegetasi hutan, dan wilayah berbukitan yang menandai kurangnya aktivitas masyarakat. Wilayah tergolong rendah merupakan adanya aktivitas masyarakat yang ditandai dengan vegetasi berupa perkebunan.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.25 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pecegahan & Perlindungan Terhadap Bencana Kebakaran Kabupaten Pasangkayu



6. Fungsi Kinerja Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air

Jasa ekosistem juga berfungsi sebagai pengaturan tata aliran air. Tata aliran air erat kaitannya dengan siklus hidrologi yang berdampak pada pengaturan penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata aliran air sebagai jasa ekosistem sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan bentuk lahan pada suatu wilayah. Adapun jasa ekosistem pengaturan tata aliran air Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29 Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air di Kabupaten Pasangkayu

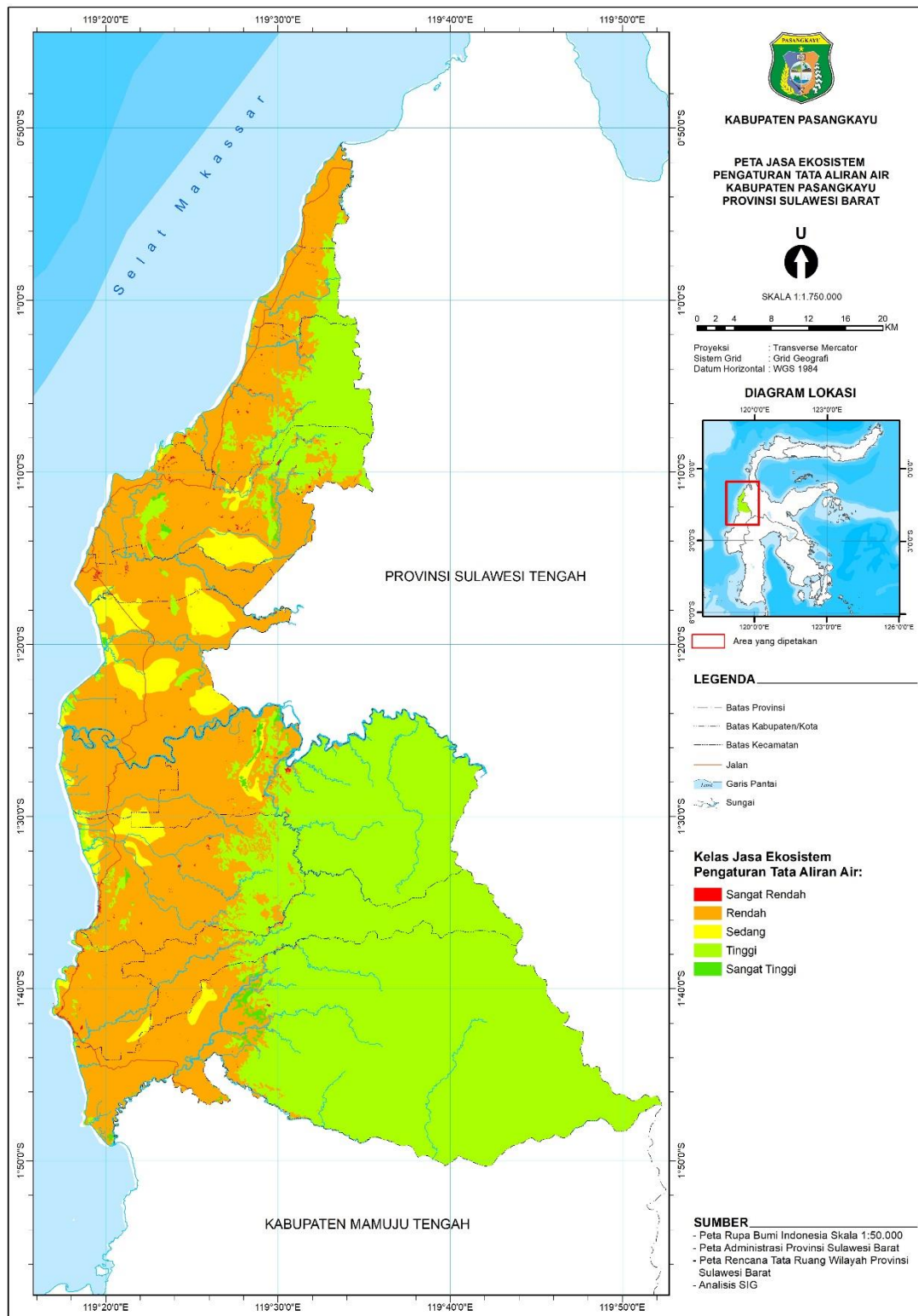
No.	Kecamatan	Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Bambaira	12,78	4.453,70	-	1.518,65	65,84	6.050,97
2	Bambalamotu	101,88	10.888,68	1,74	9.216,87	82,46	20.291,63
3	Baras	124,85	19.036,35	1.660,32	7.265,09	160,24	28.246,84
4	Bulu Taba	47,71	11.123,29	922,59	31.697,69	647,31	44.438,59
5	Dapurang	16,52	14.967,51	540,23	74.621,53	1.049,49	91.195,27
6	Duripoku	6,73	6.252,57	38,79	13.744,44	47,92	20.090,46
7	Lariang	20,75	7.181,60	304,98	161,00	233,34	7.901,67
9	Pasangkayu	199,98	17.795,28	2.491,33	6.451,87	451,53	27.389,99
8	Pedongga	79,52	7.868,15	543,31	104,80	113,89	8.709,67
10	Sarjo	3,43	3.506,46	-	241,92	29,02	3.780,84
11	Sarudu	117,32	9.006,51	331,20	337,18	56,16	9.848,37
12	Tikke Raya	16,16	16.680,21	6.346,86	686,99	598,13	24.328,35
Pasangkayu		747,63	128.760,31	13.181,35	146.048,03	3.535,34	292.272,66

Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.29, menunjukkan jasa ekosistem pengaturan tata aliran Kabupaten Pasangkayu. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran yang tergolong tinggi sekitar 51 persen dari total luasan Kabupaten Pasangkayu. Hal tersebut terjadi karena pengaruh oleh kondisi vegetasi hutan berupa hutan, namun kondisi terlalu baik karena hutan bertepatan dengan kondisi perbukitan yang akan mempercepat aliran permukaan. Tata aliran air tergolong rendah karena sebagian besar wilayah terdapat vegetasi perkebunan, walaupun kondisi terbelah dataran untuk memperlambat aliran permukaan.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.26 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air Kabupaten Pasangkayu



7. Fungsi Kinerja Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah

Ekosistem yang memiliki kemampuan untuk “membersihkan” pencemar melalui proses-proses kimia fisik biologi yang berlangsung secara alami. Kemampuan pemurnian air secara alami (*self purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat. Adapun jasa ekosistem pengaturan pemurnian air dan pengolahan limbah Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30 Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air, dan Pengolahan Limbah di Kabupaten Pasangkayu

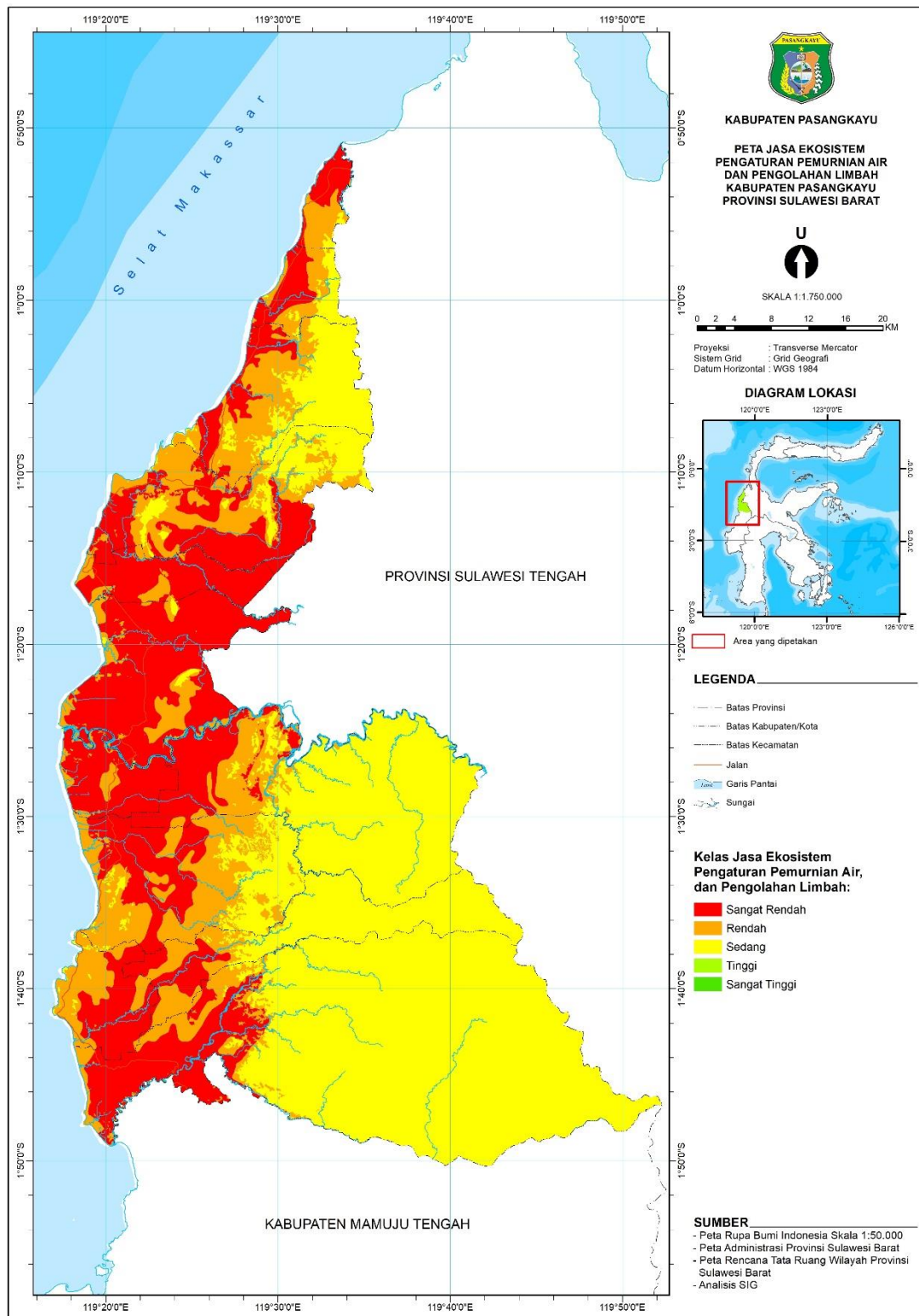
No.	Kecamatan	Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Bambaira	2.420,18	2.117,76	1.492,28	20,75	-	6.050,97
2	Bambalamotu	3.514,06	7.559,55	9.135,51	82,51	-	20.291,63
3	Baras	8.202,88	12.975,84	6.945,12	123,00	-	28.246,84
4	Bulu Taba	6.697,60	5.751,32	31.437,65	552,02	-	44.438,59
5	Dapurang	11.302,75	5.270,28	74.387,07	235,18	-	91.195,27
6	Duripoku	2.738,06	3.607,97	13.650,66	93,78	-	20.090,46
7	Lariang	6.643,55	1.038,45	219,67	-	-	7.901,67
9	Pasangkayu	11.345,38	9.573,51	6.404,78	66,31	-	27.389,99
8	Pedongga	7.272,73	1.314,17	116,10	6,67	-	8.709,67
10	Sarjo	1.828,43	1.719,02	229,88	3,51	-	3.780,84
11	Sarudu	5.284,76	4.317,79	243,95	1,87	-	9.848,37
12	Tikke Raya	19.995,37	3.562,57	770,12	0,29	-	24.328,35
Pasangkayu		87.245,74	58.808,23	145.032,79	1.185,89	-	292.272,66

Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.30, menunjukkan jasa ekosistem pengaturan pemurnian air, dan pengolahan limbah Kabupaten Pasangkayu. Jasa ekosistem pengaturan pengaturan pemurnian air, dan pengolahan limbah yang tergolong tinggi sangat rendah. Total luasan Kabupaten Pasangkayu seluas 292 ribu hektar, namun pengaturan pengaturan pemurnian air, dan pengolahan limbah hanya seluas seribu hektar lebih atau sekitar 0,5 persen.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.27 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air, dan Pengolahan Limbah Kabupaten Pasangkayu



3.4.3. Jasa Lingkungan Pendukung (Supporting)

Jasa ekosistem pendukung (*supporting*) adalah fungsi jasa ekosistem yang diperlukan untuk menghasilkan layanan-layanan ekosistem lainnya. Salah satu jenis fungsi ekosistem yang dikaji dalam kelompok jasa lingkungan pendukung ini yaitu jasa pendukung habitat dan keanekaragaman hayati. Jasa ekosistem tersebut mendukung dalam menghasilkan jasa-jasa ekosistem dari dua kelompok jasa lingkungan pengatur dan penyedia yang telah dideskripsikan sebelumnya.

1. Fungsi Kinerja Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati

Hakikat fungsi-fungsi dari sebuah ekosistem secara umum memberikan jasa keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya berupa daratan, lautan dan ekosistem akuatik lainnya serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. mencakup keanekaragaman yang dimaksud dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter habitat keanekaragaman hayati suatu wilayah, maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap keberlangsungan perikehidupan.

Jasa ekosistem pendukung habitat, dan keanekaragaman hayati sangat dipengaruhi oleh kondisi vegetasi terutama vegetasi berhutan. Kondisi vegetasi yang sangat beradam akan memberikan hubungan yang lebih antara spesies flora, dan fauna. Selain itu, kondisi bentang lahan berupa perbukitan dengan formasi yang berada disekitar Taman Nasional Gandang Dewata dari sebelah selatan, dan Tamana Nasional Lore Lindu dari arah timur Kabupaten Pasangkayu. Adapun jasa ekosistem pendukung habitat, dan keanekaragaman hayati Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.31. dan Gambar 3.28.



Tabel 3.31 Kelas Jasa Ekosistem Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Pasangkayu

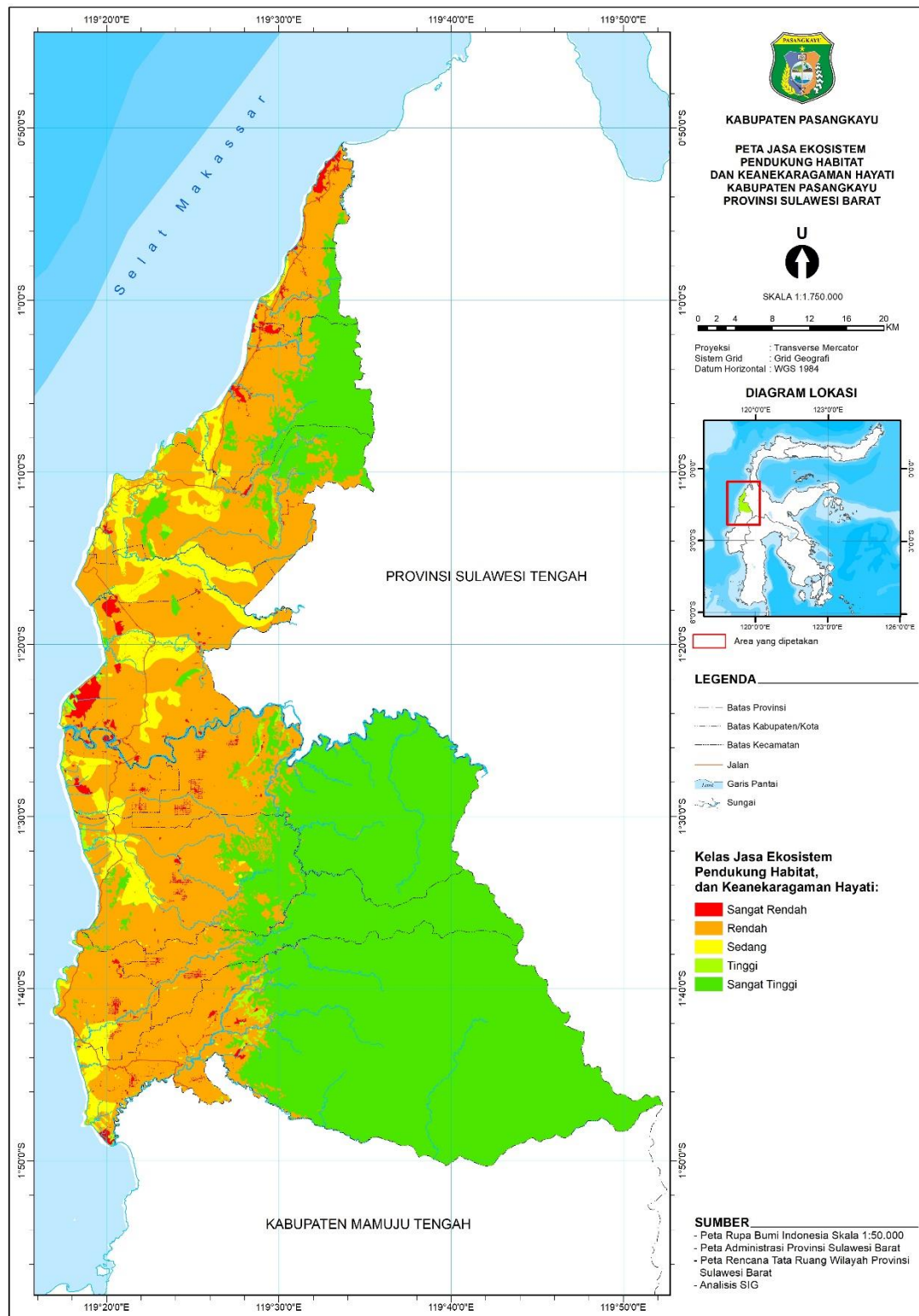
No.	Kecamatan	Kelas Jasa Ekosistem Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Bambaira	229,14	4.023,88	213,47	71,45	1.513,03	6.050,97
2	Bambalamotu	378,04	9.496,31	1.117,95	124,40	9.174,93	20.291,63
3	Baras	162,21	18.134,16	2.525,14	300,77	7.124,56	28.246,84
4	Bulu Taba	258,47	11.835,13	-	647,31	31.697,69	44.438,59
5	Dapurang	530,14	13.566,89	1.427,23	1.139,33	74.531,69	91.195,27
6	Duripoku	117,47	6.152,71	27,92	47,92	13.744,44	20.090,46
7	Lariang	323,83	6.022,41	1.161,08	372,81	21,53	7.901,67
9	Pasangkayu	142,88	16.111,02	4.232,68	402,88	6.500,53	27.389,99
8	Pedongga	15,47	4.968,86	3.506,65	46,32	172,37	8.709,67
10	Sarjo	425,02	3.084,87	-	37,55	233,40	3.780,84
11	Sarudu	192,16	8.330,24	932,62	266,16	127,19	9.848,37
12	Tikke Raya	1.571,58	17.300,64	4.171,01	864,95	420,17	24.328,35
Pasangkayu		4.346,40	119.027,13	19.315,76	4.321,84	145.261,52	292.272,66

Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.31, menunjukkan jasa ekosistem pendukung habitat, dan keanekaragaman hayati Kabupaten Pasangkayu. Jasa ekosistem pendukung habitat, dan keanekaragaman hayati yang tergolong tinggi dan sangat tinggi sekitar 51 persen dari total luasan Kabupaten Pasangkayu. Hal tersebut terjadi karena pengaruh oleh kondisi vegetasi berupa hutan, dan kondisi bentang lahan berupa perbukitan latimojong, serta perbukitan lariang. Jasa ekosistem pendukung habitat, dan keanekaragaman hayati yang tergolong rendah dipengaruhi oleh vegetasi perkebunan kelapa sawit yang sangat homogen, dan dataran aluvial.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 3.28 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Habitat, dan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Pasangkayu



BAB 4. CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Untuk melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015, disepakati bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi agenda pembangunan global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. TPB merupakan kesepakatan global tentang pembangunan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind”.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

- 1) Tanpa Kemiskinan
- 2) Tanpa Kelaparan
- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4) Pendidikan Berkualitas
- 5) Kesetaraan Gender
- 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau
- 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur



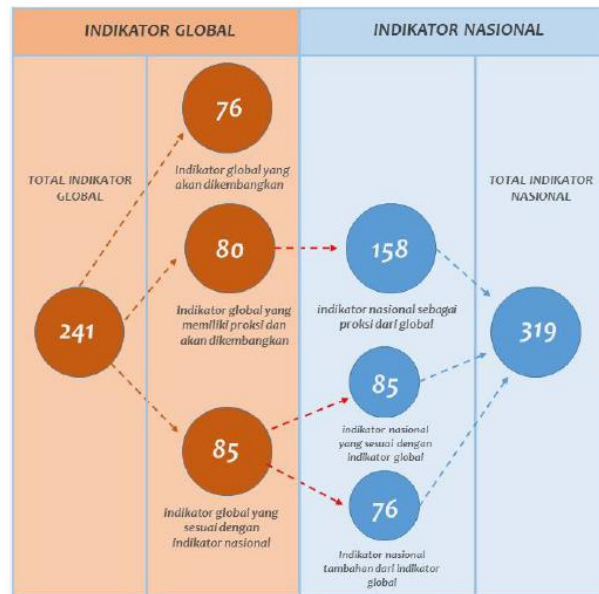
- 10) Berkurangnya Kesenjangan
- 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- 13) Penanganan Perubahan Iklim
- 14) Ekosistem Lautan
- 15) Ekosistem Daratan
- 16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB sebagai penyempurnaan dari konsep sebelumnya jauh lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan.

Dalam pencapaian TPB secara global terdapat 241 indikator yang kemudian diterjemahkan dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, hingga terdapat total 319 indikator yang menjadi tolok ukur ketercapaian TPB di Indonesia. Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dari 94 target/sasaran global dan 17 goals. Dari 319 indikator TPB Indonesia 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu dan 298 indikator bersifat umum, sehingga setiap daerah memiliki jumlah indikator yang berbeda sesuai dengan kewenangan dan kondisi wilayahnya.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Gambar 4.1 Internalisasi TPB Global ke TPB Indonesia

Setiap wilayah administrasi memiliki tanggung jawab untuk melakukan analisis TPB dengan jumlah indikator yang berbeda. Apabila ditelaah lebih lanjut berdasarkan pembagian kewenangannya antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusat memiliki kewenangan terhadap 303 indikator, pemerintah provinsi 235 indikator, pemerintah kabupaten 220 indikator, dan pemerintah kota 222 indikator. Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut terdapat 220 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Pasangkayu. Dari 220 indikator tersebut, kemudian dikaji lebih lanjut lagi untuk melihat capaian indikator TPB Kabupaten Pasangkayu. Penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB dilakukan dengan mengelompokkan indikator TPB berdasarkan kategori analisis data yang terbagi atas 4 (empat) kategori yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB)
3. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB)
4. Indikator TPB yang tidak memiliki data (TAD)

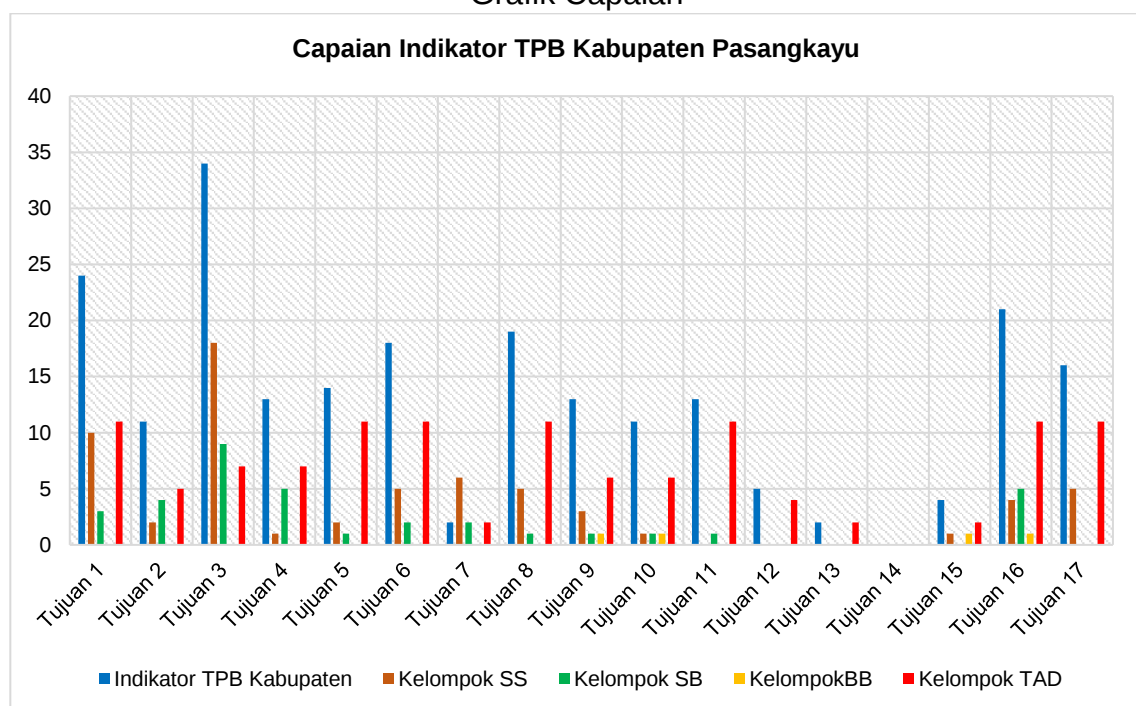
Pengelompokkan indikator ini didasarkan pada tingkat capaian Indikator terhadap target yang telah ditentukan. Pengelompokkan indikator ini dilakukan untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang dipilih menjadi isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator yang



dianalisis lebih lanjut dan menjadi isu strategis adalah indikator-indikator yang masuk dalam indikator TPB kelompok SB, karena diharapkan melalui masukan dalam rancangan RPJMD, indikator-indikator TPB yang belum mencapai target ini dapat diakomodir kedalam kebijakan, rencana dan program yang dapat merealisasikan capaian indikator tersebut.

Adapun capaian dan hasil pengelompokkan indikator di Kabupaten Pasangkayu dari 220 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Grafik Capaian



Gambar 4.2 Pengelompokan Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Pasangkayu

Tabel 4.1 Capaian Indikator TPB Kabupaten Pasangkayu

No	Kriteria	Jumlah Indikator	Persentase
1	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)	63	28,64%
2	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB)	35	15,91%
3	Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB)	4	1,82%



4	Indikator TPB yang tidak memiliki data (TAD)	118	53,64%
Total Indikator		220	100,00%

Sumber: Hasil Analisis, 2020.

Kabupaten Pasangkayu telah melaksanakan indikator TPB sebanyak 98 indikator atau 44,55% dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten yang meliputi kelompok indikator yang masuk dalam Kelompok SS dan SB. Sementara untuk indikator yang belum dilaksanakan yaitu Kelompok BB dan TAD adalah sebanyak 118 indikator atau 53,64%. Secara rinci capaian indikator TPB di Kabupaten Pasangkayu diuraikan sebagai berikut berikut.

Tabel 4.2 Jumlah Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Indikator yang Tidak Memiliki Data pada Setiap Tujuan TPB

No	Tujuan TPB	Indikator Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target	Indikator Yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target	Total Indikator Yang Sudah Dilaksanakan
1	Tanpa Kemiskinan	10	3	13
2	Tanpa Kelaparan	2	4	6
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	18	9	27
4	Pendidikan Berkualitas	1	5	6
5	Kesetaraan Gender	2	1	3
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	5	2	7
7	Energi Bersih dan Terjangkau	6	2	8
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	5	1	6
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	3	1	4
10	Berkurangnya Kesenjangan	1	1	2
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	0	1	1
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	0	0
13	Penanganan Perubahan Iklim	0	0	0
14	Ekosistem Lautan	0	0	0
15	Ekosistem Daratan	1	0	1



No	Tujuan TPB	Indikator Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target	Indikator Yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target	Total Indikator Yang Sudah Dilaksanakan
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	4	5	9
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	5	0	5
Total		63	35	98

Tabel 4.3 Jumlah Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Indikator yang Tidak Memiliki Data pada Setiap Tujuan TPB

No	Tujuan TPB	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai Target	Indikator yang tidak memiliki data	Indikator yang Belum Dilaksanakan
1	Tanpa Kemiskinan	0	11	11
2	Tanpa Kelaparan	0	5	5
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	0	7	7
4	Pendidikan Berkualitas	0	7	7
5	Kesetaraan Gender	0	11	11
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	0	11	11
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	2	2
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	0	11	11
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	1	6	7
10	Berkurangnya Kesenjangan	1	6	7
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	0	11	11
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	4	4
13	Penanganan Perubahan Iklim	0	2	2
14	Ekosistem Lautan	0	0	0
15	Ekosistem Daratan	1	2	3
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	1	11	12
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	0	11	11



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

No	Tujuan TPB	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai Target	Indikator yang tidak memiliki data	Indikator yang Belum Dilaksanakan
Total		4	118	122



4.1. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target

Kabupaten Pasangkayu, telah melaksanakan indikator dalam kelompok SS sebanyak 63 indikator atau sebesar 28,64% yang tersebar pada 17 tujuan. Secara rinci indikator kelompok SS di Kabupaten Pasangkayu yang sudah dilaksanakan dalam setiap tujuan TPB diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.4 Indikator TPB pada Kelompok Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target di Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	Capaian					TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI PELAKSANA
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	SOSIAL		1,48	3,85			Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	SOSIAL	3,56	3,22	25,89	8,27		Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	Dinas Sosial



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	Capaian					TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI PELAKSANA
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	SOSIAL	81,50%	82,60%	73,71%	90%		Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%	Dinas Kesehatan
1	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	SOSIAL	78%	81%	70%	74%		Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.	Dinas Kesehatan
1	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	SOSIAL	100	100	100	0		Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	SOSIAL	17595 KK	18718 KK	19673 KK	20413 KK		Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	Capaian					TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI PELAKSANA
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	SOSIAL	93,59	91,25	95,33	0		Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	SOSIAL	66,99	70,59	84,77	0		Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	SOSIAL	81,83	72,71	83,87	0		Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	SOSIAL	100	100	100	100		Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019.	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam SETDA
2	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	SOSIAL	5,20%	3,00%	6,40%	4,70%		Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019	Dinas Kesehatan



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	Capaian					TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI PELAKSANA
				2016	2017	2018	2019	2020		
									menjadi 28% (2013: 32,9%).	
2	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	SOSIAL	84,29%	81,50%	73,70%	90,14%		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).	Dinas Kesehatan
3	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	SOSIAL	193	11	9	4		Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	Dinas Kesehatan
3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	SOSIAL	81,5	82,6	73,71	96,35		Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	Dinas Kesehatan
3	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	SOSIAL	7	84	13	7		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Kesehatan



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	Capaian					TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI PELAKSANA
				2016	2017	2018	2019	2020		
3	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	SOSIAL	22	64	50	40		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Kesehatan
3	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	SOSIAL	0,033	0,012	0,003	0,056		Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	Dinas Kesehatan
3	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	SOSIAL	0,53%	0,17%	0,05%	0,03%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Kesehatan
3	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	SOSIAL	70%	75%	95%	100%		Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	Dinas Kesehatan
3	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	SOSIAL		70%	85%	90%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Kesehatan



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	Capaian					TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI PELAKSANA
				2016	2017	2018	2019	2020		
3	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	SOSIAL	40	10	0	0		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Kesehatan
3	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	SOSIAL	8	8	9	10		Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20).	Dinas Kesehatan
3	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	SOSIAL	7	9	10	10		Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.	Dinas Kesehatan
3	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	SOSIAL		17045	8592	7903		Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	Dinas Kesehatan
3	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	SOSIAL				0,01%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Kesehatan
3	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	SOSIAL	15	15	15	15		Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang	Dinas Kesehatan



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	Capaian					TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI PELAKSANA
				2016	2017	2018	2019	2020		
									menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).	
3	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	SOSIAL	75,60%	65,31%	76,20%	76,20%		Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	SOSIAL	75,80%	65,30%	76,20%	68%		Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	SOSIAL	90%	90%	95%	98%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Kesehatan
3	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	SOSIAL	1	2	2	2		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Kesehatan
4	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	SOSIAL	100%	100%	109%	0		Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	Capaian					TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI PELAKSANA
				2016	2017	2018	2019	2020		
									menjadi 84,2% (2015:68,7%).	
5	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	SOSIAL	100%	100%	100%	100%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	SOSIAL	116,66	17,96	29,50	33,35		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	LINGKUNGAN	25%	30%	65%	88%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Kesehatan
6	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	LINGKUNGAN	67%	67%	71%	83%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Kesehatan
6	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	LINGKUNGAN	66,81%	89,78%	96,98%	94,37%		Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	Capaian					TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI PELAKSANA
				2016	2017	2018	2019	2020		
									pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota.	
6	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	LINGKUNGAN	100%	100%	100%	100%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	LINGKUNGAN	1	1	1	1		Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.	Dinas Lingkungan Hidup
8	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	EKONOMI	49.952,37	53.336,66	56.641,32	58.552,37		Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	EKONOMI	-	57,23%	57,78%	-		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	EKONOMI	100%	100%	75,77%	1098,19%		Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	Dinas Koperasi dan UMKM



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	Capaian					TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI PELAKSANA
				2016	2017	2018	2019	2020		
8	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	EKONOMI			14.404	15.010		Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	EKONOMI	17	21	28	30		Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
8	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	EKONOMI	61109	74524	91603	108163		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
9	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	EKONOMI	9	9	9	9		Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019.	Dinas Perhubungan
9	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	EKONOMI	25,43	26,66	25,93	26,12		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
9	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	EKONOMI	-	3,10%	3,84%	-		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	EKONOMI	116,66	17,96	29,50	33,35		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Komunikasi dan Informatika



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	Capaian					TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI PELAKSANA
				2016	2017	2018	2019	2020		
9	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	EKONOMI	116,66	17,96	29,50	33,35		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	EKONOMI	-	-	-	-		Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 80 kabupaten pada tahun 2019.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	EKONOMI	-	-	24	17		Berkurangnya Desa Tertinggal sebanyak 5.000 desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	EKONOMI	-	-	-	-		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	LINGKUNGAN	595 unit	400 unit	400 unit	709 unit		Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
15	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	LINGKUNGAN						Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019.	Dinas Lingkungan Hidup



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	Capaian					TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI PELAKSANA
				2016	2017	2018	2019	2020		
16	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	HUKUM & TATA KELOLA	1	4	1	1		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	HUKUM & TATA KELOLA	4	21	4	3		Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	HUKUM & TATA KELOLA	100	100	100	100		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Keuangan Daerah
16	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	HUKUM & TATA KELOLA	2	2	3	3		Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	EKONOMI	116,66	17,96	29,50	33,35		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	EKONOMI				92,88%		Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	Capaian					TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI PELAKSANA
				2016	2017	2018	2019	2020		
17	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	EKONOMI				73,33%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Pusat Statistik
17	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	EKONOMI		6114	4590	6934		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Pusat Statistik
17	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	EKONOMI				100		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Pusat Statistik

Sumber: Hasil Analisis, 2020.

4.2. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target

Kabupaten Pasangkayu, telah melaksanakan indikator dalam kelompok SB sebanyak 35 indikator atau sebesar 15,91% yang tersebar pada 17 tujuan. Secara rinci indikator kelompok SB di Kabupaten Pasangkayu yang sudah dilaksanakan dalam setiap tujuan TPB diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.5 Indikator TPB pada Kelompok Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target di Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET (PERPRES 59/2017)	Instansi Terkait
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	SOSIAL	4,82	10,6	9,8	9,8		Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Dinas Sosial



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET (PERPRES 59/2017)	Instansi Terkait
1	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	SOSIAL	38,02	51,51	54,33	56%		Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	Dinas Kesehatan
1	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	SOSIAL		71,70%	64,90%			Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	SOSIAL	4,19	4,00	5,00	4,00		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Ketahanan Pangan
2	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	SOSIAL	42,5	42,8	43,0	44,0		Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi	Dinas Kesehatan



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET (PERPRES 59/2017)	Instansi Terkait
									17% (2013: 19,6 %).	
2	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	SOSIAL	4,19	4,00	5,00	4,00		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Ketahanan Pangan
2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	SOSIAL	19,50%	11,72%	25%	18,70%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Kesehatan
3	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	SOSIAL	70,70%	71,70%	65,60%	81,80%		Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	Dinas Kesehatan
3	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	SOSIAL	7	84	80	53		Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	Dinas Kesehatan



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET (PERPRES 59/2017)	Instansi Terkait
3	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	SOSIAL	77,6	81,2	69,56	0		Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	Dinas Kesehatan
3	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	SOSIAL	172	190	82	270		Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	Dinas Kesehatan
3	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	SOSIAL	21,50%	0	22,80%	25,50%		Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).	Dinas Kesehatan
3	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	SOSIAL			14%	15%		Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).	Dinas Kesehatan



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET (PERPRES 59/2017)	Instansi Terkait
3	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	SOSIAL	16	19	-	24		Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).	Dinas Kesehatan
3	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	SOSIAL	30961 Jiwa	37961 Jiwa	37961 Jiwa	36227 Jiwa		Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	Dinas Kesehatan
3	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	SOSIAL	21,45	30,87	-	29,81		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Kesehatan
4	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	SOSIAL	100%	36,2%	40,6%	0		Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	SOSIAL	105	105	98,49	0		Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET (PERPRES 59/2017)	Instansi Terkait
									menjadi 114,09% (2015: 108%).	
4	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	SOSIAL	0	83,47	75,04	0		Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	SOSIAL	7,3	7,3	7,48	0		Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	SOSIAL	-	95.5%	95.7%	95.7%		Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	SOSIAL	42,34	45,21	40,25	0		Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET (PERPRES 59/2017)	Instansi Terkait
6	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	LINGKUNGAN	100	100	75,76	0		Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	LINGKUNGAN	67%	67%	71%	83%		Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	EKONOMI	4,03	6,37	6,16	5,23		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	EKONOMI	-	2.504	3.188	-		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	EKONOMI	2,91	8,15	6,84	4,86		Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET (PERPRES 59/2017)	Instansi Terkait
10	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	EKONOMI	4,82	10,6	9,8	9,8		Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	Dinas Sosial
11	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	LINGKUNGAN	50%	55%	50%	62%		Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	Dinas Lingkungan Hidup
12	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	LINGKUNGAN	144.108	192.478	431.282	670.809		Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	Dinas Lingkungan Hidup
16	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	HUKUM & TATA KELOLA	1,02	1,24		1		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	HUKUM & TATA KELOLA	0	4	0	0		Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).	Inspektorat Daerah



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET (PERPRES 59/2017)	Instansi Terkait
16	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	HUKUM & TATA KELOLA	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%		Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	HUKUM & TATA KELOLA	54,08	51,15	—	—		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	HUKUM & TATA KELOLA	81,93	64,56	83,87	-		Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Hasil Analisis, 2020.

4.3. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mancapai Target dan Tidak Ada Data

Kabupaten Pasangkayu, memiliki permasalahan indikator yang masuk dalam indikator BB (belum dilaksanakan dan belum mencapai target) serta indikator TAD (tidak ada data) sebanyak 122 indikator atau sebesar 55,45% yang tersebar pada 17 tujuan. Secara rinci indikator kelompok TAD di Kabupaten Pasangkayu yang sudah dilaksanakan dalam setiap tujuan TPB diuraikan sebagai berikut



Tabel 4.6 Indikator TPB pada Kelompok Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target di Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	CAPAIAN					TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
				2016	2017	2018	2019	2020		
9	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	EKONOMI	0	0	0	0		Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019 (2014: 237).	Dinas Perhubungan
10	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	EKONOMI	-	-	-	-		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Bagian Hukum SETDA
15	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	LINGKUNGAN	-	-	-	-		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Bagian Hukum SETDA



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

16	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	HUKUM & TATA KELOLA	-	-	-	-	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Bagian Hukum SETDA
----	------------	--	---------------------	---	---	---	---	--	--------------------

Sumber: Hasil analisis, 2020.

Tabel 4.7 Indikator TPB pada Kelompok Indikator Tidak Ada Data di Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
1	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	SOSIAL	Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	Dinas Sosial
1	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	SOSIAL	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	SOSIAL	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
				menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	
1	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	SOSIAL	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Dinas Sosial
1	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	SOSIAL	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	Dinas Sosial
1	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	SOSIAL	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	Dinas Sosial
1	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	SOSIAL	Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	SOSIAL	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
1	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	SOSIAL	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	SOSIAL	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	SOSIAL	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	SOSIAL	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	Dinas Ketahanan Pangan
2	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	SOSIAL	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	RSUD
2	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	SOSIAL	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).	RSUD



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
2	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	SOSIAL	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	Dinas Ketahanan Pangan
2	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	SOSIAL	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	SOSIAL	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Kesehatan
3	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	SOSIAL	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	SOSIAL	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	SOSIAL	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).	Dinas Pengendalian Penduduk dan



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
					Keluarga Berencana
3	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	SOSIAL	Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	SOSIAL	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Kesehatan
3	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	SOSIAL	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Kesehatan
4	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	SOSIAL	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	SOSIAL	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
4	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	SOSIAL	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	SOSIAL	4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	SOSIAL	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan	SOSIAL	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
		(terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).			
4	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	SOSIAL	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	SOSIAL	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	SOSIAL	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	SOSIAL	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	SOSIAL	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
5	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	SOSIAL	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	SOSIAL	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	SOSIAL	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	SOSIAL	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	SOSIAL	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
5	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	SOSIAL	Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	SOSIAL	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	LINGKUNGAN	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	LINGKUNGAN	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	LINGKUNGAN	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
6	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	LINGKUNGAN	Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	LINGKUNGAN	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	LINGKUNGAN	Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai.	Dinas Lingkungan Hidup
6	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	LINGKUNGAN	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, ser-ta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of wastewater in agriculture).	Dinas Lingkungan Hidup
6	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	LINGKUNGAN	Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas Lingkungan Hidup



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
6	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	LINGKUNGAN	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.	Dinas Lingkungan Hidup
6	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	LINGKUNGAN	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	LINGKUNGAN	Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemang-ku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan ke-mampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
7	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	EKONOMI	Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019.	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam SETDA



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
7	7.3.1*	Intensitas energi primer.	EKONOMI	Intensitas energi primer (penurunan 1% per tahun) menjadi 463,2 SBM pada tahun 2019.	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam SETDA
8	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	EKONOMI	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	EKONOMI	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	EKONOMI	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	EKONOMI	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	EKONOMI	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	EKONOMI	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
8	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	EKONOMI	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	EKONOMI	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	EKONOMI	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Bagian Ekonomi SETDA
8	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	EKONOMI	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	Bagian Ekonomi SETDA
8	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	EKONOMI	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	Dinas Koperasi dan UMKM
9	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	EKONOMI	Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	EKONOMI	Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 954 km).	Dinas Perhubungan



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
9	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	EKONOMI	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
9	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	EKONOMI	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
9	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	EKONOMI	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	EKONOMI	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	10.1.1*	Koefisien Gini.	EKONOMI	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang
10	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	EKONOMI	Meningkatnya Desa Mandiri paling sedikit sebanyak 2.000 desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
10	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	EKONOMI	Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% pada tahun 2019 (2014: 16,64%).	Dinas Sosial
10	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	EKONOMI	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Sosial
10	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	EKONOMI	Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,3).	Dinas Sosial
10	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	EKONOMI	Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	LINGKUNGAN	Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga tahun 2019.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
11	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	LINGKUNGAN	Terwujudnya pembangunan 5 Metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) hingga tahun 2019 (2014: 2).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	LINGKUNGAN	Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	LINGKUNGAN	Terwujudnya kota dan kawasan per-kotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	LINGKUNGAN	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	LINGKUNGAN	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	LINGKUNGAN	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
11	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	LINGKUNGAN	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	LINGKUNGAN	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	Dinas Lingkungan Hidup
11	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	LINGKUNGAN	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	LINGKUNGAN	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	LINGKUNGAN	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).	Dinas Lingkungan Hidup



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
12	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	LINGKUNGAN	Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019.	Dinas Lingkungan Hidup
12	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	LINGKUNGAN	Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019.	Dinas Lingkungan Hidup
12	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	LINGKUNGAN	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Bagian Organisasi dan Tata Laksana SETDA
13	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	LINGKUNGAN	Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	LINGKUNGAN	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	LINGKUNGAN	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	Dinas Lingkungan Hidup



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
15	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	LINGKUNGAN	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	Dinas Lingkungan Hidup
16	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	HUKUM & TATA KELOLA	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	HUKUM & TATA KELOLA	Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	HUKUM & TATA KELOLA	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
16	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	HUKUM & TATA KELOLA	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	HUKUM & TATA KELOLA	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Badan Keuangan Daerah
16	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	HUKUM & TATA KELOLA	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Bagian Organisasi dan Tata Laksana SETDA
16	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	HUKUM & TATA KELOLA	Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
16	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	HUKUM & TATA KELOLA	Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).	Bagian Organisasi dan Tata Laksana SETDA
16	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	HUKUM & TATA KELOLA	Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana SETDA
16	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	HUKUM & TATA KELOLA	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	HUKUM & TATA KELOLA	Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.	Dinas Komunikasi dan Informatika



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
17	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	EKONOMI	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Keuangan Daerah
17	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	EKONOMI	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).	Badan Keuangan Daerah
17	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	EKONOMI	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	EKONOMI	Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	EKONOMI	Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PILAR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INSTANSI TERKAIT
17	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	EKONOMI	Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	EKONOMI	Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	EKONOMI	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Pusat Statistik
17	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	EKONOMI	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	EKONOMI	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	EKONOMI	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pasangkayu masih menghadapi tantangan dalam hal pencapaian indikator TPB. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional yang masih sekitar 44,55% (98 indikator dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten).

4.4. Analisis Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu

Pada prinsipnya, keadaan Keuangan Daerah tercermin di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Secara substansial, APBD terdiri atas tiga komponen utama, yaitu: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai panambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam perspektif TPB, analisis keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui seberapa besar anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian TPB. Analisis ini juga akan mengungkapkan pola alokasi anggaran berdasarkan 17 tujuan di dalam TPB, sehingga akan diketahui tujuan mana yang paling banyak menyerap anggaran. Pada akhirnya, analisis ini akan menunjukkan apakah besarnya anggaran yang dialokasikan untuk tujuan tertentu, berjalan paralel dengan kinerja yang dihasilkan.

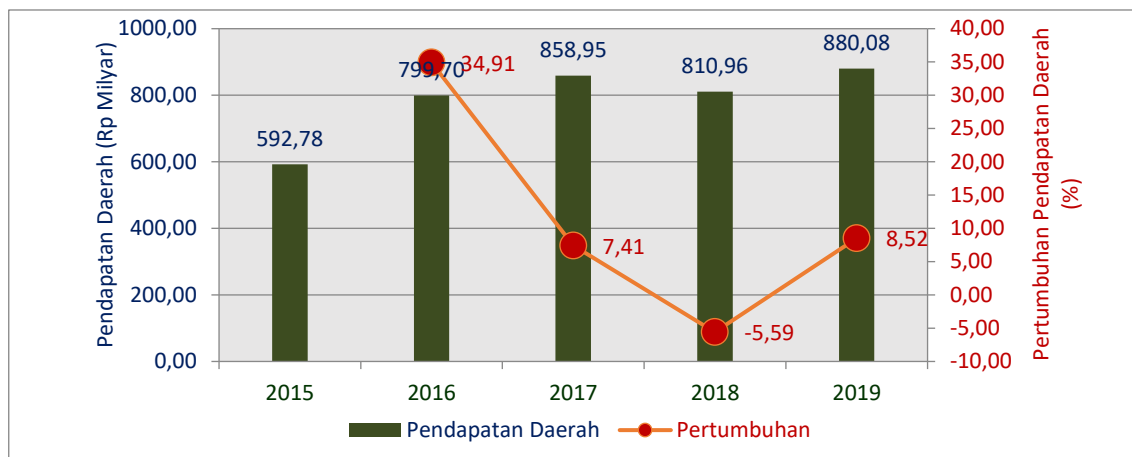
1. Pendapatan Daerah

Secara umum, kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu selama tahun 2015-2019 relatif cukup baik, dimana Pendapatan Daerah cenderung meningkat secara konsisten. Pada tahun 2015, Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu masih sebesar Rp 592,78 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 880,08 miliar pada tahun 2019, atau meningkat rata-rata 11,31 persen per tahun. Pertumbuhan Pendapatan Daerah tertinggi terjadi pada 2016,



yaitu sebesar 34,91 persen akibat peningkatan secara signifikan pada seluruh komponen Pendapatan Daerah. Sedangkan pada tahun 2018, Pendapatan Daerah mengalami kontraksi sebesar -5,59 persen akibat terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

Tabel 4.8 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019

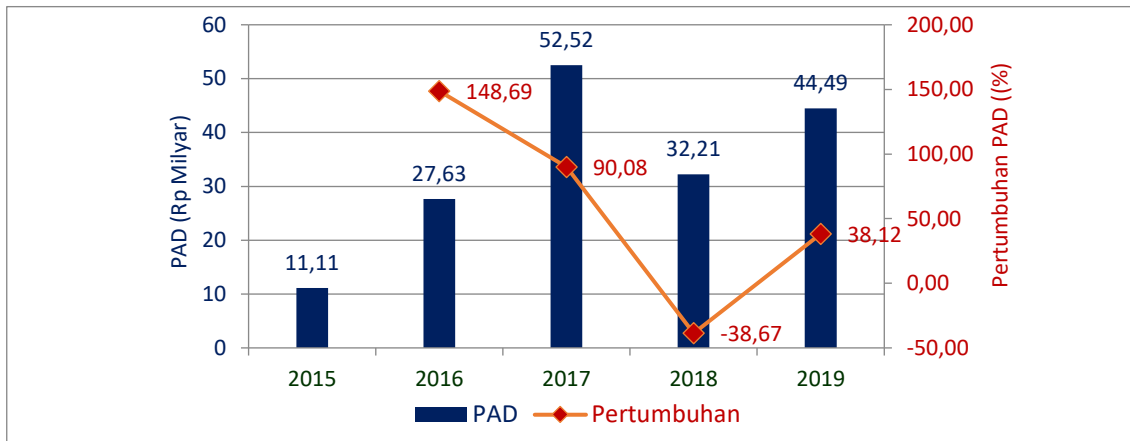


Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Ketiga komponen utama APBD, PAD menunjukkan pertumbuhan paling tinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu tumbuh rata-rata 59,54 persen per tahun. Kenaikan PAD paling tajam terjadi pada tahun 2016, yang tumbuh sebesar 148,59 persen akibat peningkatan penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Komponen APBD lainnya yang juga bertumbuh cukup kuat adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama periode 2015-2019, Lain-lain PAD yang Sah tumbuh rata-rata 47,08 persen per tahun. Sedangkan Dana Perimbangan hanya tumbuh rata-rata 6,80 persen per tahun selama periode yang sama.



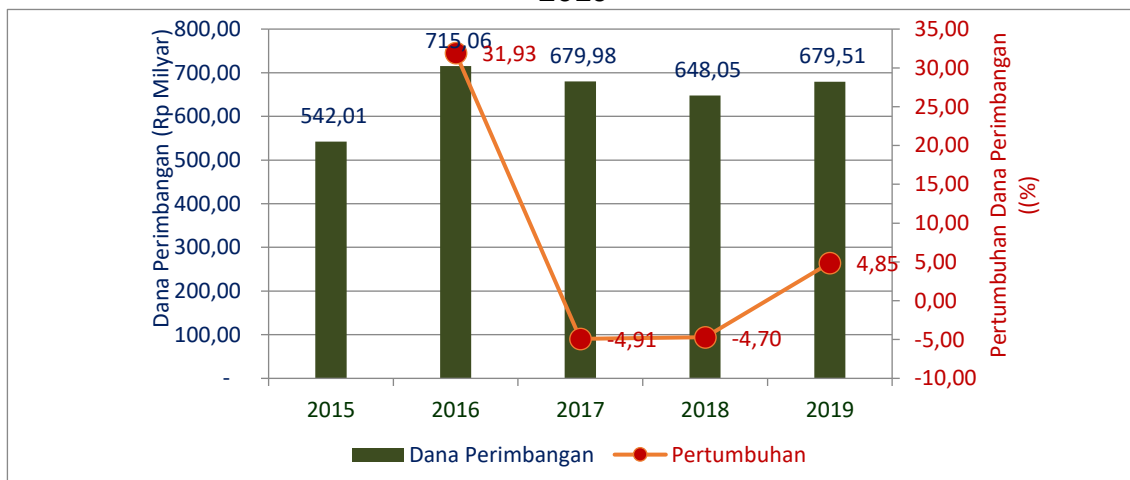
Tabel 4.9 Pertumbuhan PAD Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Meskipun Dana Perimbangan bertumbuh pada level yang rendah, namun secara nominal masih menunjukkan angka paling besar. Kontribusinya terhadap total Pendapatan Daerah juga menunjukkan angka yang sangat tinggi. Pada tahun 2015, secara nominal Dana Perimbangan mencatat angka sebesar Rp 542,01 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 679,51 miliar, atau tumbuh rata-rata 6,80 persen per tahun. Peningkatan Dana Perimbangan paling tinggi terjadi pada 2016, yaitu mencapai 31,93 persen, akibat meningkatnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun setelah itu, Dana Perimbangan cenderung menurun akibat penurunan pada semua komponen Dana Perimbangan, dimana penurunan paling signifikan terjadi pada Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBH).

Tabel 4.10 Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019



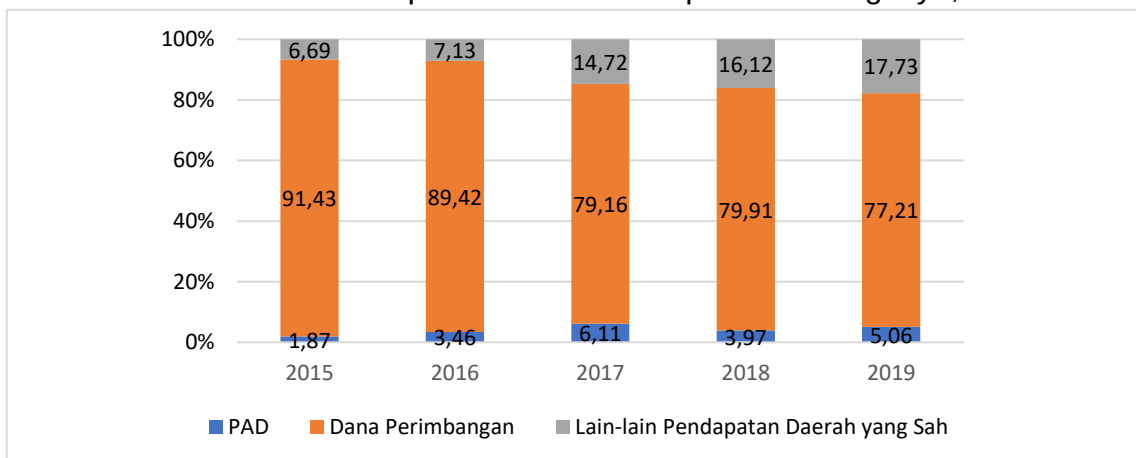
Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu



Dana Perimbangan masih merupakan kotributor utama terhadap pembentukan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu. Secara rata-rata, sumbangan Dana Perimbangan terhadap total Pendapatan Daerah mencapai 83,43 persen per tahun dengan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2015, Dana Perimbangan menyumbang 91,43 persen terhadap total Pendapatan Daerah, kemudian menurun menjadi 77,21 persen pada tahun 2019. Besarnya kontribusi Dana Perimbangan di dalam struktur Pendapatan Daerah menunjukkan besarnya ketergantungan fiskal Kabupaten Pasangkayu terhadap Pemerintah (Pusat) dan sekaligus menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Pasangkayu.

Rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Pasangkayu setidaknya ditunjukkan oleh rendahnya kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah. Secara rata-rata, sumbangan PAD terhadap total Pendapatan Daerah hanya sebesar 4,09 persen, meski menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2015, PAD menyumbang hanya 1,87 persen terhadap total Pendapatan Daerah, kemudian meningkat menjadi 5,06 persen pada tahun 2019. Fakta ini memberi isyarat bahwa sekalipun kemandirian fiskal masih relatif rendah, namun terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, kemandirian fiskal Kabupaten Pasangkayu terus membaik dalam lima tahun terakhir.

Tabel 4.11 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu



Tabel 4.12 Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Komponen Pendapatan Daerah terbesar kedua setelah Dana Perimbangan adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam lima tahun terakhir, kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah relatif cukup baik. Bahkan jika dibandingkan dengan PAD dan Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah justru menunjukkan peningkatan paling konsisten. Secara rata-rata, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bertumbuh sebesar 47,08 persen per tahun. Pada tahun 2015, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 39,66 miliar, dan kemudian meningkat empat kali lipat pada tahun 2019 menjadi Rp 156,08 milyar. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah paling tinggi terjadi pada tahun 2018, dimana bertumbuh lebih dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Jika ditelusuri lebih jauh, peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagian besar bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian, dan Pendapatan Lainnya. Akibat peningkatan ini, kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Pendapatan Daerah bergerak naik dari 6,69 persen pada tahun 2015, menjadi 17,73 persen pada tahun 2019.

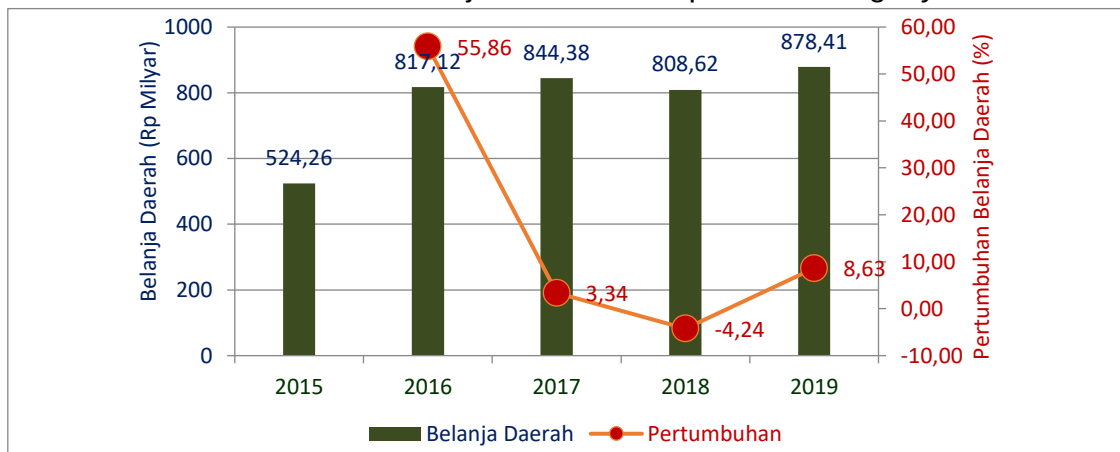
2. Belanja Daerah

Dalam literatur *Public Economics* dijelaskan bahwa belanja pemerintah (*government spending*) seharusnya memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penghantaran layanan publik yang berkualitas. Dampak



tersebut bergantung apakah belanja pemerintah sebagian besar hanya dipakai untuk membiayai operasional pemerintah daerah atau digunakan sebagai instrumen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, pemberian *cash transfer*, dsb.

Tabel 4.13 Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

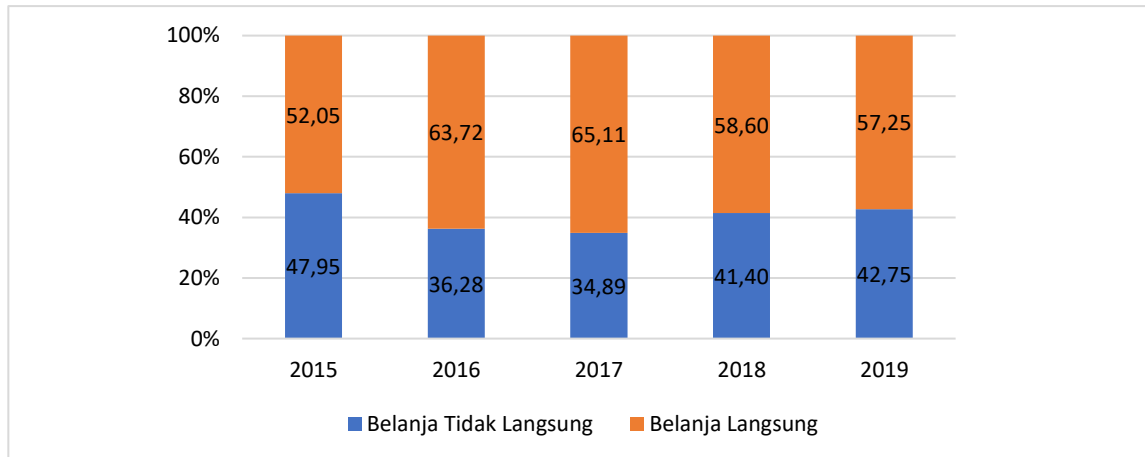
Mengikuti kecenderungan peningkatan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu juga menunjukkan tren meningkat. Selama periode 2015-2019, Belanja Daerah meningkat dari Rp 524,26 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 878,41 miliar pada tahun 2019, atau tumbuh rata-rata 15,10 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah tampak bertumbuh relatif lebih cepat dalam lima tahun terakhir.

Sedikit berbeda dengan fenomena umum di banyak kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Pasangkayu justru mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk Belanja Langsung, yaitu jenis belanja yang diperuntukkan untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kabupaten Pasangkayu menjadi salah satu dari sedikit kabupaten/kota di Indonesia yang proporsi Belanja Langsungnya lebih besar. Dalam lima tahun terakhir, secara rata-rata, pemerintah Kabupaten Pasangkayu mengalokasikan anggaran 59,35 persen dari total Belanja Daerah untuk membiayai Belanja Langsung. Secara nominal,



pada tahun 2015, realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 272,90 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 502,93 miliar pada tahun 2019, atau meningkat rata-rata 22,18 persen per tahun.

Tabel 4.14 Struktur Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019

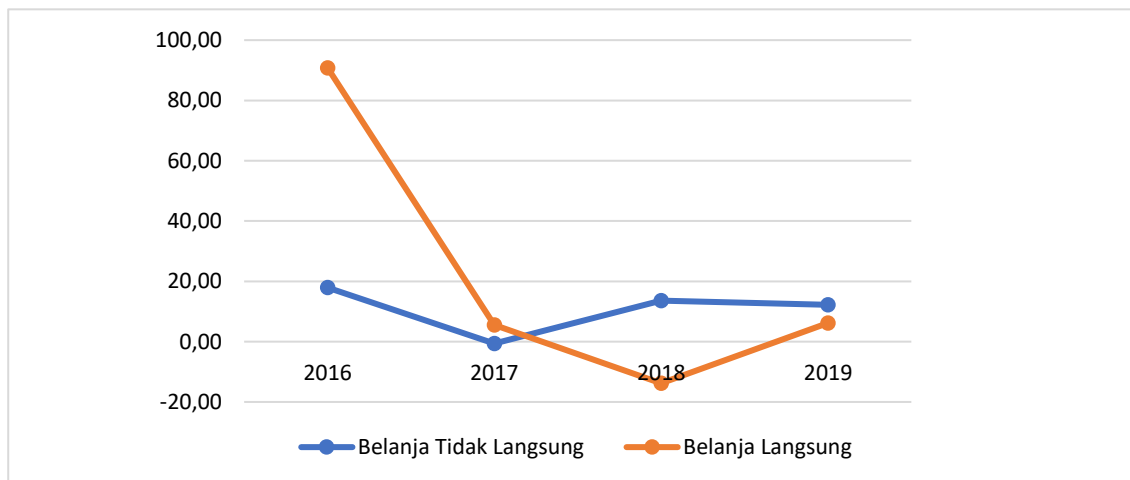


Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung meningkat relatif lebih cepat. Dalam lima tahun terakhir, Belanja Langsung bertumbuh rata-rata 22,18 persen per tahun. Pertumbuhan Belanja Langsung paling tinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, seiring dengan peningkatan Pendapatan Daerah. Sebaliknya, Belanja Tidak Langsung hanya tumbuh rata-rata 10,78 persen per tahun dengan pertumbuhan yang relatif stabil. Fakta ini menunjukkan besarnya perhatian pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk mengalokasikan anggaran yang lebih signifikan bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah ketimbang belanja operasional pemerintah daerah.



Tabel 4.15 Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Pasangkayu, 2016-2019

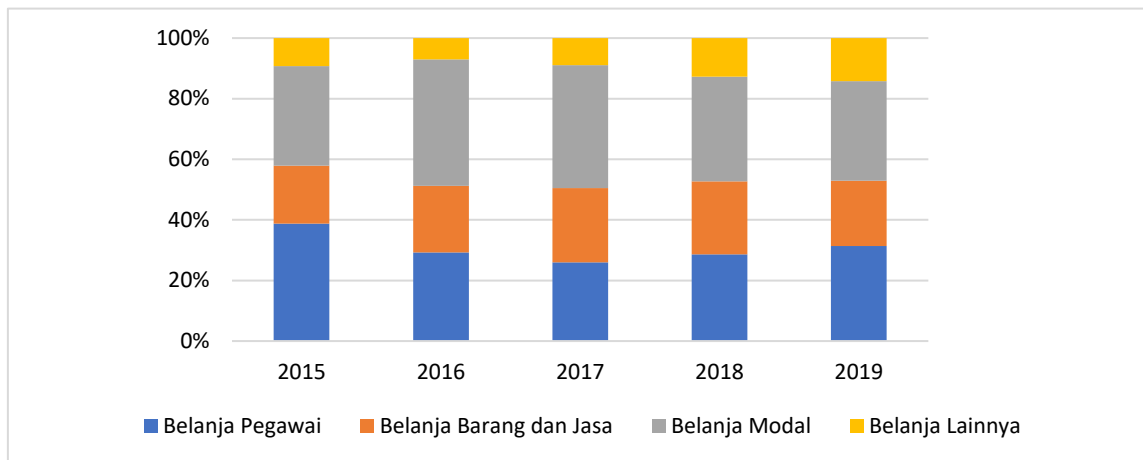


Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Jika diamati Belanja Daerah menurut klasifikasi ekonomi, sebagian besar Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu digunakan untuk Belanja Modal dan Belanja Pegawai. Tahun 2019 proporsi Belanja Modal dan Belanja Pegawai dalam struktur Belanja Daerah masing-masing sebesar 32,83 persen dan 31,40 persen, atau secara nominal masing-masing sebesar Rp 288,38 miliar dan Rp 275,86 miliar, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Selama periode 2015-2019, Belanja Pegawai bertumbuh paling rendah, yaitu hanya rata-rata 8,55 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh Belanja Lainnya, yaitu rata-rata 26,95 persen per tahun, namun kontribusinya terhadap Belanja Daerah relatif paling rendah.



Tabel 4.16 Struktur Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Ekonomi Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

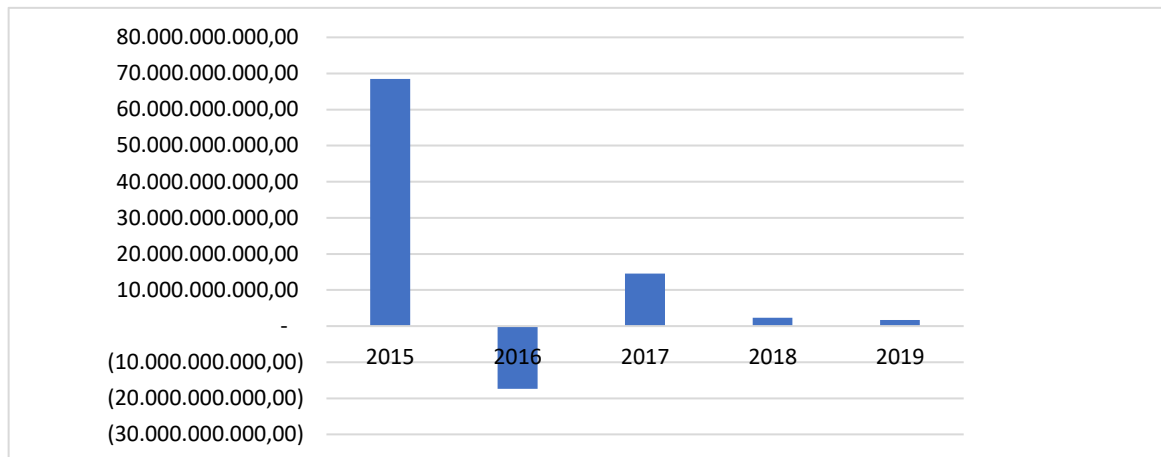
3. Pembiayaan Daerah

Secara umum, dalam lima tahun terakhir, keuangan daerah (APBD) Kabupaten Pasangkayu mengalami surplus, kecuali tahun 2016 mengalami defisit. Anggaran surplus menandakan bahwa Pendapatan Daerah lebih besar dibandingkan dengan Belanja Daerah, sedangkan anggaran defisit menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Nilai surplus terbesar terjadi pada tahun 2015 yang mencapai Rp 68,52 miliar. Sedangkan nilai surplus terendah terjadi pada tahun 2019, yaitu hanya Rp 1,67 miliar. Surplus anggaran terjadi karena beberapa faktor, antara lain, meningkatnya Pendapatan Daerah, menurunnya daya serap anggaran, dan adanya kegiatan yang tidak terealisasi.

Terkait dengan defisit anggaran pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu memiliki kas yang cukup untuk menutup defisit keuangan daerah melalui pembiayaan netto. Saat keuangan daerah mengalami defisit tahun 2016 sebesar RP 17,42 miliar, total Pembiayaan Netto mencapai Rp 21,72 miliar, jauh lebih besar daripada nilai defisit. Itu sebabnya Pemerintah Kabupaten Pasangkayu memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) pada tahun tersebut sebesar Rp 4,31 miliar.



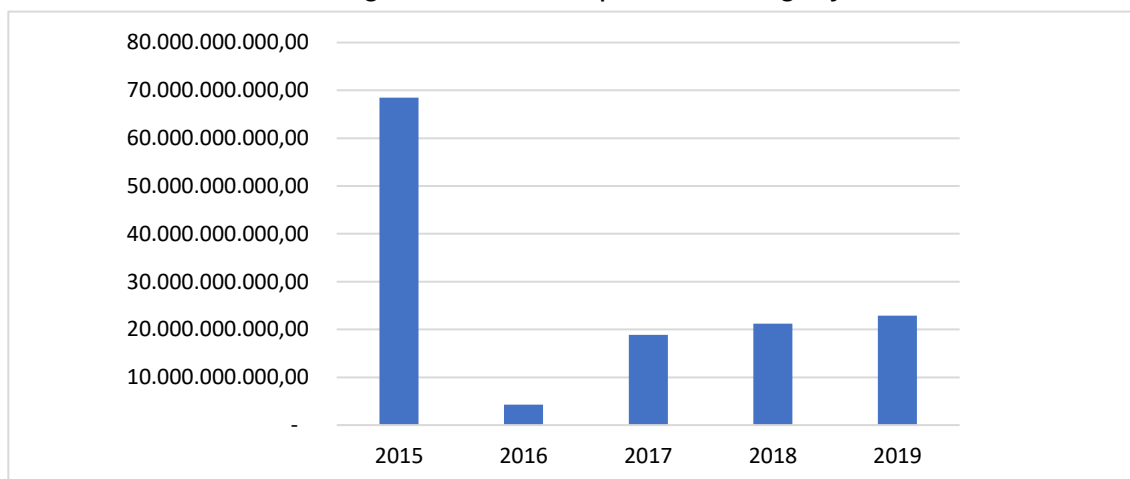
Tabel 4.17 Surplus/Defisit APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Dalam penyusunan APBD, angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Jika Pembiayaan Netto-nya jauh lebih besar daripada defisit maka tersisa SILPA, namun idealnya SILPA tersebut harusnya dialokasikan untuk program pembangunan daerah lainnya yang masih membutuhkan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri No. 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam lampiran peraturan perundang-undangan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan SILPA Tahun Anggaran 2020 bersaldo nihil.

Tabel 4.18 Perkembangan SILPA Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas



yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Namun kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tidak sepenuhnya mengikuti regulasi tersebut, sebab selama lima tahun terakhir SILPA tidak pernah nol, bahkan angkanya mencapai puluhan miliar rupiah dengan kecenderungan yang semakin membesar. Selain tidak mengikuti regulasi, kebijakan pengelolaan keuangan semacam ini tentu tidak sejalan dengan tujuan keuangan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penghantaran layanan publik.

4.5. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB

Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan SDGs di Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu kontribusi yang diharapkan bisa memaksimalkan dalam pencapaian TPB. Peran para pemangku kepentingan ini direalisasikan dalam beberapa bentuk, diantaranya sebagaimana berikut.

- Peran Perguruan Tinggi. Peran perguruan tinggi dalam pencapaian TPB dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencapaian TPB, selain itu perguruan tinggi melakukan kajian terkait isu-isu TPB, membantu pemerintah dalam mendesain Rencana Aksi, dan melakukan evaluasi secara independen terkait pencapaian TPB di Kabupaten Pasangkayu.
- Peran Lembaga/Organisasi Masyarakat. Lembaga atau Organisasi Masyarakat yang ada di Kabupaten Pasangkayu berperan sebagai wadah untuk menyebarluaskan dan mensosialisasikan informasi terkait TPB, membangun pemahaman publik, memperkuat formulasi program dan kegiatan, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara independen.
- Peran Dunia Usaha/BUMN. Dunia usaha berperan aktif dalam aksi-aksi sosial dalam pemberdayaan masyarakat, terlibat dalam penanganan isu-isu lingkungan, mengalokasikan dana CSR untuk pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Peran dunia usaha menjadi salah satu lembaga penyalur



dana dalam memotivasi sehingga pencapaian TPB dapat terlaksana dengan lebih baik.

- Peran Lembaga Filantropis. Lembaga ini memberikan dukungan pendanaan dan penganggaran, membangun pemahaman publik terkait SDGs dan memonitoring pelaksanaan SDGs. Memfasilitasi para pemangku kepentingan dalam percepatan program dan kegiatan, juga mendorong peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dalam pencapaian SDGs.
- Peran Media. Media yang ada di Kabupaten Pasangkayu diharapkan dapat berperan dalam menyebarluaskan informasi, membangun pemahaman publik, dan memonitoring pelaksanaan SDGs.



Tabel 4.19 Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB

No	Pemangku Kepentingan	Nama Pemangku Kepentingan	Jenis Kegiatan Dalam Pencapaian TPB	Uraian Kegiatan Dalam Pencapaian TPB
1	Perguruan tinggi	Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Tadulako, Lembaga Administrasi Negara	Penelitian di Bidang Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pemerintahan dan Perencanaan Ruang.	Penyusunan Masterplan Kawasan Ekonomi Khusus Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) Penyusunan Masterplan Smart City Pasangkayu (Masterplan IT) Penyusunan Roadmap pengembangan Perkebunan Kakao LATPIM
2	Lembaga/ Organisasi Masyarakat	LSM	Penginputan dan peliputan berita	Informasi-informasi tentang kegiatan pembangunan daerah
3	Dunia Usaha/ BUMN	Bank Sulselbar, BRI, BNI	Pemberian Bantuan	Bantuan motor sampah, tangki air, dan ambulance
4	Lembaga Filantropis	Bank Sulselbar, BRI, BNI	Penyaluran Kredit	Kredit Usaha Masyarakat
5	Media Cetak	Media Cetak dan Elektronik	Penginputan dan peliputan berita	Informasi-informasi tentang kegiatan pembangunan daerah



BAB 5. ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Analisis capaian indikator dilakukan dengan tujuan untuk melihat proyeksi 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2021-2026). Hasil proyeksi tersebut didasarkan pada target dan realisasi capaian lima tahun sebelumnya, berdasarkan data Kabupaten Pasangkayu untuk masing-masing indikator tahun 2016 sampai tahun 2026. Sebaran masing-masing indikator yang terkait dengan isu strategis pada masing-masing kelompok tersebut kelompok indikator strategis yang dikaji dalam bab ini adalah indikator-indikator yang masuk dalam kelompok SB dan BB, yaitu kelompok indikator yang telah dilakukan namun belum memenuhi target serta kelompok indikator yang belum dilakukan dan belum memenuhi target. Tabel berikut memperlihatkan Proyeksi dan Capaian Indikator TPB pada Kelompok SB dan BB, serta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator TPB tersebut.

Tabel 5.1 Capaian Indikator TPB Kelompok Indikator SB KLHS RPJMD Kabupaten Pasangkayu

No. TPB	Tujuan, Isu Strategis	INDIKATOR	OPD Pelaksana	Capaian Indikator		Proyeksi Indikator				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030
1	Tujuan : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Indikator 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial	9,8%	9,8%	9,83%	10,20%	9,85%	9,49%	7%
	Isu Strategis : Masih adanya setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi.									
1	Tujuan : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Indikator 1.3.1.(a) Proporsi peserta	Dinas Kesehatan	54%	56%	68,9%	81,40%	90,94%	100%	



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

	Isu Strategis : Belum diterapkannya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin dan rentan.	jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.								
1	Tujuan : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Indikator 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	64,90 %	0	58,73%	59,35%	59,98%	60,61%	65%
	Isu strategis : Belum terjaminnya semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.									
2	Tujuan : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Indikator 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Ketahanan Pangan	5	4	4,86	4,05	3,82	3,59	2,00
	Isu Strategis : Masih adanya kelaparan dan belum terjaminnya akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
2	Tujuan : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta	Indikator 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan	Dinas Kesehatan	43%	44%	41,15%	38,93%	36,49%	34,05%	17,00%



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

	Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	gizi (underweight) pada anak balita.								
	Isu Strategis : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
2	Tujuan : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Indikator 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan	5%	4%	11,7%	17,8%	24,4%	31,0%	77,4%
	Isu Strategis : Masih adanya kelaparan dan belum terjaminnya akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
2	Tujuan : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Indikator 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	25%	18,70%	17,00%	16,19%	14,39%	12,59%	0,00%
	Isu Strategis : Masih adanya segala bentuk kekurangan gizi, termasuk untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan belum terpenuhinya kebutuhan									



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

	gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
3	Tujuan : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Indikator 3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	65,6%	81,8%	73,14%	82,06%	84,81%	87,56%	
	Isu Strategis : Masih adanya kematian bayi baru lahir dan balita yang tidak dapat dicegah.									
3	Tujuan : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Indikator 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	80	53	70	63	59	55	24
	Isu Strategis : Masih adanya kematian bayi baru lahir dan balita yang tidak dapat dicegah.									
3	Tujuan : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Indikator 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	69,56 %	0	82,82%	93,11%	98,10%		
	Isu Strategis : Masih adanya kematian bayi baru lahir dan balita yang tidak dapat dicegah.									
3	Tujuan : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Indikator 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	82	270	140	145	138	143	131
	Isu Strategis : Masih adanya epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan masih adanya hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

3	Tujuan : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Indikator 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas Kesehatan	22,80 %	25,50%	23,25%	23,31%	21,32%	19,33%	5,40%
	Isu Strategis : Masih adanya hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular dan belum meningkatnya kesehatan mental dan kesejahteraan.									
3	Tujuan : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Indikator 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan	14%	15%	16%	14%	13%	11%	0%
	Isu Strategis : Masih adanya hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular dan belum meningkatnya kesehatan mental dan kesejahteraan.									
3	Tujuan : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Indikator 3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan	0	24%	27,16%	24,58%	21,86%	19,13%	0,02%
	Isu Strategis : Masih lemahnya upaya pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									
3	Tujuan : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Indikator 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	37961	36227	38536	41307	42887	44466	55525



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

	Isu Strategis : Belum tercapainya cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan belum terjangkau bagi semua orang.									
3	Tujuan : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia Isu Strategis : Masih lemahnya pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	Indikator 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan	0	29,81%	33,38%	30,04%	26,70%	23,36%	0
4	Tujuan : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua Isu Strategis : Belum terjaminnya semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Indikator 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	40,6%	0	-15%	-6%	4%	13%	81%
4	Tujuan : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan	Indikator 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan,	98,49 %	0	93,07%	95,17%	97,27%	99,37%	114,09%



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

	Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua		Pemuda dan Olahraga							
	Isu Strategis : Belum terjaminnya semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
4	Tujuan : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua Isu Strategis : Belum terjaminnya semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Indikator 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	75,04 %	0	66,96%	70,96%	74,96%	79%	106,94%
4	Tujuan : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua Isu Strategis : Belum terjaminnya semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada	Indikator 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7,48	0	7,5	7,7	7,9	8,0	8,8



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

	capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
4	Tujuan : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua Isu Strategis : Belum terjaminnya semua remaja dan proporsi	Indikator 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	95,7%	95,7%	96,1%	96,3%	96,5%	96,7%	
5	Tujuan : Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan Isu Strategis : Belum terjaminnya partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Indikator 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40,25	0	34,86	40,52	41,57	42,63	50
6	Tujuan : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Isu Strategis : Belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Indikator 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75,8%	0	68,5%	71,6%	74,8%	77,9%	100%
6	Tujuan : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki	Dinas Pekerjaan Umum dan	71%	83%	85%	89,6%	94,6%	99,6%	



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

	Isu Strategis : Belum tercapainya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan masih adanya praktik buang air besar di tempat terbuka, serta belum optimalnya pemberian perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, dan kelompok masyarakat rentan.	akses terhadap layanan sanitasi layak.	Penataan Ruang							
8	Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua Isu Strategis : Kurangnya upaya dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita.	Indikator 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,16	5,23	4,69	5,22	5,75	6,28	10
8	Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua Isu Strategis : Belum tercapainya pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Indikator 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3188	0	5413,5	6465	7.517	8.568	15928,5



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

9	Tujuan : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Indikator 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	6,84%	4,9%	2,2%	2,4%	2,7%	2,9%	4,3%
	Isu Strategis : Kurangnya promosi industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta secara signifikan belum meningkatnya proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto.									
10	Tujuan : Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	Indikator 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial	9,80%	9,80%	12,37%	11,83%	11,30%	10,76%	7,00%
	Isu Strategis : Belum tercapainya pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi.									
11	Tujuan : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Indikator 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	50%	62%	63%	66%	69%	73%	
	Isu Strategis : Masih adanya dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan belum diberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.									
12	Tujuan : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Indikator 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang		43128 2	670809	737346	880711	1024077	1167443	2171002



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

	Isu Strategis : Belum optimalnya pencapaian pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, dan secara signifikan masih adanya pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah sehingga masih menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas Lingkungan Hidup							
16	Tujuan : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan Isu Strategis : Masih adanya segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Indikator 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	1,22	1,1	0,97	0,85	0,73
16	Tujuan : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan Isu Strategis : Masih adanya korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	Indikator 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Inspektorat Daerah	0	0	0	0	1	1	4



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

16	Tujuan : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Indikator 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,01%	0,01%	0,01%	10%	20%	30%	100%
	Isu Strategis : Belum terjaminnya pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
16	Tujuan : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Indikator 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54,08 %	51,15%	46%	51%	57%	62%	100%
	Isu Strategis : Belum optimalnya upaya dalam memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
16	Tujuan : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Indikator 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83,87 %	0	79,99%	81,07%	82,15%	82,15%	84,31%
	Isu Strategis : Belum optimalnya upaya dalam memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									



5.1. Keterkaitan Indikator TPB dengan Daya Dukung dan Daya Tampung

Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dilakukan untuk mendapatkan gambaran indikatif potensi sumberdaya alam beserta jasa ekosistem yang terdapat dalam suatu wilayah, termasuk pembatas atas potensi sumberdaya alam dimaksud. Berdasarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Pasangkayu, diketahui bahwa terdapat beberapa indikator TPB yang terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang didasarkan pada layanan jasa ekosistem. Tabel berikut memperlihatkan keterkaitan kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan indikator TPB pada kelompok indikator strategis yaitu Kelompok Indikator SB. Terdapat 7 Indikator yang terkait dengan daya dukung daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Pasangkayu.

Tabel 5.2 Keterkaitan Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan Capaian Indikator TPB Kelompok SB pada KLHS RPJMD Kabupaten Pasangkayu

No. TPB	Tujuan TPB	No. Indikator	Indikator	Keterkaitan dengan DDDTLH
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Indikator Terkait DDDTLH : Penyediaan Pangan



2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Indikator Terkait DDDTLH : Penyediaan Pangan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Indikator Terkait DDDTLH : Penyediaan Pangan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH



3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH



	Sepanjang Hayat untuk Semua			
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Indikator terkait DDDTLH : Penyediaan Air dan Pengaturan Tata air
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Indikator terkait DDDTLH : Penyediaan Air
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis	Indikator Tidak Terkait DDDTLH



			kelamin dan kelompok umur.	
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Indikator Terkait DDDTLH : Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Indikator Terkait DDDTLH : Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Indikator Tidak Terkait DDDTLH



	Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan			
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Indikator Tidak Terkait DDDTLH



Tabel 5.3 Distribusi Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem Indikator TPB Kelompok SB dan BB terkait D3TLH KLHS RPJMD Kabupaten Pasangkayu

Fungsi	Jenis Jasa	Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem			
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
Penyediaan	Penyediaan Pangan	1.470,71	48.614,30	205.382,77	29.787,30
Indikator TPB yang terkait dengan jasa penyediaan pangan					
2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).					
2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.					
2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.					
Penyediaan	Penyediaan Air	59.173,21	68.210,65	161.588,31	722,15
6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.					
6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.					
Pengaturan	Pengaturan Tata Aliran Air	747,63	128.760,31	13.181,35	146.048,03
6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.					
Pengaturan	Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah	87.245,74	58.808,23	145.032,79	1.185,89
11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.					
12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).					



BAB 6. ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

6.1. Mekanisme Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Skenario pembangunan berkelanjutan merupakan rencana pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang dibuat berdasarkan alternatif proyeksi kondisi pencapaian indikator TPB. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian indikator TPB berupa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi tersebut disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Proyeksi Capaian Indikator TPB Tanpa Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator TPB tanpa upaya tambahan merupakan gambaran pencapaian indikator TPB yang diperoleh berdasarkan tren historis data capaian indikator TPB yang telah dilaksanakan sebelumnya (business as usual). Metodologi yang digunakan untuk memproyeksi data baseline adalah trend projection atau trend forecasting (Anderson et al., 2012; Diebold, 2007; Wooldridge, 2013 dalam Alisjahbana et al. 2017). Proyeksi dilakukan dengan melakukan regresi variabel tak bebas (independent variable) yang nilainya ingin diprediksi pada masa depan. Selain menggunakan model regresi, proyeksi juga dapat dilakukan dengan cara menghitung rata-rata data baseline dengan asumsi bahwa pertumbuhan capaian indikator TPB tertentu sama setiap tahun.

Proyeksi Capaian Indikator TPB Dengan Tambahan. Proyeksi capaian indikator TPB dengan upaya tambahan disusun dalam rangka percepatan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya tambahan tersebut disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pencapaian target tanpa upaya tambahan;
- b) Pencapaian target yang ditetapkan secara nasional;
- c) Potensi, daya saing dan inovasi daerah;
- d) Daya dukung dan daya tampung daerah; dan
- e) Pertimbangan lain sesuai kebutuhan daerah.



Upaya tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian indikator TPB sehingga dapat mencapai target yang ditentukan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017. Proyeksi capaian indikator dengan upaya tambahan, variabel yang diproyeksi adalah variabel-variabel bebas (independent variables) yang mempengaruhi variabel tak bebas (independent variable) dalam rumus perhitungan indikator. Indikator TPB yang tidak terpenuhi target TPB-nya di tahun proyeksi dengan proyeksi BAU, selanjutnya dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan.

6.2. Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB

Berdasarkan hasil pengkajian indikator TPB di Kabupaten Pasangkayu terdapat indikator yang sudah mencapai indikator nasional (Kelompok SS). Ini artinya memang indikator tersebut tidak menjadi fokus perhatian didalam kajian lingkungan hidup strategis ini. Namun Pemerintah Kabupaten Pasangkayu harus tetap mengawasi dan memastikan bahwa kondisi yang sudah baik (tidak menurun), dan lebih baik lagi jika dapat ditingkatkan sesuai dengan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sementara untuk indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (Kelompok BB) diharapkan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu perlu melakukan evaluasi pelaksanaan TPB setiap tahunnya, agar kedepannya semua indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Pasangkayu dapat diselenggarakan.

Uraian skenario dan rekomendasi untuk setiap indikator TPB diuraikan berdasarkan urutan prioritas indikator yang telah disusun. Sebanyak 35 indikator TPB yang menjadi **isu strategis** (Kelompok SB) KLHS RPJMD Kabupaten Pasangkayu terdapat beberapa indikator yang berkaitan dengan indikator RPJMD dan SPM (Standar Pelayanan Minimal).

- Sebanyak **12** indikator TPB yang beririsan dengan indikator RPJMD dan SPM yang kemudian dikelompokkan sebagai indikator PRIORITAS 1;
- Sebanyak **2** indikator TPB yang hanya beririsan dengan SPM kemudian dikelompokkan sebagai indikator PRIORITAS 2;
- Sebanyak **13** indikator TPB yang hanya beririsan dengan RPJMD dikelompokkan sebagai indikator PRIORITAS 3; dan



- Sebanyak **8** indikator TPB yang tidak beririsan baik dengan SPM maupun RPJMD kemudian dikelompokkan sebagai indikator PRIORITAS 4.

Penentuan indikator prioritas ini, dijadikan dasar dalam pengintegrasian keseluruhan program-program rekomendasi TPB yang dihasilkan melalui KLHS RPJMD ini kedalam rancangan RPJMD. Pemilihan indikator berdasarkan prioritas ini untuk membantu dalam memilih indikator TPB yang penting dan genting untuk dilaksanakan pada periode RPJMD yang tentunya sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran daerah dan pertimbangan lain sesuai kebutuhan daerah. Sebanyak **35 indikator** TPB yang menjadi isu strategis (kelompok SB) terdapat **7 indikator** yang sangat terkait dengan daya dukung dan daya tampung (DDDTLH). Sehingga dalam perumusan skenario dan rekomendasinya perlu mempertimbangkan hasil kajian daya dukung dan daya tampung yang telah ada. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat dihitung dengan berbagai metode, antara lain adalah: 1). Berdasarkan Stock; 2). Supply-Demand; 3). Jasa lingkungan; dan Valuasi Ekonomi. Untuk wilayah Kabupaten Pasangkayu, menggunakan hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana yang secara rinci telah dijabarkan pada kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Pasangkayu.

Penggunaan data ini dilakukan pada proses penyelenggaraan KLHS ini, karena saat penyusunan dokumen ini, Kabupaten Pasangkayu belum menyusun kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya memuat kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pelaksanaan analisis daya dukung dan daya tampung ini menggunakan peta tematik yang ditumpangtindihkan sehingga akan menghasilkan informasi terkait wilayah-wilayah yang memiliki jasa lingkungan tinggi ataupun rendah. Informasi ini sangat diperlukan dalam merumuskan lokasi-lokasi rencana pembangunan dari program-program yang telah dirumuskan melalui kajian pencapaian TPB ini maupun program-program yang lahir dari hasil penyempurnaan program-program rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pasangkayu. Adapun skenario dan rekomendasi pencapaian TPB di Kabupaten Pasangkayu dapat dilihat pada tabel berikut dibawah.



6.2.1 Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB Prioritas 1

1. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Tujuan:

Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target:

Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.

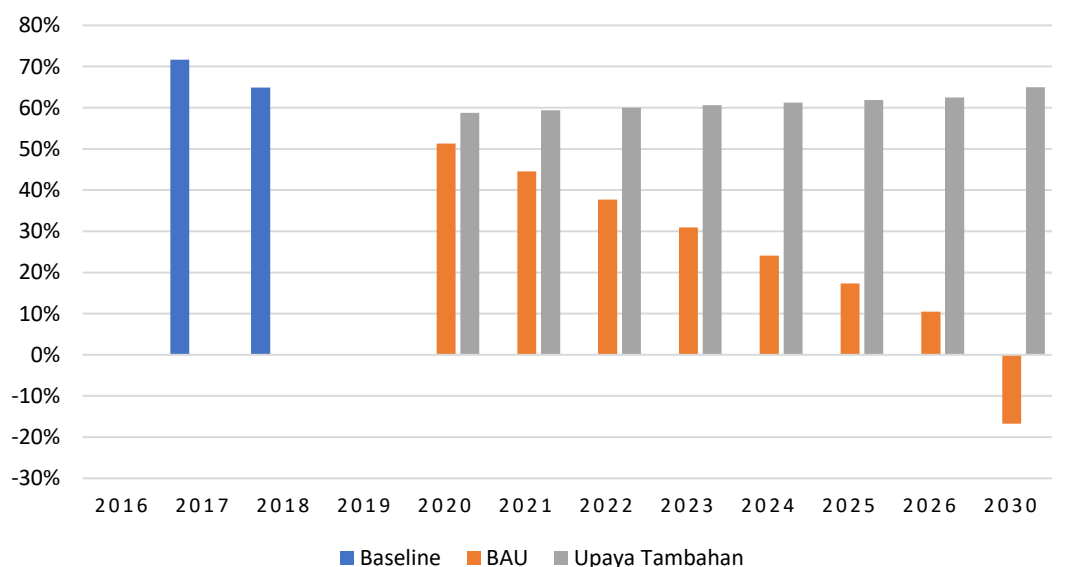
Nomor Indikator : 1.4.1 (c)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait langsung dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

1.4.1 (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2015	0		
2016	0		
2017	71,70%		
2018	64,90%		
2019	0	0	0
2020		51,30%	58,73%
2021		44,5%	59,35%
2022		37,7%	59,98%
2023		30,9%	60,61%
2024		24,1%	61,24%
2025		17,3%	61,86%
2026		10,5%	62,49%
2030		-16,7%	65,00%





Isu Strategis TPB:

Masih adanya setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi.

Rekomendasi Program

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

2. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.

Tujuan:

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.

Target:

Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).

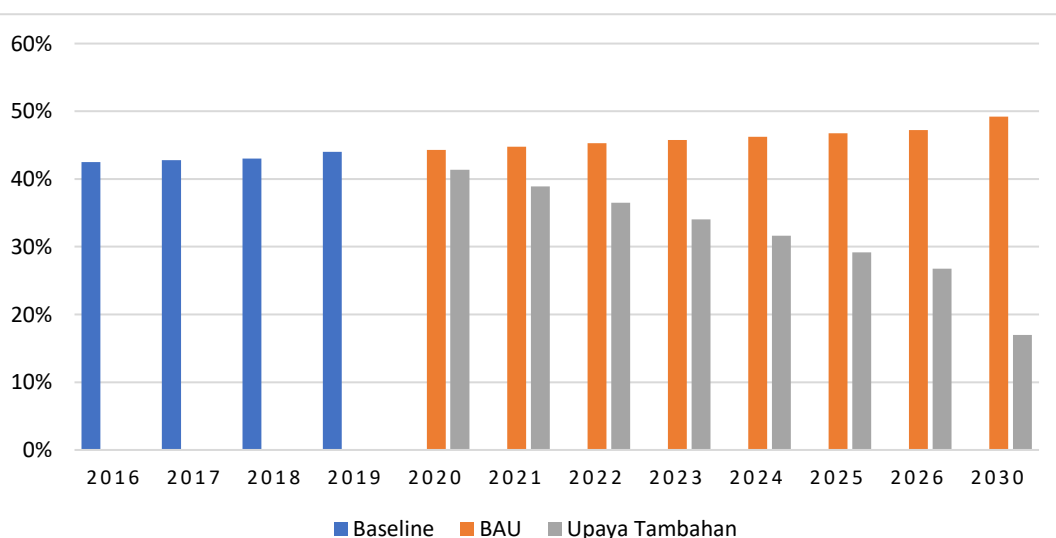
Nomor Indikator : 2.1.1 (a)

Analisis DDDTLH:

Indikator Terkait DDDTLH : Penyediaan Pangan

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	42,50%		
2017	42,80%		
2018	43,00%		
2019	44,00%	44,00%	44,00%
2020		44,00%	41,15%
2021		44,78%	38,93%
2022		45,27%	36,49%
2023		45,76%	34,05%
2024		46,25%	31,62%
2025		46,74%	29,18%
2026		47,23%	26,75%
2030		49,19%	17,00%





Isu Strategis TPB:

Rendahnya akses terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Rekomendasi Program:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

3. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.

Tujuan:

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.

Target:

Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).

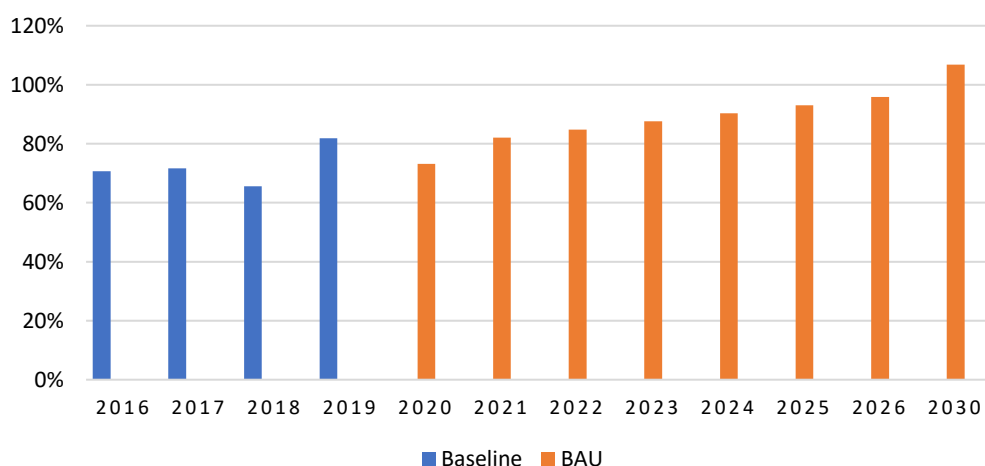
Nomor Indikator : 3.1.2 (a)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait langsung dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

3.1.2 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	65,5%		
2017	70,7%		
2018	71,7%		
2019	65,6%	65,6%	
2020		73,1%	
2021		82,1%	
2022		84,8%	
2023		87,6%	
2024		90,3%	
2026		93,1%	
2030		100%	





Isu Strategis TPB:

Masih tingginya rasio angka kematian ibu.

Rekomendasi Program

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

4. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.

Tujuan:

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.

Target:

Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).

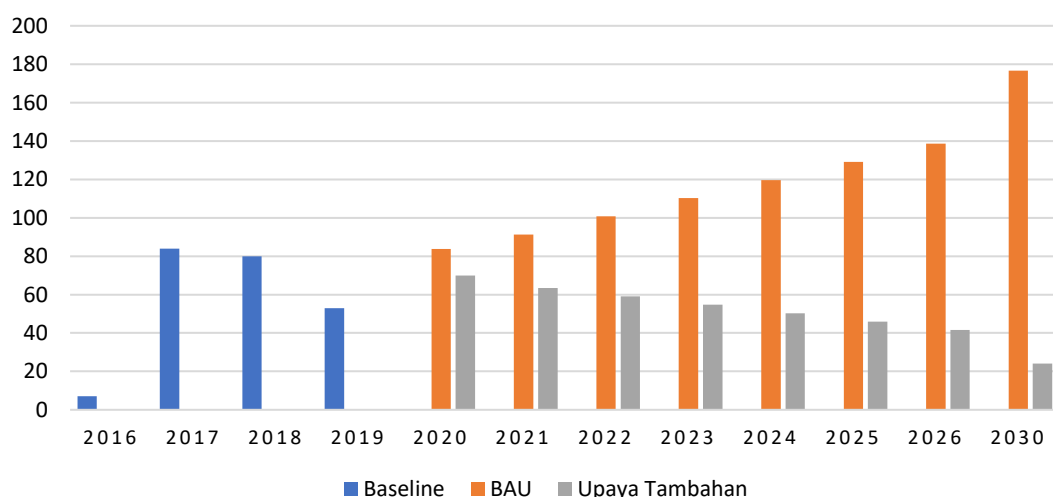
Nomor Indikator : 3.2.2 (a)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait langsung dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	7		
2017	84		
2018	80		
2019	53	53	70
2020		84	63
2021		91	59
2022		101	55
2023		110	70
2024		120	50
2025		129	46
2026		139	42
2030		177	24





Isu Strategis TPB:

Masih tingginya rasio angka kematian ibu.

Rekomendasi Program

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

5. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.

Tujuan:

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target:

Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).

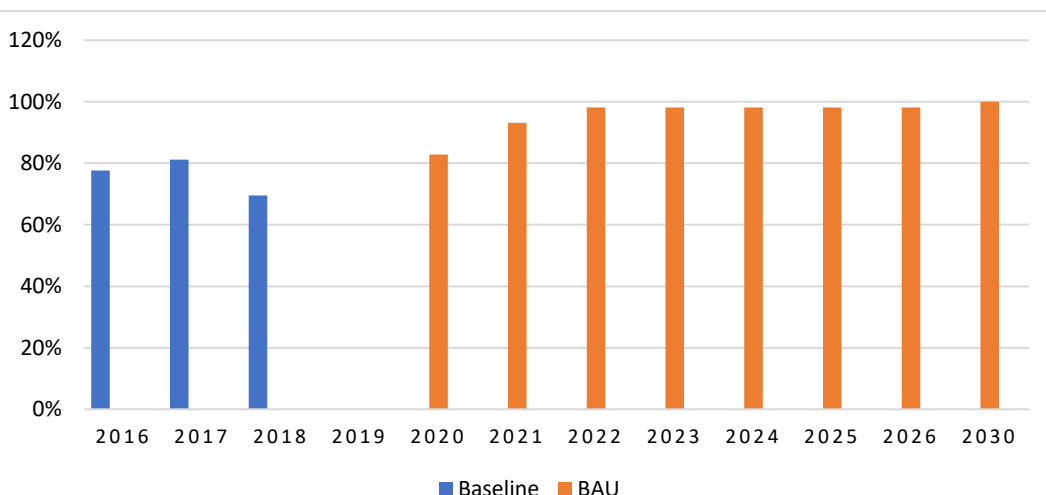
Nomor Indikator : 3.2.2 (b)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait langsung dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

3.2.2 (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	77,60%		
2017	81,20%		
2018	69,56%		
2019	0	0	
2020		82,82%	
2021		93,11%	
2022		98,10%	
2023		98,10%	
2024		98,10%	
2025		98,10%	
2026		98,10%	
2030		100%	





Isu Strategis TPB:

Masih tingginya rasio angka kematian ibu.

Rekomendasi Program:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

6. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.

Tujuan:

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.

Target:

Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).

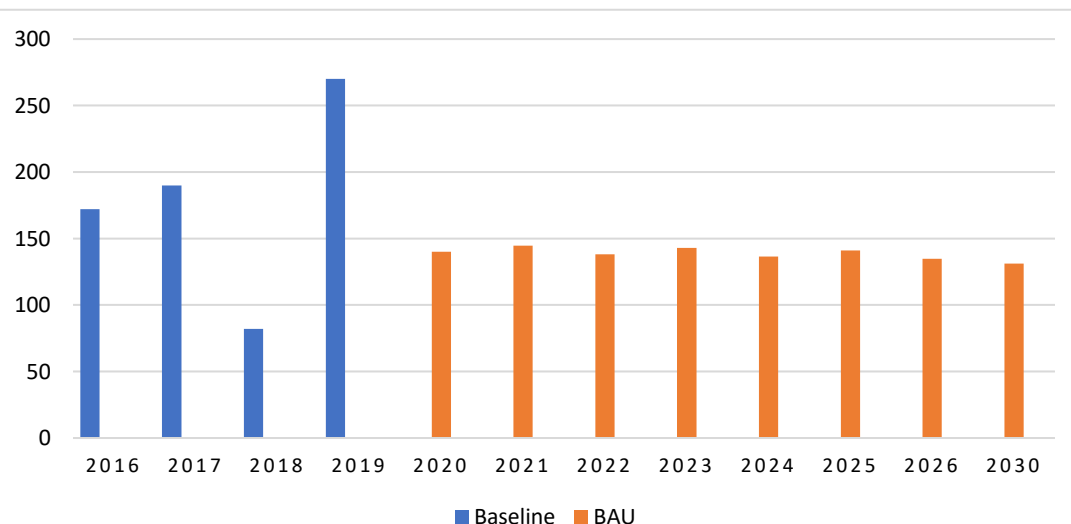
Nomor Indikator : 3.3.2 (a)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait langsung dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	172		
2017	190		
2018	82		
2019	270	270	
2020		140	
2021		145	
2022		138	
2023		143	
2024		136	
2025		141	
2026		145	
2030		131	





Isu Strategis TPB:

Masih adanya epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

Rekomendasi Program:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

7. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.

Tujuan:

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target:

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).

Nomor Indikator : 4.1.1 (d)

Analisis DDDTLH:

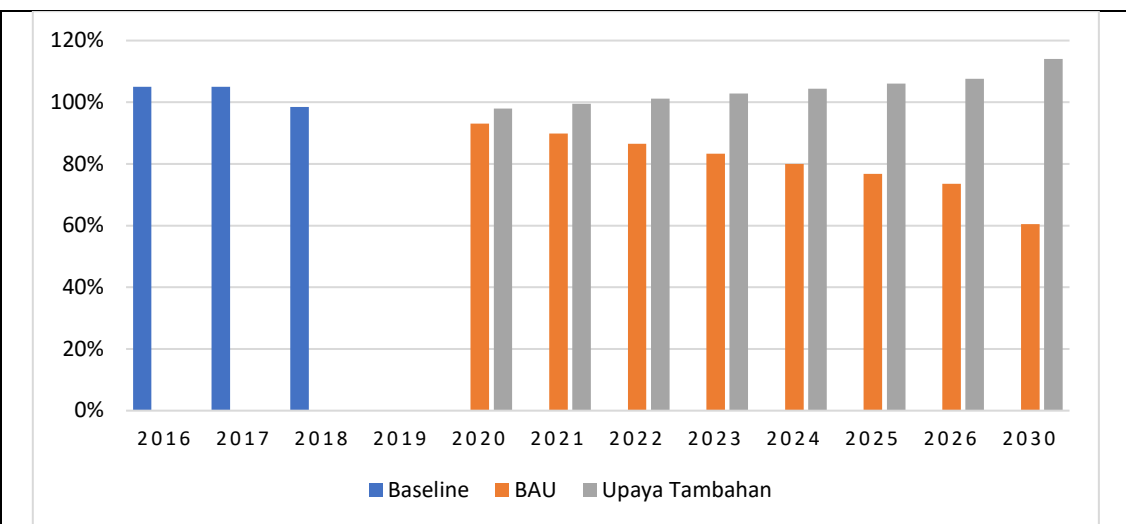
Indikator ini tidak terkait langsung dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	0		
2017	105%		
2018	105%		
2019	98,49%		
2020	0		
2021		93,07%	97,94%
2022		89,81%	99,55%
2023		86,55%	101,17%
2024		83,30%	102,78%
2025		80,04%	104,40%
2026		76,79%	106,01%
2030		60,51%	114,09%



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Isu Strategis TPB:

Masih rendahnya jaminan pendidikan dasar dan menengah.

Rekomendasi Program:

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pengembangan Kurikulum
- Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

8. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat

Tujuan:

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

Target:

Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).

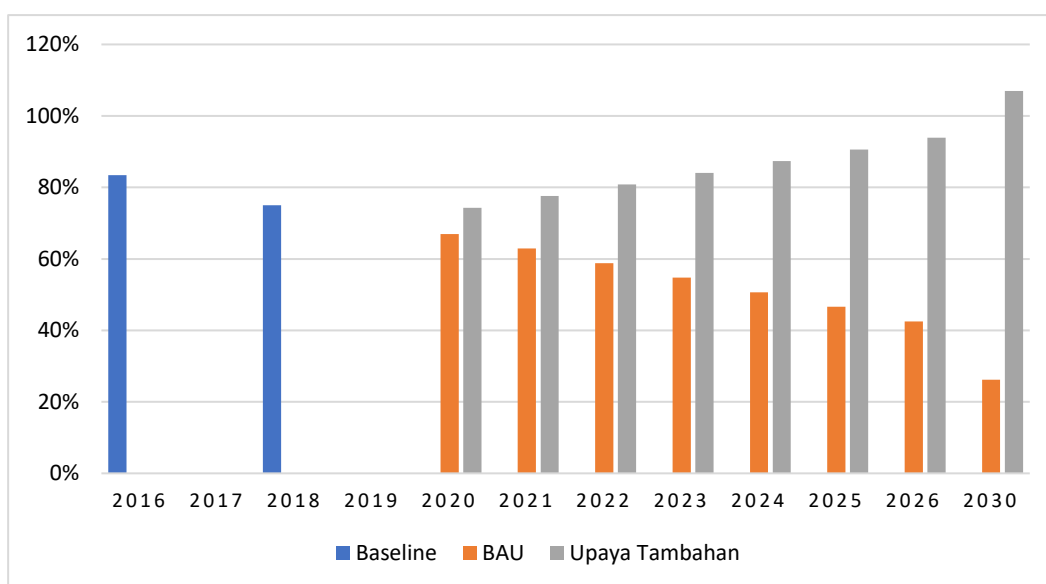
Nomor Indikator : 4.1.1 (e)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait langsung dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	83,47%		
2017	0		
2018	75,04%		
2019	0	0	0
2020		66,96%	74,30%
2021		62,89%	77,56%
2022		58,82%	80,83%
2023		54,74%	84,09%
2024		50,67%	87,36%
2025		46,60%	90,62%
2026		42,52%	93,88%
2030		106,94%	26,23%



Isu Strategis TPB:

Masih rendahnya jaminan pendidikan dasar dan menengah.

Rekomendasi Program:

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pengembangan Kurikulum
- Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

9. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.

Tujuan:

Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).

Target:

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

Nomor Indikator : 4.1.1 (g)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait langsung dengan DDDTLH

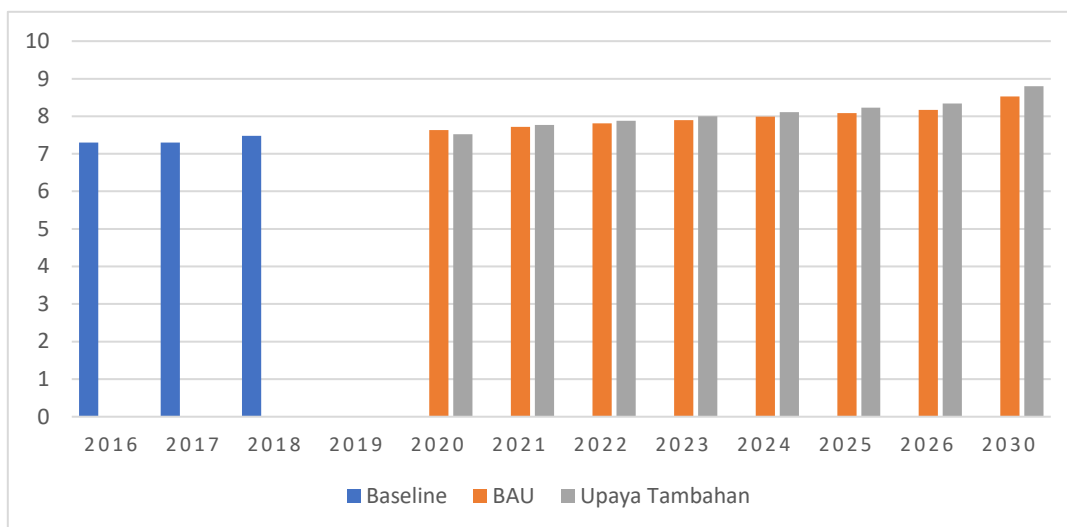
Proyeksi Capaian Indikator TPB:

4.1.1 (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	7,3		
2017	7,3		
2018	7,48		
2019	0	0	0
2020		7,6	7,5
2021		7,7	7,8
2022		7,8	7,9
2023		7,9	8,0
2024		8,0	8,1



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

2025		8,1	8,2
2026		8,2	8,3
2030		8,5	8,8



Isu Strategis TPB:

Masih rendahnya jaminan pendidikan dasar dan menengah.

Rekomendasi Program:

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pengembangan Kurikulum

10. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.

Tujuan:

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

Target:

Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).

Nomor Indikator : 4.6.1 (a)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait langsung dengan DDDTLH

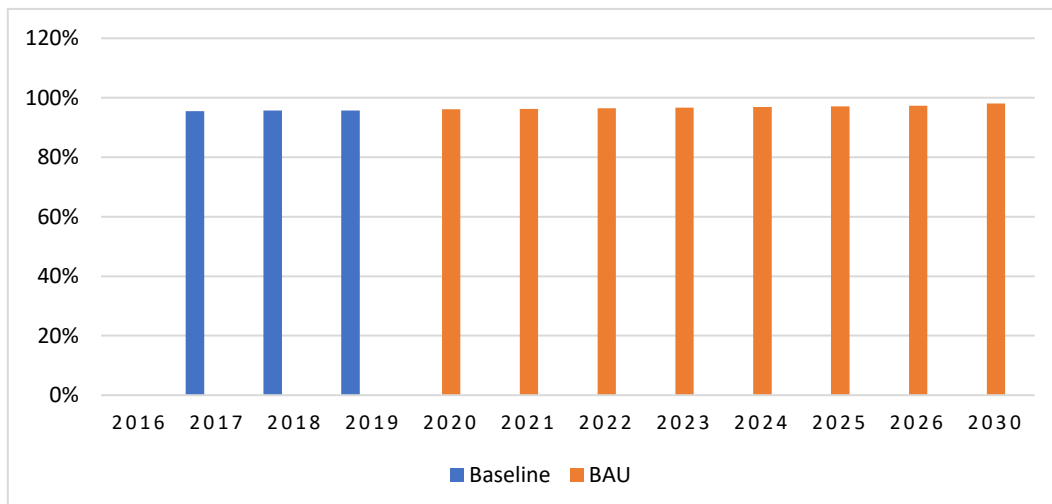
Proyeksi Capaian Indikator TPB:

4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	0		
2017	95,5%		
2018	95,7%		
2019	95,7%	95,7%	
2020		96,1%	
2021		96,3%	
2022		96,5%	
2023		96,7%	



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

2024		96,9%	
2025		97,1%	
2026		97,3%	
2030		98,1%	



Isu Strategis TPB:

Masih rendahnya jaminan pendidikan dasar dan menengah.

Rekomendasi Program:

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pengembangan Kurikulum

11. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.

Tujuan:

Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan.

Target:

Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).

Nomor Indikator : 6.1.1 (a)

Analisis DDDTLH:

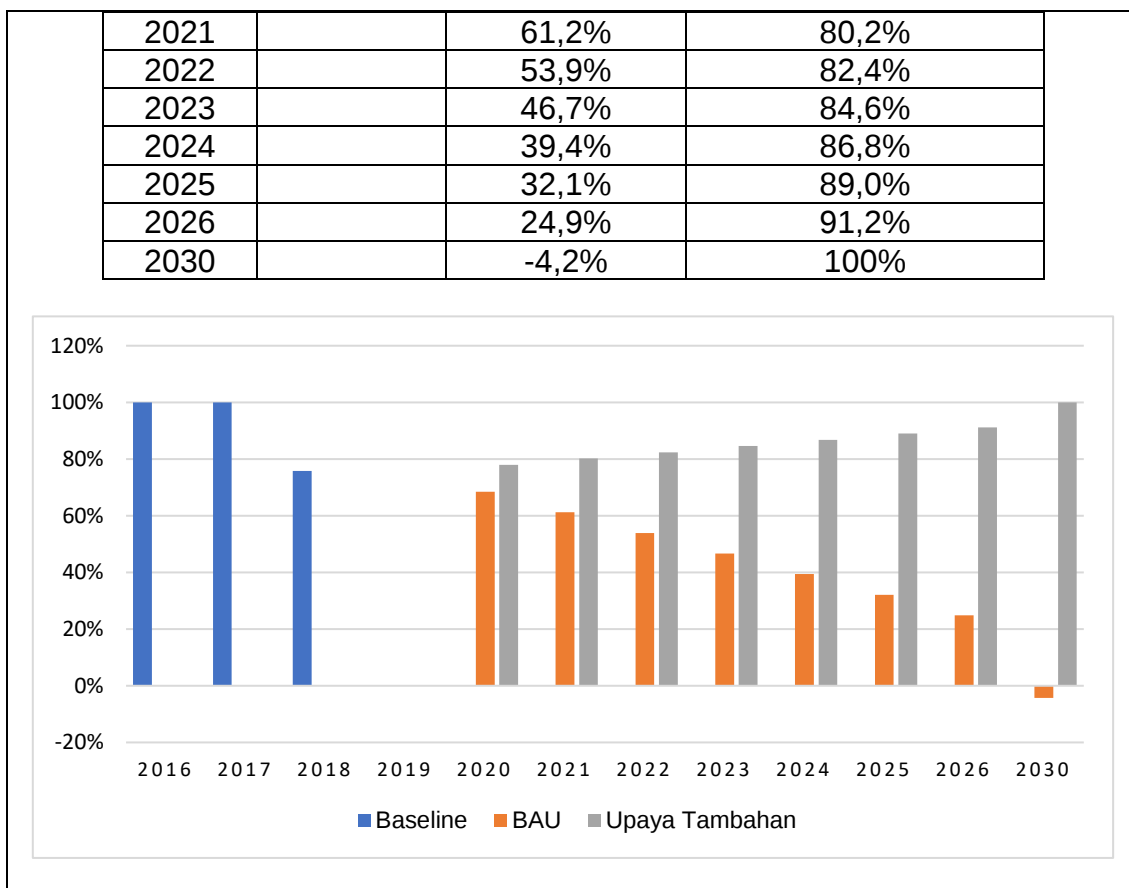
Indikator ini terkait langsung dengan DDDTLH Jasa Penyediaan Air dan Pengaturan Air

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	100%		
2017	100%		
2018	75,8%		
2019	0	0	0
2020		68,5%	78,0%



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Isu Strategis TPB:

Rendahnya akses air minum yang aman dan terjangkau.

Rekomendasi Program:

- Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
- Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

12. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

Tujuan:

Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan.

Target:

Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).

Nomor Indikator : 6.2.1 (b)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini terkait langsung dengan DDDTLH Jasa Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah

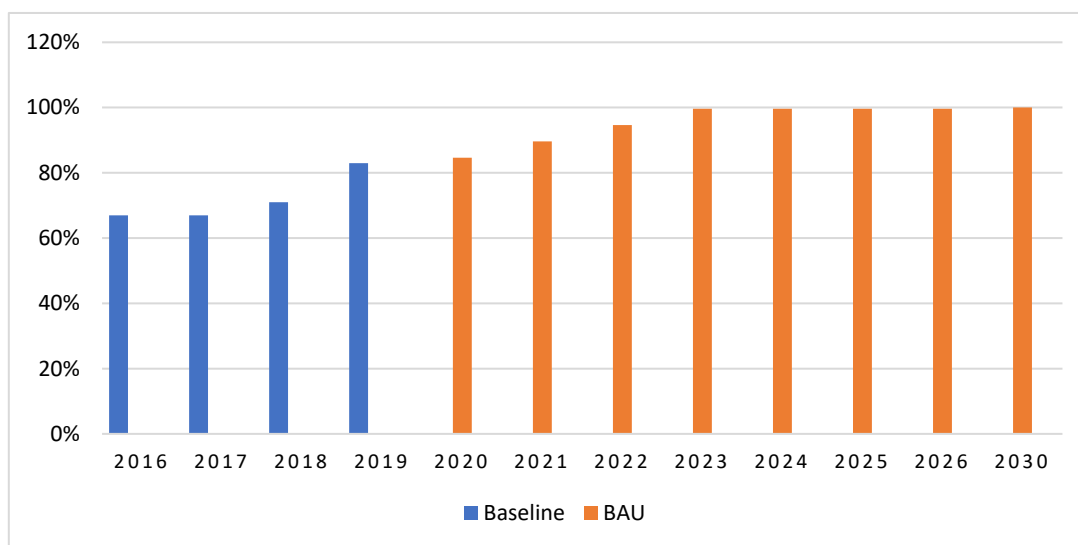
Proyeksi Capaian Indikator TPB:

6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	67%		



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

2017	67%		
2018	71%		
2019	83%		
2020		84,6%	
2021		89,6%	
2022		94,6%	
2023		99,6%	
2024		99,6%	
2025		99,6%	
2026		99,6%	
2030		100%	



Isu Strategis TPB:

Rendahnya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai.

Rekomendasi Program:

- Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
- Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
- Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah



6.2.2 Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB Prioritas 2

1. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.

Tujuan:

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target:

(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)

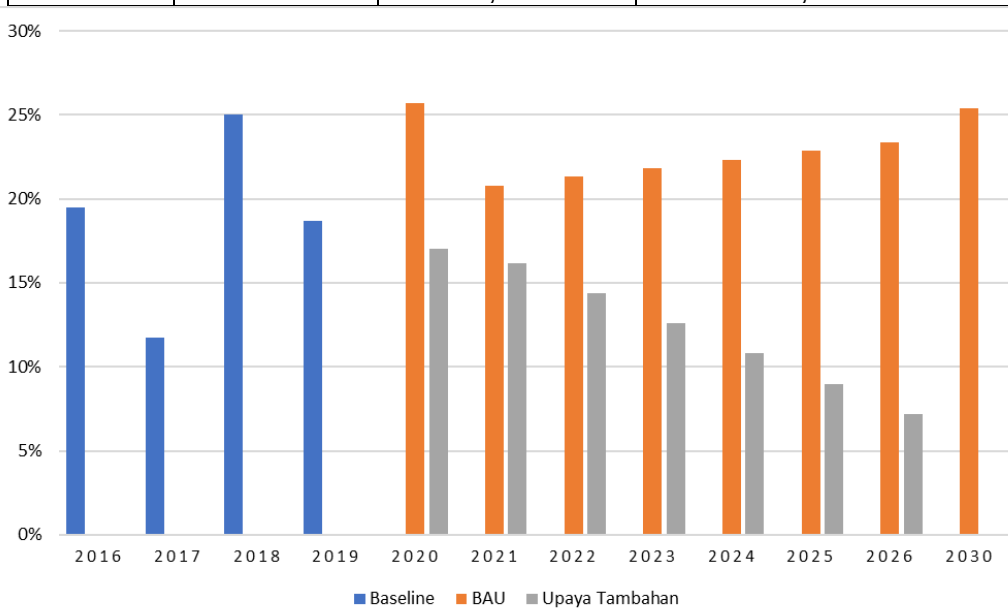
Nomor Indikator : 2.2.1

Analisis DDDTLH:

Indikator Tidak Terkait DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	18,90%		
2017	19,50%		
2018	11,72%		
2019	25%	25%	25%
2020		20,80%	16,19%
2021		21,31%	14,39%
2022		21,82%	12,59%
2023		22,33%	10,79%
2024		22,84%	8,99%
2025		23,35%	7,19%
2026		20,80%	16,19%
2030		25,39%	0,00%



Isu Strategis TPB:



Rendahnya akses terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Rekomendasi Program:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

2. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun

Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target: Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).

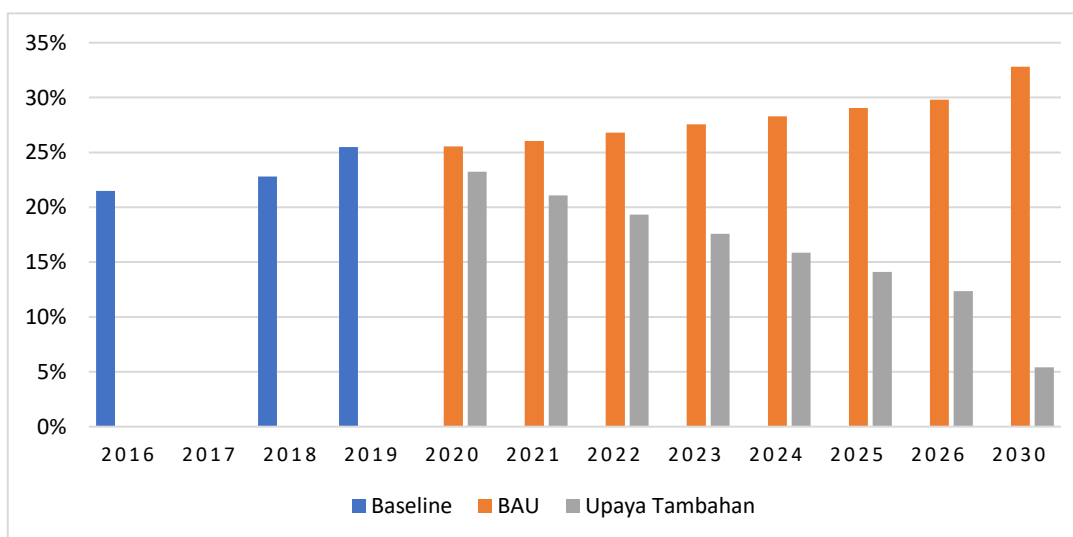
Nomor Indikator : 3.4.1 (a)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait langsung dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	22,40%		
2017	21,50%		
2018	0		
2019	22,80%		
2020	25,50%		
2021		25,54%	23,25%
2022		26,05%	21,07%
2023		26,80%	19,33%
2024		27,55%	17,59%
2025		28,30%	15,85%
2026		29,05%	14,10%
2030		32,80%	5,4%





Isu Strategis TPB:

Masih adanya hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular dan belum meningkatnya kesehatan mental dan kesejahteraan.

Rekomendasi Program:

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

6.2.3 Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB Prioritas 3

1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Tujuan:

Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target:

Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).

Nomor Indikator : 1.2.1*

Analisis DDDTLH:

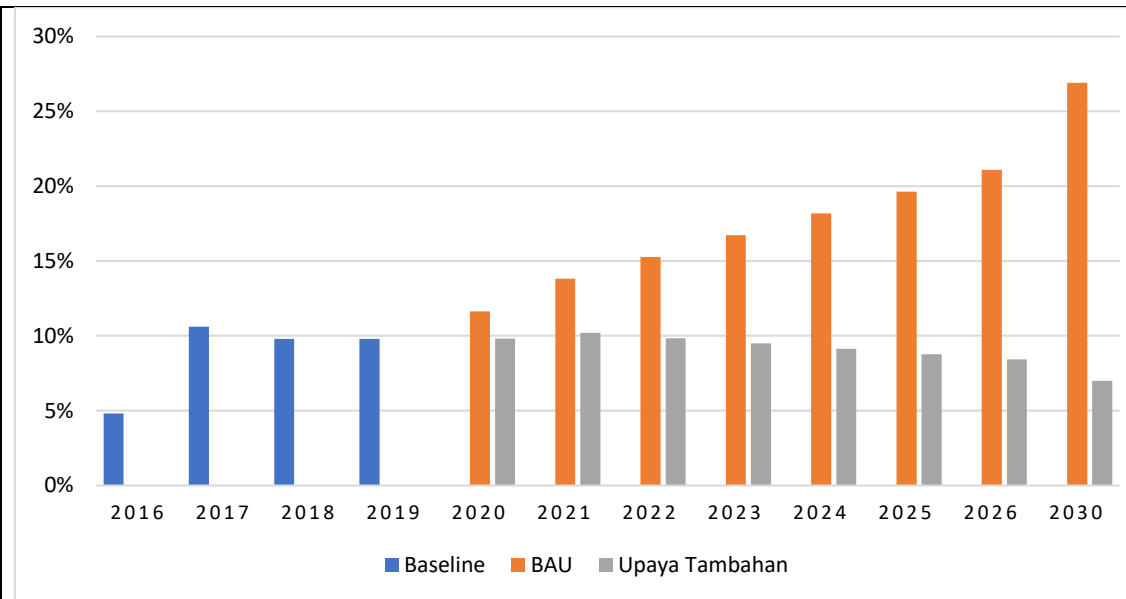
Indikator ini tidak terkait langsung dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	5,02%		
2017	4,82%		
2018	10,60%		
2019	9,80%	9,80%	9,80%
2020		11,64%	9,83%
2021		13,82%	10,20%
2022		15,28%	9,85%
2023		16,73%	9,49%
2024		18,19%	9,14%
2025		19,64%	8,78%
2026		21,09%	8,42%
2030		26,91%	7,00%



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Isu Strategis TPB:

Masih adanya setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi.

Rekomendasi Program:

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).

Tujuan:

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.

Target:

(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)

Nomor Indikator : 2.1.1

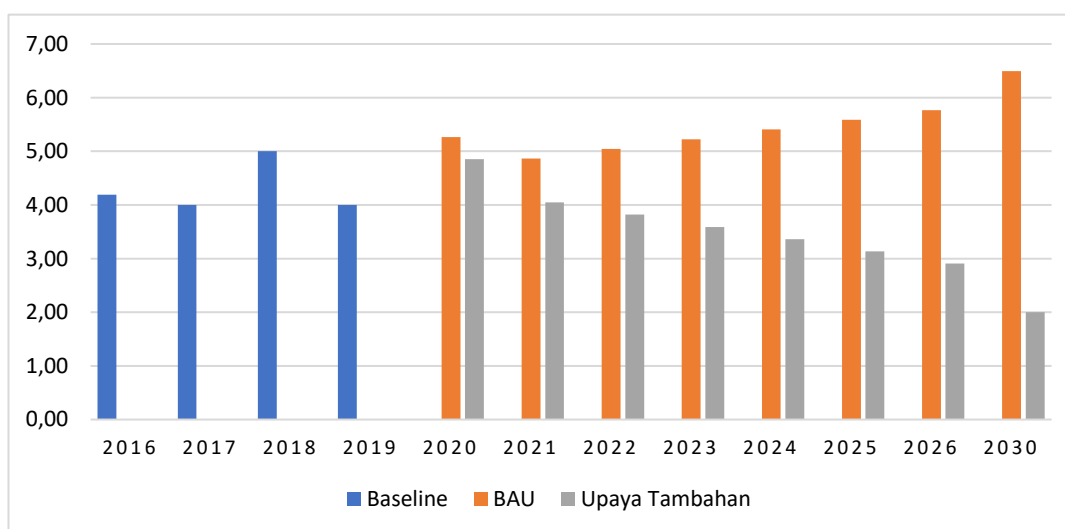
Analisis DDDTLH:

Indikator Terkait DDDTLH : Penyediaan Pangan



Proyeksi Capaian Indikator TPB:

2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	3,50		
2017	4,19		
2018	4,00		
2019	5,00		
2020	4,00		
2021		5,26	4,86
2022		4,86	4,05
2023		5,04	3,82
2024		5,22	3,59
2025		5,40	3,36
2026		5,59	3,14
2030		6,49	2,00



Isu Strategis TPB:

Masih adanya setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi.

Rekomendasi Program:

1. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat



3. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.

Tujuan:

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target:

(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)

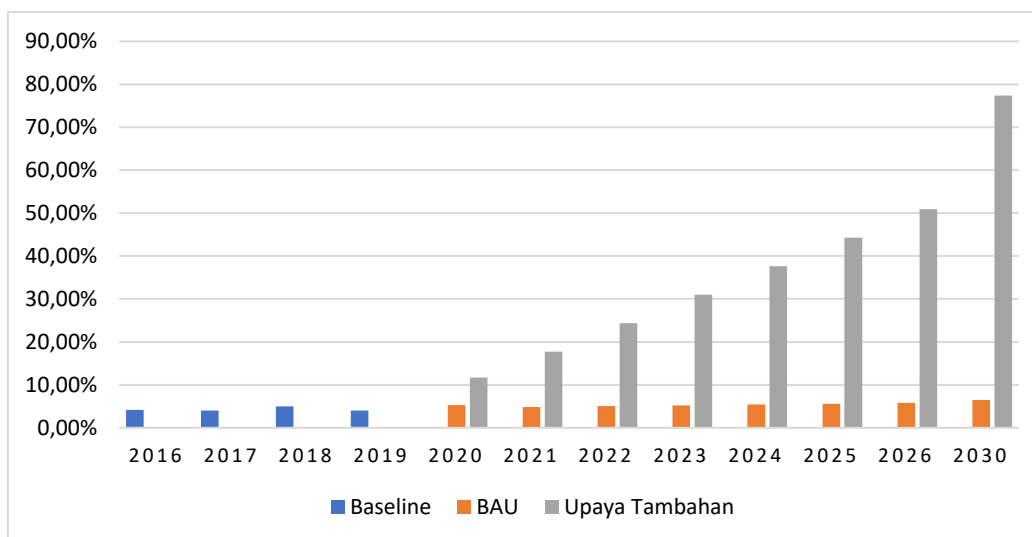
Nomor Indikator : 2.1.2

Analisis DDDTLH:

Indikator Terkait DDDTLH : Penyediaan Pangan

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

2.1.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	3,50%		
2017	4,19%		
2018	4,0%		
2019	5,0%	5,0%	5,0%
2020		5,3%	11,7%
2021		4,9%	17,8%
2022		5,0%	24,4%
2023		5,2%	31,0%
2024		5,4%	37,6%
2025		5,6%	44,3%
2026		5,8%	50,9%
2030		6,5%	77,4%



Isu Strategis TPB:

Rendahnya akses terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Rekomendasi Program:



Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

4. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.

Tujuan:

Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Target:

Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).

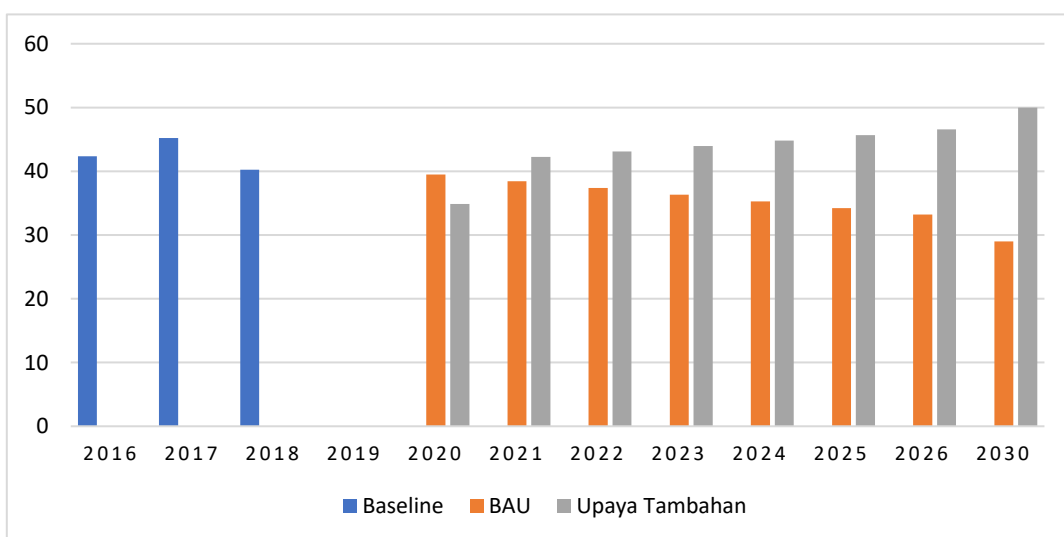
Nomor Indikator : 5.5.1*

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	42,34		
2017	45,21		
2018	40,25		
2019	0	0	0
2020		39,5	34,9
2021		38,4	42,2
2022		37,4	43,1
2023		36,3	44,0
2024		35,3	44,8
2025		34,2	45,7
2026		33,2	46,5
2030		29,0	50,0



Isu Strategis TPB:

Masih adanya kelaparan dan belum terjaminnya akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan,



termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Rekomendasi Program:

Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

5. Laju pertumbuhan PDB per kapita.

Tujuan:

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target:

Meningkat

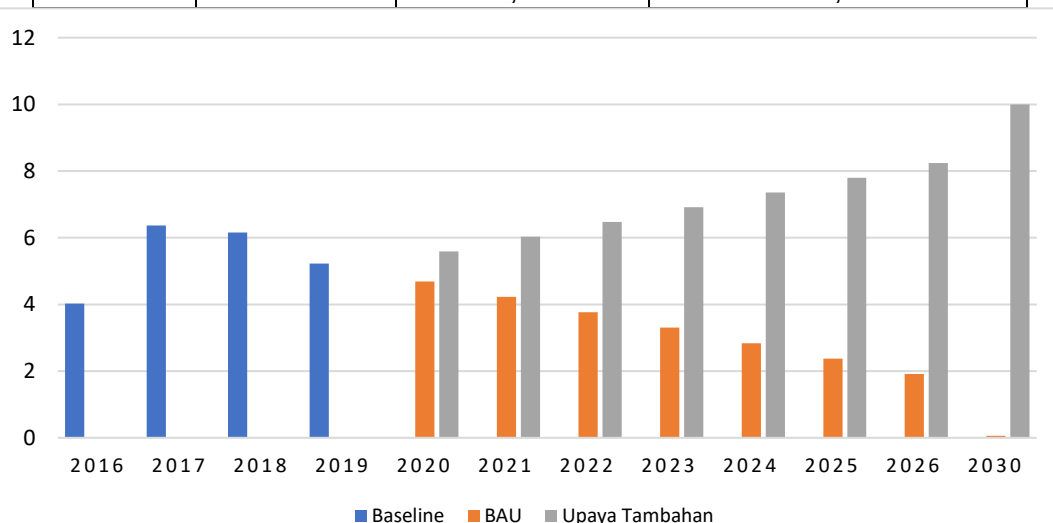
Nomor Indikator : 8.1.1*

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	4,03		
2017	6,37		
2018	6,16		
2019	5,23	5,23	5,23
2020		4,69	5,59
2021		4,23	6,04
2022		3,77	6,48
2023		3,30	6,92
2024		2,84	7,36
2025		2,38	7,80
2026		1,91	8,24
2030		0,06	10,00





Isu Strategis TPB:

Kurangnya upaya dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita.

Rekomendasi Program:

- Program pengelolaan keuangan daerah
- Program pengelolaan pendapatan daerah

6. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.

Tujuan:

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target:

Menurun

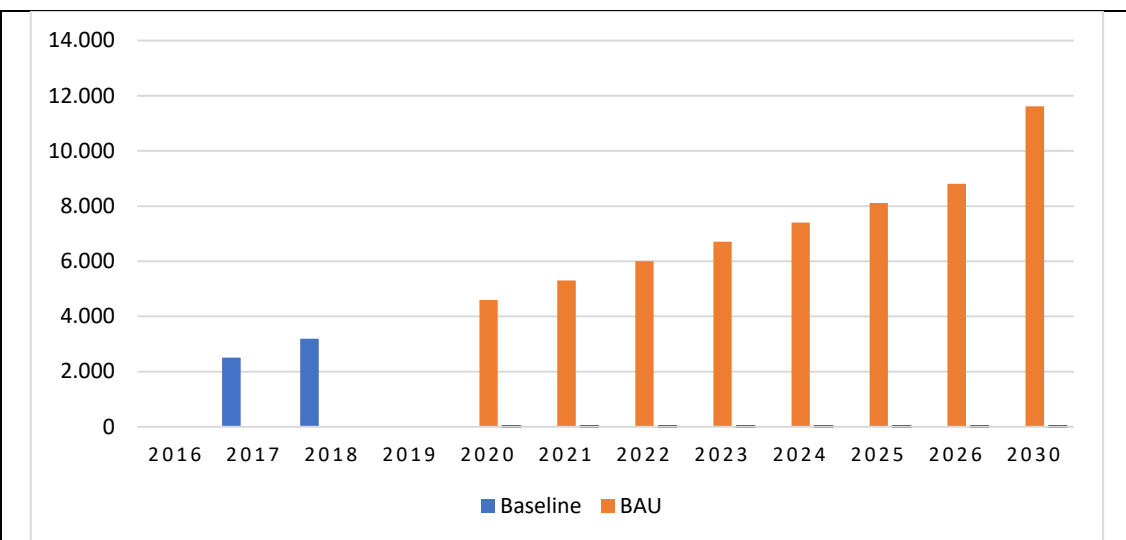
Nomor Indikator : 8.5.2*

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	1085		
2017	0		
2018	2504		
2019	3188		
2020	0		
2021		4600	4,69
2022		6004	3,77
2023		6706	3,30
2024		7409	2,84
2025		8111	2,38
2026		8813	1,91
2030		11622	0,06



Isu Strategis TPB:

Belum tercapainya pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Rekomendasi Program:

Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota

7. Laju pertumbuhan PDB industry manufaktur.

Tujuan:

Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Target:

Meningkatnya laju pertumbuhan PDB 192ndustry manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).

Nomor Indikator : 9.2.1.(a)

Analisis DDDTLH:

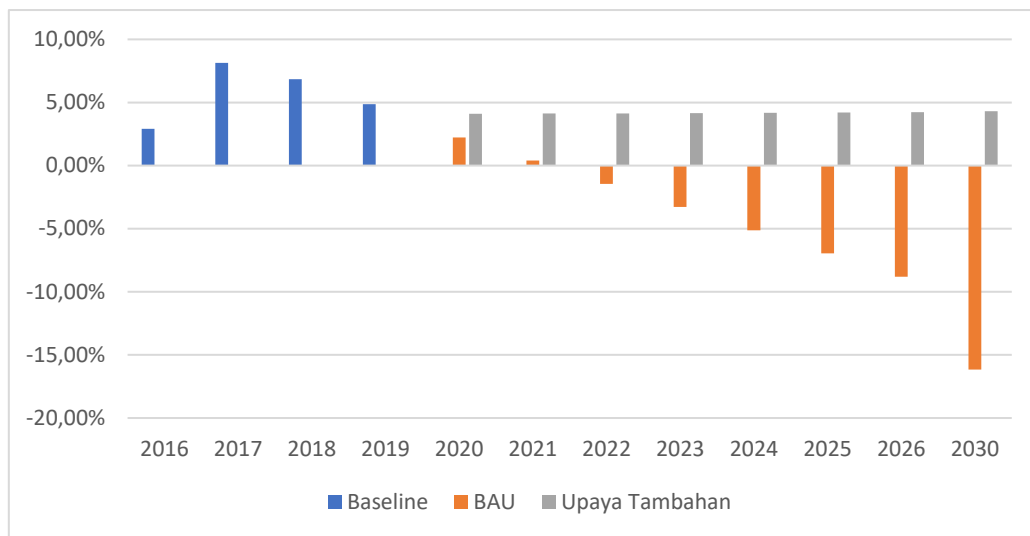
Indikator ini tidak terkait dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB 192ndustry manufaktur.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	2,91%		
2017	8,15%		
2018	6,84%		
2019	4,9%	4,9%	4,9%
2020		2,2%	4,1%
2021		0,4%	4,1%
2022		-1,4%	4,1%
2023		-3,3%	4,2%
2024		-5,1%	4,2%
2025		-7,0%	4,2%
2026		-8,8%	4,2%
2030		-16,2%	4,3%



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu



Isu Strategis TPB:

Kurangnya promosi industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta secara signifikan belum meningkatnya proporsi industry dalam lapangan kerja dan produk industry bruto.

Rekomendasi Program:

Program pengendalian izin usaha industry kabupaten/kota

8. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Tujuan:

Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

Target:

Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).

Nomor Indikator : 10.1.1.(a)

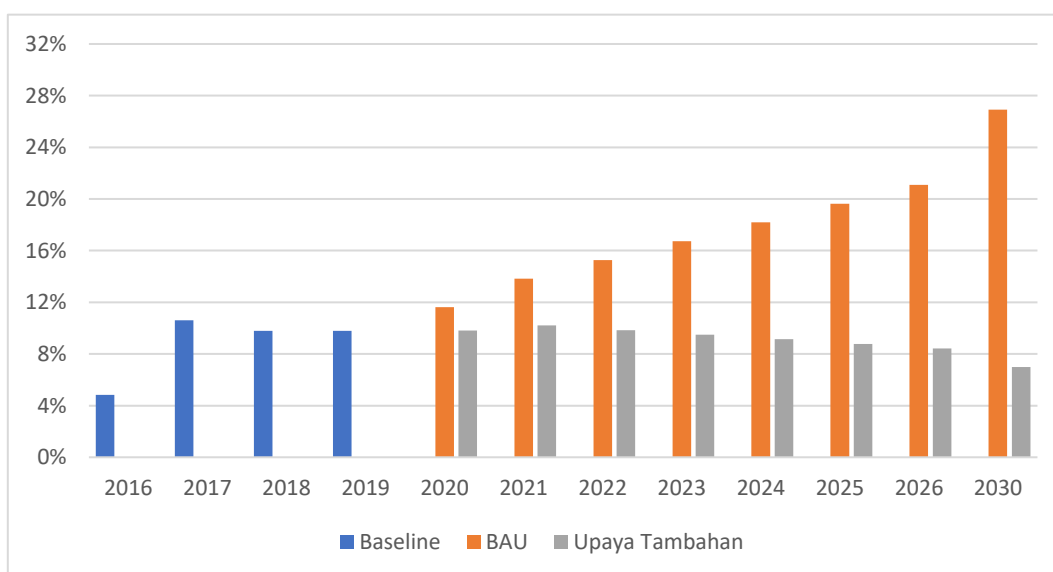
Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait dengan DDDTLH



Proyeksi Capaian Indikator TPB:

10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	4,82%		
2017	10,60%		
2018	9,80%		
2019	9,80%	9,80%	9,80%
2020		12,37%	10,56%
2021		13,82%	10,20%
2022		15,28%	9,85%
2023		16,73%	9,49%
2024		18,19%	9,14%
2025		19,64%	8,78%
2026		21,09%	8,42%
2030		26,91%	7,00%



Isu Strategis TPB:

Belum tercapainya pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi.

Rekomendasi Program:

Program perlindungan dan jaminan sosial

9. Persentase sampah perkotaan yang tertangani.

Tujuan:

Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Target:



Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).

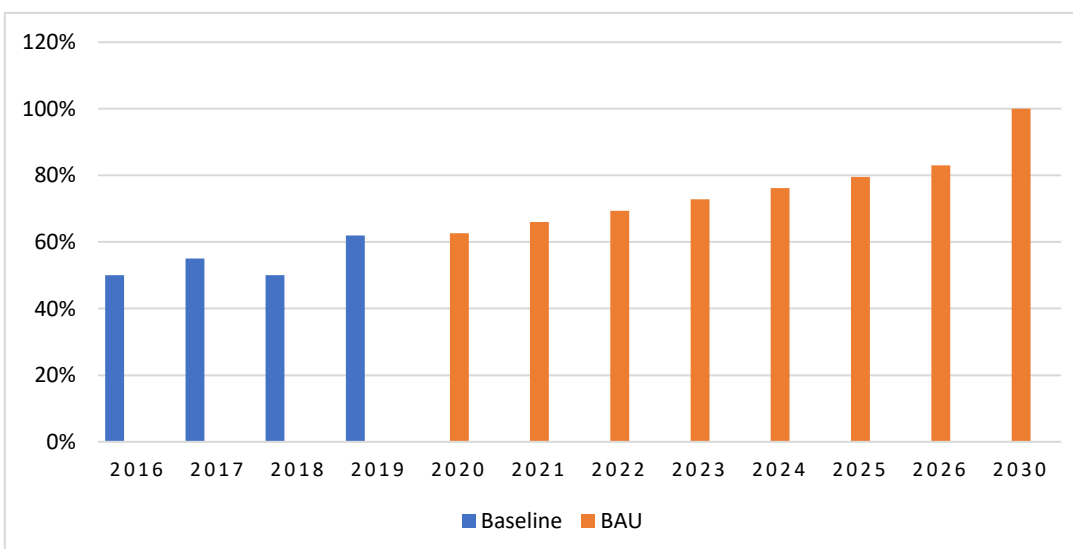
Nomor Indikator : 11.6.1.(a)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini terkait dengan DDDTLH Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	50%		
2017	55%		
2018	50%		
2019	62%	62%	
2020		63%	
2021		66%	
2022		69%	
2023		73%	
2024		76%	
2025		80%	
2026		83%	
2030		100%	



Isu Strategis TPB:

Masih adanya dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan belum diberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

Rekomendasi Program:

Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional

10. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor 195ndustry).



Tujuan:

Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Target:

Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).

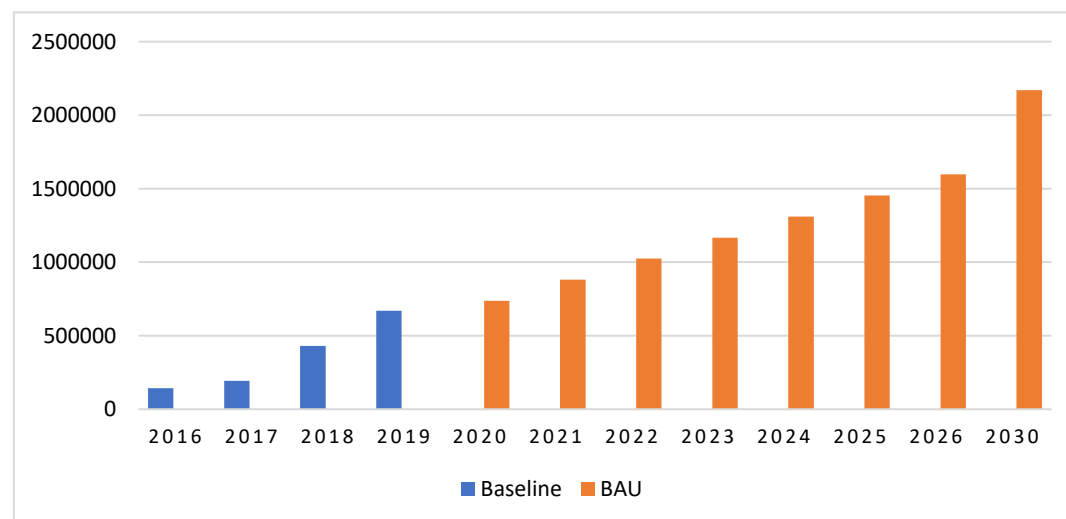
Nomor Indikator : 12.4.2.(a)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor 196ndustry).		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	144.108		
2017	192.478		
2018	431.282		
2019	670.809	670.809	
2020		737.346	
2021		880.711	
2022		1.024.077	
2023		1.167.443	
2024		1.310.808	
2025		1.454.174	
2026		1.740.905	
2030		2.171.002	



Isu Strategis TPB:

Belum optimalnya pencapaian pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, dan secara signifikan masih adanya pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah sehingga masih menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.



Rekomendasi Program:

Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

11. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

Tujuan:

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target:

Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).

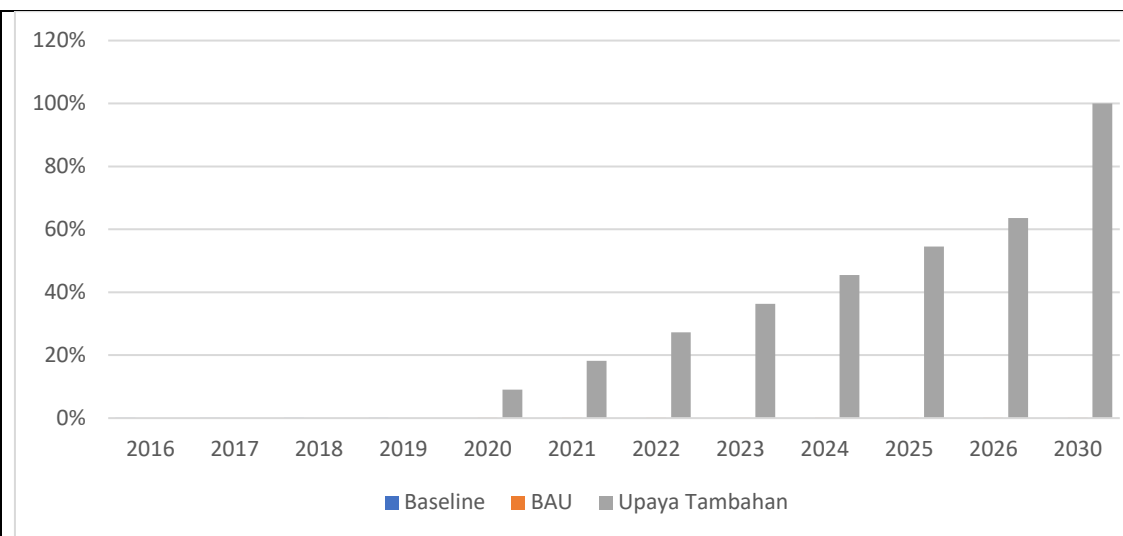
Nomor Indikator : 16.7.1.(b)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	0,01%		
2017	0,01%		
2018	0,01%		
2019	0,01%	0,01%	0,01%
2020		0,01%	9,10%
2021		0,01%	18%
2022		0,01%	27%
2023		0,01%	36%
2024		0,01%	45%
2025		0,01%	55%
2026		0,01%	64%
2030		0,01%	100%



Isu Strategis TPB:

Masih adanya segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.

Rekomendasi Program:

Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

12. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.

Tujuan:

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target:

Meningkat

Nomor Indikator : 16.9.1*

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait dengan DDDTLH

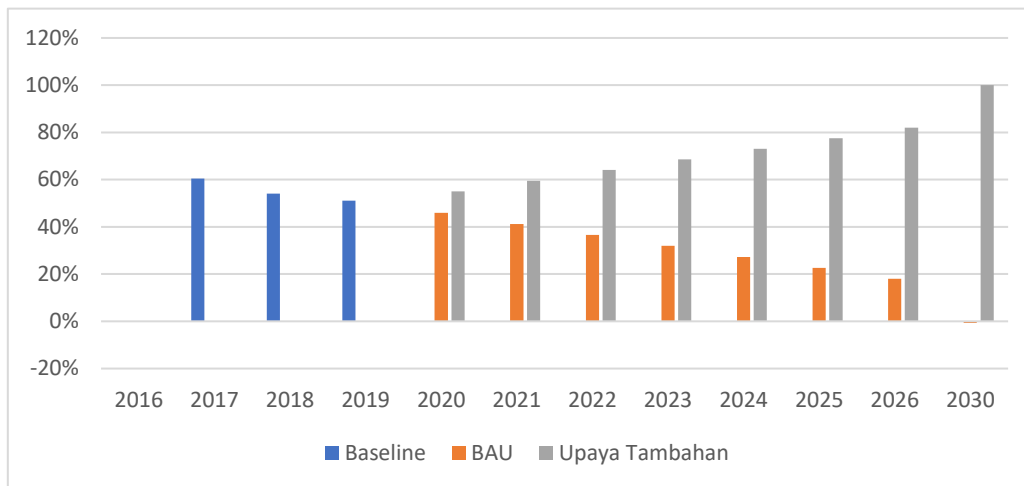
Proyeksi Capaian Indikator TPB:

16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	0		
2017	60,46%		
2018	54,08%		
2019	51,15%	51,15%	51,15%
2020		45,92%	55%
2021		41,26%	60%
2022		36,61%	64%
2023		31,96%	69%
2024		27,30%	73%



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

2025		22,65%	78%
2026		17,99%	82%
2030		-0,63%	100%



Isu Strategis TPB:

Belum optimalnya upaya dalam memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

Rekomendasi Program:

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

13. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.

Tujuan:

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target:

Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).

Nomor Indikator : 16.9.1.(b)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait dengan DDDTLH

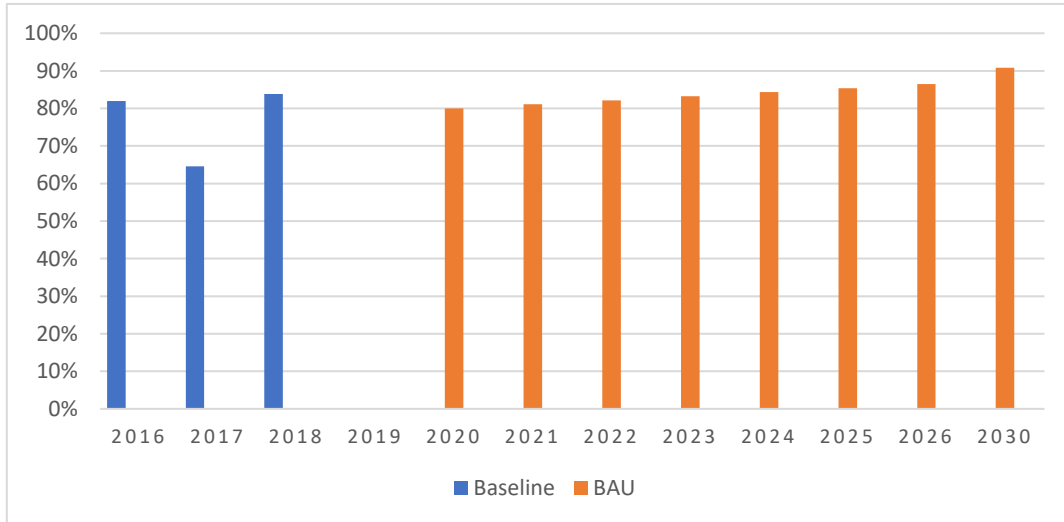
Proyeksi Capaian Indikator TPB:

16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	81,93%		
2017	64,56%		
2018	83,87%		
2019	0	0	
2020		79,99%	
2021		81,07%	
2022		82,15%	
2023		83,23%	



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

2024		84,31%	
2025		85,39%	
2026		86,47%	
2030		100%	



Isu Strategis TPB:

Belum optimalnya upaya dalam memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

Rekomendasi Program:

- Program pendaftaran penduduk
- Program pencatatan sipil
- Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan



6.2.4 Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB Prioritas 4

1. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun			
Target: Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019			
Nomor Indikator : 1.3.1 (a)			
Analisis DDDTLH: Indikator ini tidak terkait langsung dengan DDDTLH			
Proyeksi Capaian Indikator TPB:			
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	16,49%		
2017	38,02%		
2018	51,51%		
2019	54,33%	54,33%	
2020		68,9%	
2021		81,4%	
2022		90,9%	
2023		90,9%	
2024		90,9%	
2025		90,9%	
2026		90,9%	
2030		100%	

Tahun	Baseline (%)	BAU (%)
2016	16,49%	
2017	38,02%	
2018	51,51%	
2019	54,33%	
2020		68,9%
2021		81,4%
2022		90,9%
2023		90,9%
2024		90,9%
2025		90,9%
2026		90,9%
2030		100%



Isu Strategis TPB:

Belum diterapkannya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin dan rentan.

Rekomendasi Program:

Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

2. Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.

Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target: Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).

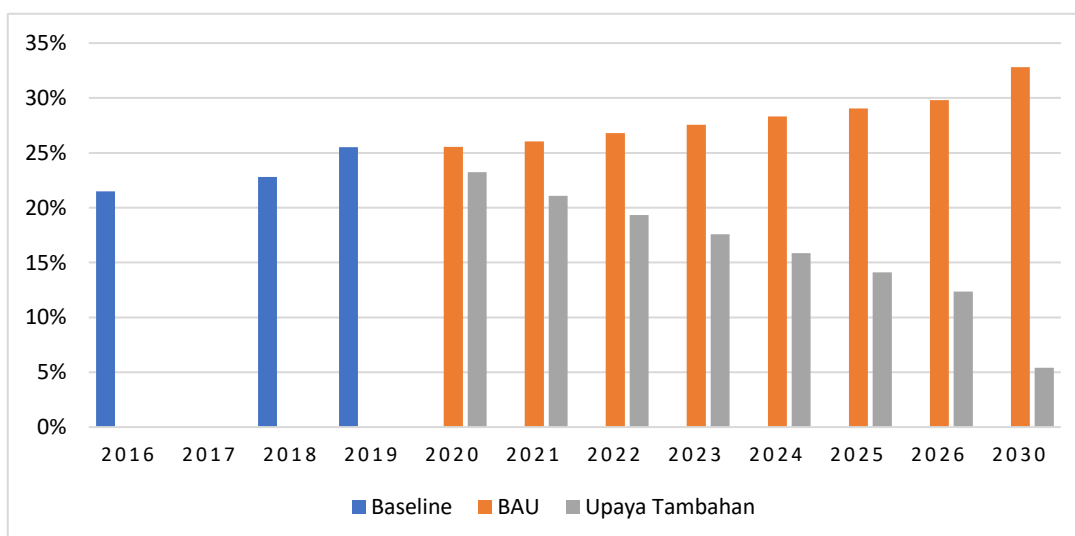
Nomor Indikator : 3.4.1 (a)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait langsung dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	22,40%		
2017	21,50%		
2018	0		
2019	22,80%		
2020	25,50%		
2021		25,54%	23,25%
2022		26,05%	21,07%
2023		26,80%	19,33%
2024		27,55%	17,59%
2025		28,30%	15,85%
2026		29,05%	14,10%
2030		32,80%	5,4%





Isu Strategis TPB:

Masih adanya hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular dan belum meningkatnya kesehatan mental dan kesejahteraan.

Rekomendasi Program:

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

3. Prevalensi penyalahgunaan narkoba.

Tujuan:

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target:

Terkendalnya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).

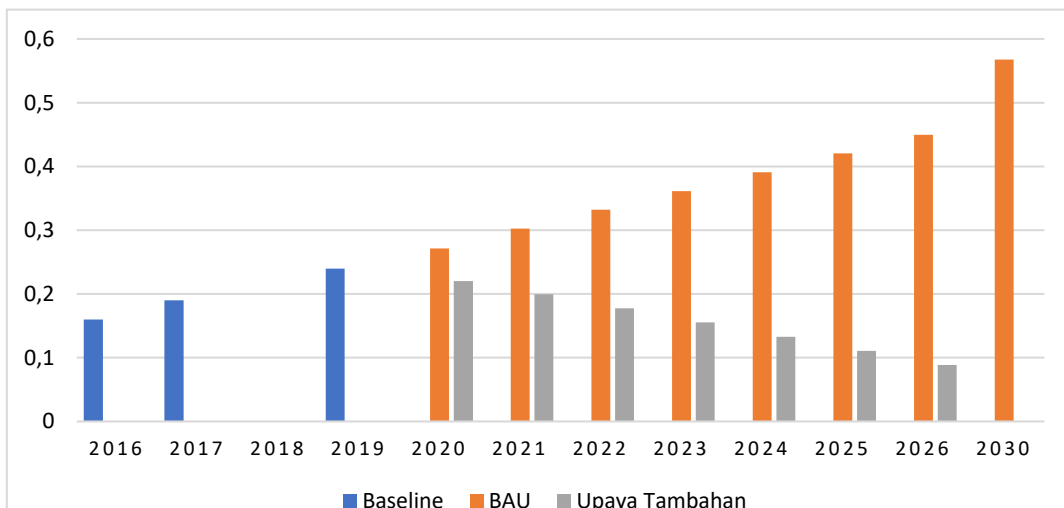
Nomor Indikator : 3.5.1.(e)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	12%		
2017	16%		
2018	19%		
2019	0		
2020	24%		
2021		27%	22,00%
2022		30%	19,94%
2023		33%	17,73%
2024		36%	15,52%
2025		42%	11,09%
2026		45%	8,88%
2030		57%	0,02%





Isu Strategis TPB:

Masih lemahnya upaya pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.

Rekomendasi Program:

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

4. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tujuan:

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target:

Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).

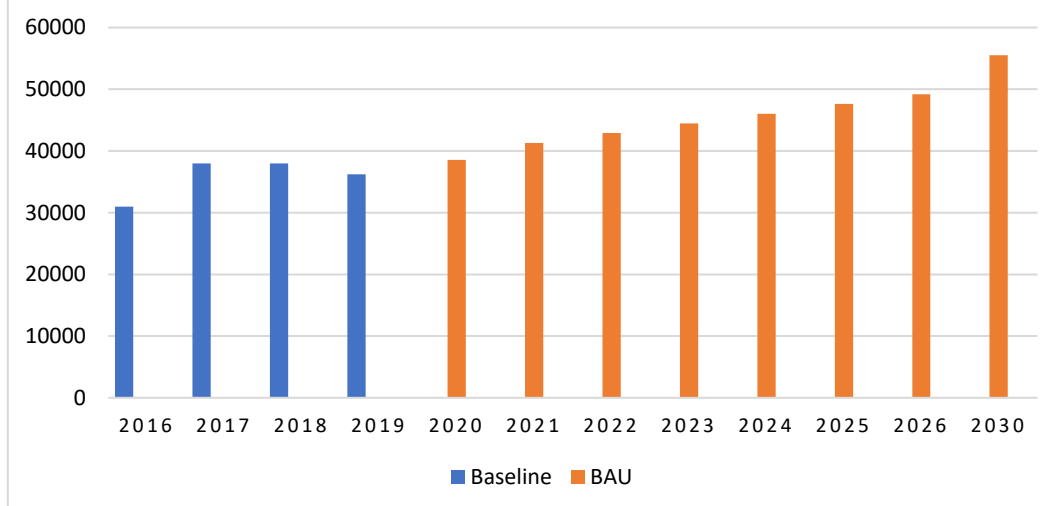
Nomor Indikator : 3.8.2.(a)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	30961		
2017	37961		
2018	37961		
2019	36227	36227	
2020		38536	
2021		41307	
2022		42887	
2023		44466	
2024		46046	
2025		47626	
2026		49206	
2030		55525	



Isu Strategis TPB:

Belum tercapainya cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan belum terjangkau bagi semua orang.

Rekomendasi Program:

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

5. Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.

Tujuan:

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target:

Menurun

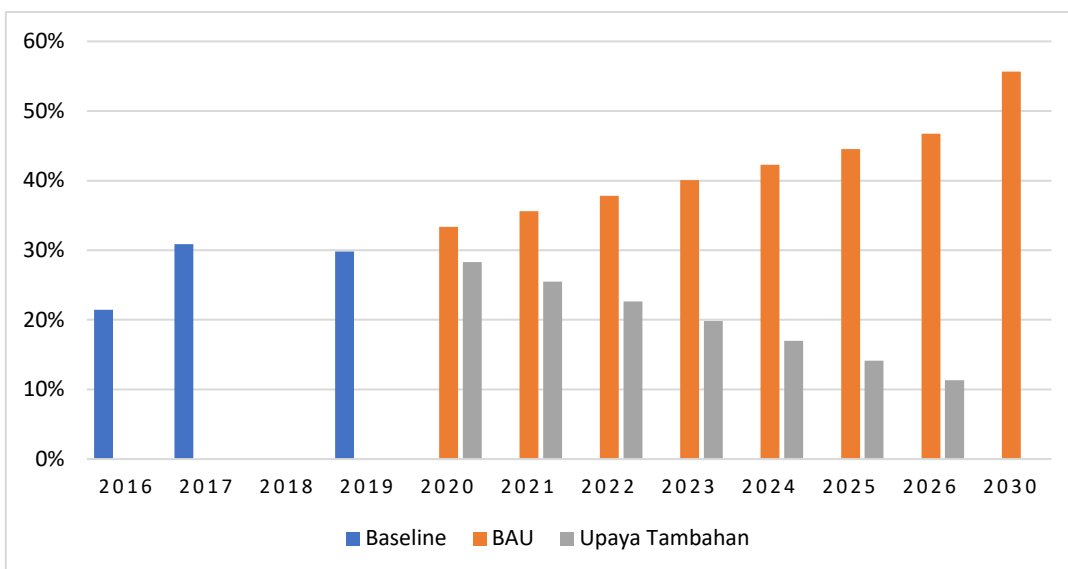
Nomor Indikator : 3.a.1*

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	21,45%		
2017	30,87%		
2018	0		
2019	29,81%	29,81%	29,81%
2020		33,38%	28,32%
2021		35,61%	25,48%
2022		37,83%	22,65%
2023		40,06%	19,82%
2024		42,29%	16,99%
2025		44,52%	14,16%
2026		46,75%	11,33%
2030		55,66%	0,00%



Isu Strategis TPB:

Masih lemahnya pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.

Rekomendasi Program:

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

6. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.

Tujuan:

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target:

Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).

Nomor Indikator : 4.1.1.(b)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait dengan DDDTLH

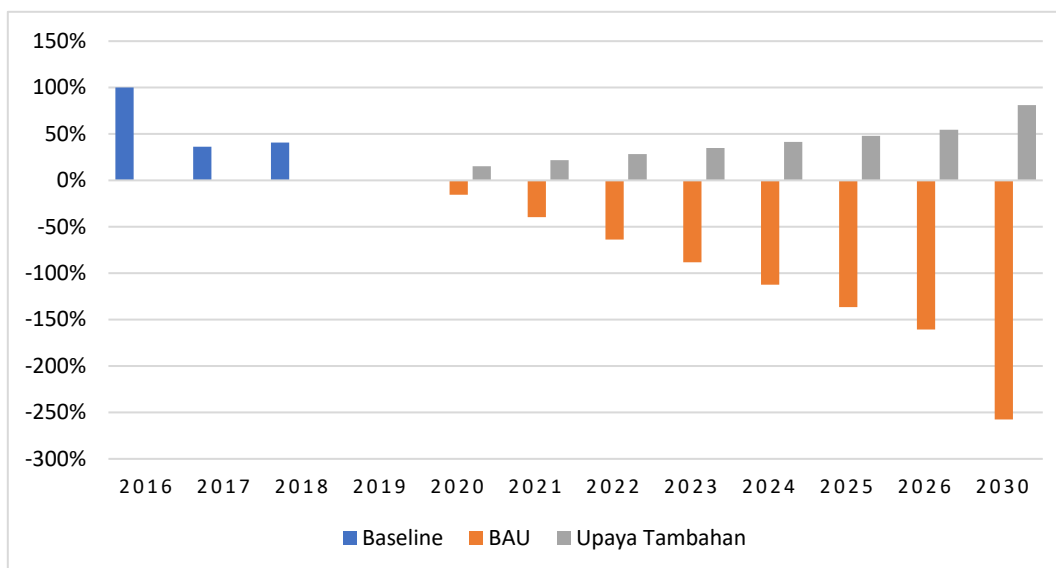
Proyeksi Capaian Indikator TPB:

4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	100%		
2017	36,2%		
2018	40,6%		
2019	0	0	0
2020		-15%	15%
2021		-40%	22%
2022		-64%	28%
2023		-88%	35%
2024		-112%	42%



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

2025		-137%	48%
2026		-161%	55%
2030		-257%	81%



Isu Strategis TPB:

Belum terjaminnya semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Rekomendasi Program:

- Program pengelolaan pendidikan
- Program pengembangan kurikulum
- Program pendidik dan tenaga kependidikan

7. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

Tujuan:

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target:

Menurun

Nomor Indikator : 16.1.3.(a)

Analisis DDDTLH:

Indikator ini tidak terkait dengan DDDTLH

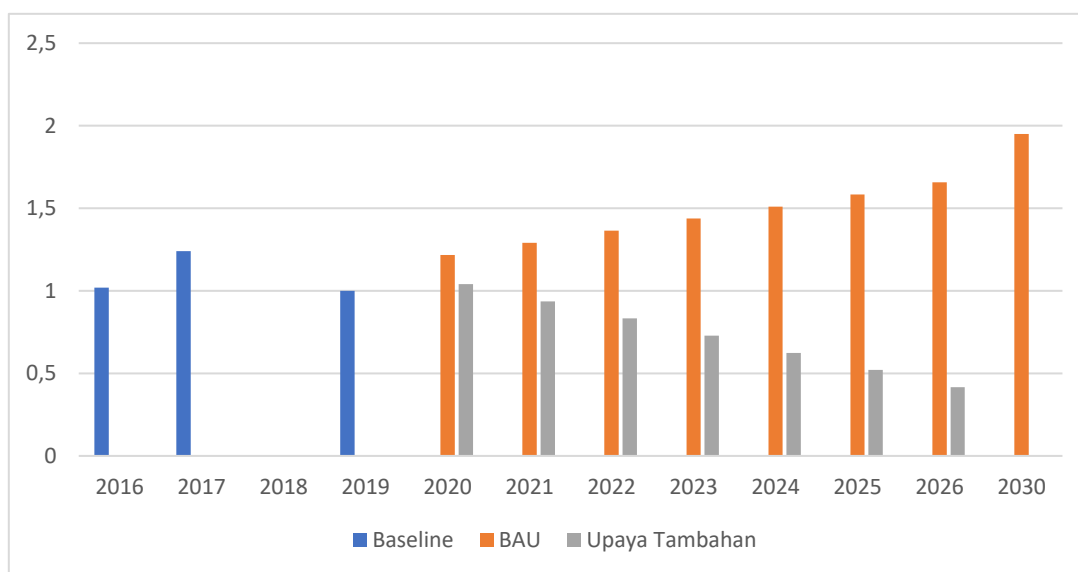
Proyeksi Capaian Indikator TPB:

16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	1,02		
2017	1,24		



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

2018	0		
2019	1,00	1,00	1,00
2020		1,22	1,04
2021		1,29	0,94
2022		1,36	0,83
2023		1,44	0,73
2024		1,51	0,62
2025		1,58	0,52
2026		1,66	0,42
2030		1,95	0,00



Isu Strategis TPB:

Masih adanya segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.

Rekomendasi Program:

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

8. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

Tujuan:

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target:

Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).

Nomor Indikator : 16.5.1.(a)

Analisis DDDTLH:

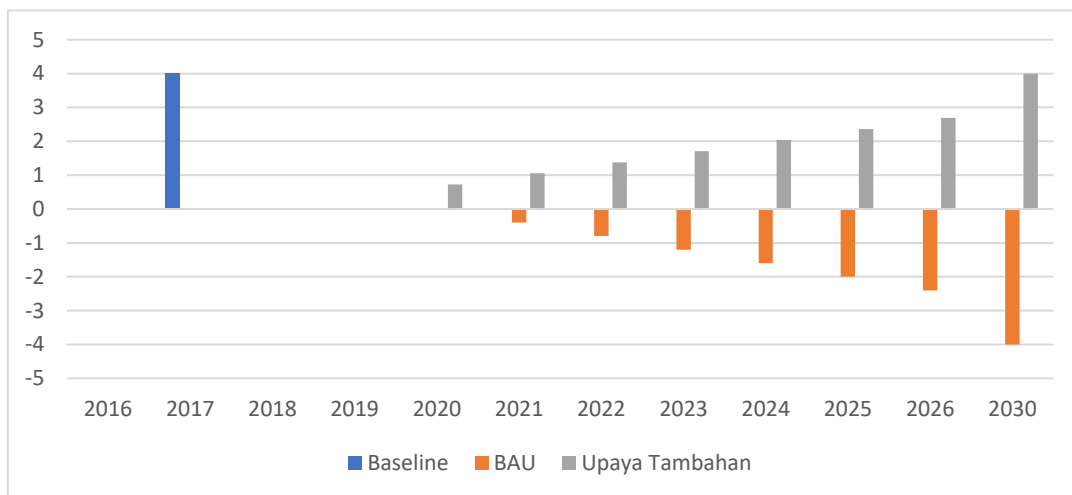
Indikator ini tidak terkait dengan DDDTLH

Proyeksi Capaian Indikator TPB:



Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu

16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).		
Tahun	Baseline	BAU	Upaya Tambahan
2016	0		
2017	4		
2018	0		
2019	0	0	0
2020		0	1
2021		0	1
2022		-1	1
2023		-1	2
2024		-2	2
2025		-2	2
2026		-2	3
2030		-4	4



Isu Strategis TPB:

Masih adanya korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

Rekomendasi Program:

Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi



BAB 5. KESIMPULAN

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pasangkayu dengan mengidentifikasi hasil analisis sebagaimana pada bab-bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pasangkayu adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Pasangkayu melaksanakan 16 Tujuan dan 220 indikator TPB yang menjadi wewenang kabupaten dengan pengelompokkan sebagai berikut: 1. Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS) sebanyak 63 indikator (28,64%) 2. Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB) sebanyak 35 indikator (15,91%). 3. Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (BB) sebanyak 4 indikator (1,82%). 4. Indikator TPB yang tidak memiliki data (TAD) sebanyak 118 indikator (53,63%).
2. Indikator yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target (SS) sebanyak 63 pada periode rencana pembangunan Kabupaten Pasangkayu dapat menggambarkan peran Kabupaten Pasangkayu dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebesar 28,64%. Nilai ini masih tergolong kecil jika dibanding target yang diharapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018.
3. Banyaknya Kelompok Indikator TPB yang tidak memiliki data (TAD) sebanyak 118 indikator adalah dikarenakan beberapa instansi tidak memiliki data. Secara garis besar pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan pada KLHS RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 kedepannya sangat perlu mengawal pencapaian target dari indikator yang sudah dilaksanakan dengan melaksanakan alternatif rekomendasi yang diusulkan
4. Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan SDGs di Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu kontribusi yang diharapkan bisa memaksimalkan dalam pencapaian TPB. Namun selama dokumentasi maupun database terkait hal tersebut tidak tersedia, sehingga analisis pada sub bab peran pemangku kepentingan dalam dokumen ini tidak dilakukan.

